



**PT PAM MINERAL TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA/ *AND ITS SUBSIDIARY***

**LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN/
*CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
AND INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT***

PT PAM MINERAL TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

PT PAM MINERAL TBK
AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
AND INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

**Halaman/
Pages**

Daftar Isi

Table of Contents

Surat Pernyataan Direksi		<i>Directors' Statement Letter</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditor's Report</i>
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1-3	<i>Consolidated Statement of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	4-5	<i>Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	6	<i>Consolidated Statement of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas Konsolidasian	7	<i>Consolidated Statement of Cash Flows</i>
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian	8-109	<i>Notes to the Consolidated Financial Statements</i>



PT PAM MINERAL Tbk

Jl. Batu Jajar No.37, Lantai 5, Jakarta Pusat 10120- Indonesia

Telp. : (62-21) 3513192

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PT PAM MINERAL TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
TANGGAL 31 DESEMBER 2024
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
TERSEBUT**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: : Ruddy Tjanaka
Alamat kantor : Jl. Batu Jajar No. 37
Kec. Gambir, Kel. Kebon Kelapa,
Jakarta Pusat
Alamat rumah : Permata Mediterania,
Jl. JR/29 Kec. Kembangan, Kel.
Srengseng,
Jakarta Barat
Telepon : 021-3453888
Jabatan : Direktur Utama

Nama : Herman
Alamat kantor : Jl. Batu Jajar No. 37
Kec. Gambir, Kel. Kebon Kelapa,
Jakarta Pusat
Alamat rumah : APT. Taman Anggrek Residences
STE-53H, Grogol Pertamburan,
Jakarta Barat
Telepon : 021-3453888
Jabatan : Direktur

menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT PAM Mineral Tbk dan Entitas Anaknya;
2. Laporan keuangan konsolidasian PT PAM Mineral Tbk dan Entitas Anaknya telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian PT PAM Mineral Tbk dan Entitas Anaknya telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan konsolidasian PT PAM Mineral Tbk dan Entitas Anaknya tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal PT PAM Mineral Tbk dan Entitas Anaknya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

**BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT
REGARDING
THE RESPONSIBILITY FOR
THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS OF
PT PAM MINERAL TBK
AND ITS SUBSIDIARY
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED**

We, the undersigned:

Name : Ruddy Tjanaka
Office address : Jl. Batu Jajar No. 37
Kec. Gambir, Kel. Kebon Kelapa,
Jakarta Pusat
Residential address : Permata Mediterania,
Jl. JR/29 Kec. Kembangan, Kel.
Srengseng,
Jakarta Barat
Telephone : 021-3453888
Title : President Director

Name : Herman
Office address : Jl. Batu Jajar No. 37
Kec. Gambir, Kel. Kebon Kelapa
Jakarta Pusat
Residential address : APT. Taman Anggrek Residences
STE-53H, Grogol Pertamburan,
Jakarta Barat
Telephone : 021-3453888
Title : Director

declare that:

1. We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of PT PAM Mineral Tbk and its Subsidiary;
2. The consolidated financial statements of PT PAM Mineral Tbk and its Subsidiary have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;
3. a. All information contained in consolidated financial statements of PT PAM Mineral Tbk and its Subsidiary have been disclosed in a complete and truthful manner;
b. The consolidated financial statements of PT PAM Mineral Tbk and its Subsidiary do not contain incorrect information or material facts; nor do they omit information or material facts; and
4. We are responsible for the internal control system of PT PAM Mineral Tbk and its Subsidiary.

This statement is made truthfully.

Jakarta, 24 Maret/March 24, 2025

Tertanda tangan

Ruddy Tjanaka
Direktur Utama/President Director

Herman
Direktur/Director

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00106/2.0853/AU.1/02/1924-1/1/III/2025

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

PT PAM Mineral Tbk

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT PAM Mineral Tbk dan Entitas Anaknya ("Grup"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian periode ini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Independent Auditor's Report

Report No. 00106/2.0853/AU.1/02/1924-1/1/III/2025

The Shareholders, Boards of Commissioners and Directors

PT PAM Mineral Tbk

Opinion

We have audited the consolidated financial statements of PT PAM Mineral Tbk and its Subsidiary (the "Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as at December 31, 2024, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity and consolidated statement of cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as at December 31, 2024, and its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the year then ended in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Hal Audit Utama (lanjutan)

Hal audit utama yang teridentifikasi dalam audit kami diuraikan sebagai berikut:

Pengakuan pendapatan dari penjualan bijih nikel

Lihat Catatan 3s (Informasi kebijakan akuntansi material - Pengakuan pendapatan dan beban) dan Catatan 27 (Penjualan).

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024, Grup mengakui pendapatan dari penjualan bijih nikel sebesar Rp1.442.490.354.916. Pendapatan dari penjualan bijih nikel diakui pada suatu titik waktu sesuai dengan ketentuan perjanjian ketika pelanggan memperoleh kendali atas bijih nikel tersebut.

Kami memfokuskan perhatian pada area ini sebagai hal audit utama karena signifikansi jumlahnya terhadap laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, yang mengakibatkan sebagian besar audit kami diarahkan pada audit pendapatan dari penjualan bijih nikel. Pengakuan pendapatan yang diakui mungkin tidak akurat jika perhitungannya tidak mencerminkan ketentuan dalam perjanjian.

Bagaimana audit kami merespons hal audit utama

Kami melakukan prosedur audit untuk merespons atas hal audit utama:

- Kami mendapatkan pemahaman mengenai siklus pendapatan, mengevaluasi desain dan implementasi, serta menguji efektivitas operasional kontrol-kontrol utama yang relevan dengan pengakuan pendapatan.
- Kami mengevaluasi kebijakan pengakuan pendapatan Grup terhadap standar akuntansi yang relevan dan terkait dengan pemrosesan serta pengakuan pendapatan Grup.
- Kami mendapatkan dan memahami ketentuan-ketentuan utama dalam kontrak dengan pelanggan.
- Kami menguji akurasi pendapatan yang diakui dengan memvalidasi harga yang disepakati, jumlah, dan kandungan bijih nikel terhadap dokumen pendukung serta menghitung ulang pendapatan berdasarkan informasi tersebut.
- Kami menguji *cut-off* dengan memeriksa *bill of lading*, faktur dan dokumen pendukung lain yang relevan.
- Kami menilai kesesuaian pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian.

Key Audit Matters (continued)

The key audit matter identified in our audit is outlined as follows:

Revenue recognition from sale of nickel ore

Refer to Note 3s (Material accounting policy information - Revenue and expense recognition) and Note 27 (Sales).

For the year ended December 31, 2024, the Group recognized revenue from sale of nickel ore amounting to Rp1,442,490,354,916. Revenue from sale of nickel ore is recognized at a point in time in accordance with the terms of the agreement when the customer obtains control over the nickel ore.

We focused on this area as a key audit matter due to the significance of the amount involved to the consolidated statement profit or loss and other comprehensive income, resulting in a significant portion of our audit directed towards the audit of revenue from sale of nickel ore. Revenue recognized may also be inaccurate if the calculation does not reflect the terms of the agreement.

How our audit addressed the key audit matter

We performed the following audit procedures to address this key audit matter:

- We obtained understanding of the revenue cycle, evaluated the design and implementation, and tested operating effectiveness of key controls relevant to revenue recognition.
- We evaluated the Group's revenue recognition policy against the relevant accounting standards and with respect to the processing and recognition of the Group's revenue.
- We read the agreements with customers to obtain understanding of the key terms and conditions.
- We tested the accuracy of revenue recognized by validating the agreed price, quantity and nickel ore content against the agreement and other relevant supporting documents, and recalculated revenue based on these information.
- We tested cut-off by examining the bill of lading, invoice and other relevant supporting documents.
- We assessed the appropriateness of the related disclosures in the consolidated financial statements.



Informasi Lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam laporan tahunan pada tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, tetapi tidak mencantumkan laporan keuangan konsolidasian dan laporan auditor kami. Laporan tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor ini.

Opini kami atas laporan keuangan konsolidasian tidak mencakup informasi lain dan kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi lain tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan konsolidasian, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi lain yang teridentifikasi di atas, jika tersedia dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah informasi lain mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan konsolidasian atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Ketika kami membaca laporan tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan mengambil tindakan tepat berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Other Information

Management is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the annual report as at December 31, 2024 and for the year then ended, but does not include the consolidated financial statements and our auditor's report thereon. The annual report is expected to be made available to us after the date of this auditor's report.

Our opinion on the consolidated financial statements does not cover the other information and we will not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the consolidated financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the consolidated financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the annual report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.



Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Grup.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgement and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian (lanjutan)

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements (continued)

- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*
- *Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.*

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.



Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian (lanjutan)

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements (continued)

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Tjahjadi & Tamara

Janto, S.E., CPA

Izin Akuntan Publik/Public Accountant License No. AP. 1924
24 Maret 2025/ March 24, 2025



**PT PAM MINERAL TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PAM MINERAL TBK
AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION
AS AT DECEMBER 31, 2024**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2024	2023¹⁾	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	6	227.951.744.981	135.773.480.179	Cash and cash equivalents
Piutang usaha				Trade receivables
Pihak ketiga	7	218.767.592.407	48.639.760.655	Third parties
Piutang non-usaha				Non-trade receivables
Pihak ketiga		547.299.999	399.499.999	Third parties
Persediaan	8	12.821.916.983	65.713.358.864	Inventories
Uang muka	9	135.686.478.901	223.114.220.577	Advances
JUMLAH ASET LANCAR		595.775.033.271	473.640.320.274	TOTAL CURRENT ASSETS
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS
Uang muka	9	4.352.318.103	124.705.210.134	Advances
Uang muka investasi	10	311.865.000.000	125.000.000.000	Advances for investment
Aset tetap - neto	11	26.985.495.762	29.858.981.217	Fixed assets - net
Properti pertambangan - neto	12	54.865.616.100	53.997.443.090	Mining properties - net
Aset takberwujud - neto	13	2.991.389.148	-	Intangible assets - net
Deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya	14	24.636.576.267	14.507.507.897	Restricted time deposits
Aset pajak tangguhan	15c	28.635.422.579	35.128.515.788	Deferred tax assets
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR		454.331.817.959	383.197.658.126	TOTAL NON-CURRENT ASSETS
JUMLAH ASET		1.050.106.851.230	856.837.978.400	TOTAL ASSETS

¹⁾ Direklasifikasi kembali (Catatan 36)

¹⁾ As reclassified (Note 36)

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT PAM MINERAL TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
TANGGAL 31 DESEMBER 2024**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PAM MINERAL TBK
AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION (continued)
AS AT DECEMBER 31, 2024**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2024	2023	
LIABILITAS				LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Utang usaha				Trade payables
Pihak ketiga	16	55.999.290.181	38.454.926.367	Third parties
Biaya yang masih harus dibayar	17	19.521.214.026	43.868.192.590	Accrued expenses
Utang pajak	15a	71.664.945.272	11.178.174.030	Taxes payables
Liabilitas sewa		1.264.473.073	1.949.026.293	Lease liabilities
Utang sewa pembiayaan yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	18	1.783.892.442	1.692.738.151	Current maturities of consumer financing payable
Liabilitas imbalan kerja karyawan jangka pendek	20	724.141.835	-	Short-term employee benefits liabilities
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK		150.957.956.829	97.143.057.431	TOTAL CURRENT LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NON-CURRENT LIABILITIES
Utang sewa pembiayaan konsumen jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun	18	306.518.510	2.090.410.915	Long-term consumer financing payable - net of current maturities
Provisi pembongkaran, rehabilitasi, reklamasi dan penutupan tambang	19	6.340.771.657	-	Provision for decommissioning, mine rehabilitation, reclamation and closure
Liabilitas imbalan kerja karyawan jangka panjang	20	14.316.261.511	12.134.342.634	Long-term employee benefits liabilities
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG		20.963.551.678	14.224.753.549	TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES
JUMLAH LIABILITAS		171.921.508.507	111.367.810.980	TOTAL LIABILITIES

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT PAM MINERAL TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
TANGGAL 31 DESEMBER 2024**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PAM MINERAL TBK
AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION (continued)
AS AT DECEMBER 31, 2024**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2024	2023	
EKUITAS				EQUITY
Ekuitas yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Perusahaan				Equity Attributable to Owners of the Company
Modal saham				Share capital
Dasar - 30.650.000.000 saham dengan nilai nominal Rp20 per saham				Authorized - 30,650,000,000 shares with par value of Rp20 per share
Ditempatkan dan disetor penuh - 10.635.644.907 saham	21	212.712.898.140	212.712.898.140	Issued and fully paid - 10,635,644,907 shares
Tambahan modal disetor	22	426.117.142.473	426.117.142.473	Additional paid-in-capital
Komponen ekuitas lainnya		6.800.438.956	6.800.438.956	Other equity component
Saldo laba:				Retained earnings:
Dicadangkan	23	20.000.000.000	15.000.000.000	Appropriated
Belum dicadangkan		209.817.665.430	82.856.982.762	Unappropriated
Penghasilan komprehensif lain		840.079.252	798.596.019	Other comprehensive income
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Perusahaan		876.288.224.251	744.286.058.350	Total Equity Attributable to Owners of the Company
Kepentingan nonpengendali	26	1.897.118.472	1.184.109.070	Non-controlling interest
JUMLAH EKUITAS		878.185.342.723	745.470.167.420	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		1.050.106.851.230	856.837.978.400	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT PAM MINERAL TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2024**
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PAM MINERAL TBK
AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENT OF
PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2024**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2024	2023	
PENJUALAN	27	1.442.490.354.916	1.141.462.895.855	SALES
BEBAN POKOK PENJUALAN	28	<u>(925.222.099.374)</u>	<u>(1.004.799.998.775)</u>	COST OF GOODS SOLD
LABA BRUTO		517.268.255.542	136.662.897.080	GROSS PROFIT
Beban umum dan administrasi	29	<u>(103.167.237.412)</u>	<u>(91.498.586.358)</u>	General and administrative expenses
LABA USAHA		414.101.018.130	45.164.310.722	OPERATING INCOME
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN				OTHER INCOME (EXPENSE)
(Beban) penghasilan lainnya - neto		(248.211.865)	753.978.366	Other (expenses) income - net
Penghasilan keuangan		1.431.860.404	885.152.816	Finance interest
Beban keuangan		<u>(205.457.617)</u>	<u>(139.354.851)</u>	Finance costs
Pendapatan lain-lain neto		<u>978.190.922</u>	<u>1.499.776.331</u>	Other income - net
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		415.079.209.052	46.664.087.053	PROFIT BEFORE INCOME TAX
BEBAN PAJAK PENGHASILAN - NETO	15b	<u>(96.321.685.927)</u>	<u>(19.529.056.707)</u>	INCOME TAX EXPENSE - NET
LABA TAHUN BERJALAN		318.757.523.125	27.135.030.346	PROFIT FOR THE YEAR

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT PAM MINERAL TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI
DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 2024**
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PAM MINERAL TBK
AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENT OF
PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME (continued)
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2024**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2024	2023	
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya:				Items that will not be reclassified to profit or loss in subsequent period:
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja karyawan	20	53.214.917	1.029.976.920	Remeasurement of employee benefits liabilities
Beban pajak penghasilan terkait	15c	(11.707.282)	(226.594.923)	Related income tax expense
Jumlah penghasilan komprehensif lain - setelah pajak		41.507.635	803.381.997	Total other comprehensive income - net of tax
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		318.799.030.760	27.938.412.343	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				Profit for the year attributable to:
Pemilik Perusahaan		318.044.538.125	26.924.380.566	Owners of the Company
Kepentingan nonpengendali	26	712.985.000	210.649.780	Non-controlling interest
LABA TAHUN BERJALAN		318.757.523.125	27.135.030.346	PROFIT FOR THE YEAR
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				Total comprehensive income for the year attributable to:
Pemilik Perusahaan		318.086.021.358	27.725.836.902	Owners of the Company
Kepentingan nonpengendali	26	713.009.402	212.575.441	Non-controlling interest
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		318.799.030.760	27.938.412.343	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
LABA PER SAHAM DASAR DAN DILUSIAN	25	29,90	2,65	BASIC EARNINGS AND DILUTED PER SHARE

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

PT PAM MINERAL TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PAM MINERAL TBK AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Diatribusikan kepada Pemilik Perusahaan/ Attributable to Owners of the Company											
		Saldo laba/ Retained earnings									
	Catatan/ Notes	Modal saham/ Share capital	Tambahan modal disetor/ Additional paid-in-capital	Komponen ekuitas lainnya/ Other equity component	Dicadangkan/ Appropriated	Belum dicadangkan/ Unappropriated	Penghasilan (kerugian) komprehensif lainnya/ Other comprehensive income (loss)	Jumlah/ Total	Kepentingan nonpengendali/ Non-controlling interest	Jumlah ekuitas/ Total equity	
Saldo 1 Januari 2023		193.250.321.140	153.649.135.477	6.800.438.956	-	142.647.231.716	(2.860.317)	496.344.266.972	971.533.629	497.315.800.601	Balance as at January 1, 2023
Laba tahun berjalan		-	-	-	-	26.924.380.566	-	26.924.380.566	210.649.780	27.135.030.346	Profit for the year
Penghasilan komprehensif lain:											Other comprehensive income:
Pengkukuran kembali liabilitas imbalan kerja karyawan, setelah pajak	20,26	-	-	-	-	-	801.456.336	801.456.336	1.925.661	803.381.997	Remeasurement of employee benefits liabilities, net of tax
Jumlah pendapatan komprehensif		-	-	-	-	26.924.380.566	801.456.336	27.725.836.902	212.575.441	27.938.412.343	Total comprehensive income
Transaksi yang diakui secara langsung dalam ekuitas:											Transactions recognized directly in equity:
Eksekusi Waran Seri I	21,22	19.462.577.000	272.468.006.996	-	-	-	-	291.930.583.996	-	291.930.583.996	Exercise of Warrants Series I
Dividen tunai:	24	-	-	-	-	(29.173.429.377)	-	(29.173.429.377)	-	(29.173.429.377)	Cash dividends:
Final 2022		-	-	-	-	(42.541.200.143)	-	(42.541.200.143)	-	(42.541.200.143)	Final 2022
Interim 2023		-	-	-	-	-	-	-	-	-	Interim 2023
Penempatan untuk cadangan modal	23	-	-	-	15.000.000.000	(15.000.000.000)	-	-	-	-	Appropriation for general reserve
Saldo 31 Desember 2023		212.712.898.140	426.117.142.473	6.800.438.956	15.000.000.000	82.856.982.762	798.596.019	744.286.058.350	1.184.109.070	745.470.167.420	Balance as at December 31, 2023
Laba tahun berjalan		-	-	-	-	318.044.538.125	-	318.044.538.125	712.985.000	318.757.523.125	Profit for the year
Penghasilan komprehensif lain:											Other comprehensive income:
Pengkukuran kembali liabilitas imbalan kerja karyawan, setelah pajak	20,26	-	-	-	-	-	41.483.233	41.483.233	24.402	41.507.635	Remeasurement of employee benefits liabilities, net of tax
Jumlah pendapatan komprehensif		-	-	-	-	318.044.538.125	41.483.233	318.086.021.358	713.009.402	318.799.030.760	Total comprehensive income
Transaksi yang diakui secara langsung dalam ekuitas:											Transactions recognized directly in equity:
Dividen tunai:	24	-	-	-	-	(37.224.610.205)	-	(37.224.610.205)	-	(37.224.610.205)	Cash dividends:
Final 2023		-	-	-	-	(148.859.245.252)	-	(148.859.245.252)	-	(148.859.245.252)	Final 2023
Interim 2024		-	-	-	-	-	-	-	-	-	Interim 2024
Penempatan untuk cadangan modal	23	-	-	-	5.000.000.000	(5.000.000.000)	-	-	-	-	Appropriation for general reserve
Saldo 31 Desember 2024		212.712.898.140	426.117.142.473	6.800.438.956	20.000.000.000	209.817.665.430	840.079.252	876.288.224.251	1.897.118.472	878.185.342.723	Balance as at December 31, 2024

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT PAM MINERAL TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS
KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2024**
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PAM MINERAL TBK
AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENT OF
CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2024**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2024	2023	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan		1.272.362.523.164	1.286.828.464.553	Cash receipts from customers
Pembayaran untuk:				Cash paid to:
Pemasok		(687.180.213.835)	(1.214.972.606.869)	Suppliers
Karyawan		(64.433.346.474)	(54.570.036.953)	Employees
Kas yang dihasilkan dari operasi		520.748.962.855	17.285.820.731	Cash generated from operations
Pembayaran beban keuangan		(205.457.617)	(139.354.851)	Finance costs paid
Penerimaan bunga		1.431.860.404	885.152.816	Interest received
Pembayaran pajak penghasilan badan	15	(30.263.440.168)	(63.523.627.066)	Corporate income tax paid
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi		491.711.925.474	(45.492.008.370)	Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Uang muka perolehan aset tetap dan aset takberwujud	9	(4.352.318.103)	-	Advances for the acquisition of fixed asset and intangible assets
Pembayaran uang muka investasi	10	(186.865.000.000)	(125.000.000.000)	Payment of advances for investment
Perolehan aset tetap	11	(2.448.576.012)	(2.038.245.359)	Acquisition of fixed assets
Penerimaan dari pelepasan aset tetap	11	-	370.000.000	Proceeds from disposal of fixed assets
Perolehan aset takberwujud	13	(3.502.114.125)	-	Acquisition of intangible assets
Penempatan deposit reklamasi	14	(10.129.068.370)	(340.639.695)	Placement of reclamation deposits
Arus Kas Neto yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi		(207.297.076.610)	(127.008.885.054)	Net Cash Used in Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Pembayaran utang sewa pembiayaan konsumen		(1.692.738.114)	(3.750.060.971)	Payment of consumer financing payable
Pembayaran liabilitas sewa		(4.459.990.491)	(3.692.644.736)	Payment of lease liabilities
Pembayaran dividen	24	(186.083.855.457)	(71.714.629.520)	Payment of dividends
Penerimaan dari penerbitan saham yang berasal dari pelaksanaan Waran Seri I	21,22	-	291.930.583.996	Proceeds from issuance of share arising from exercise of Warrant Series I
Arus Kas Neto (Digunakan untuk) Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan		(192.236.584.062)	212.773.248.769	Net Cash (Used in) Provided by Financing Activities
KENAIKAN NETO KAS DAN SETARA KAS		92.178.264.802	40.272.355.345	NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN		135.773.480.179	95.501.124.834	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF THE YEAR
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	6	227.951.744.981	135.773.480.179	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF THE YEAR

Informasi tambahan untuk laporan arus kas diungkapkan pada Catatan 30.

Supplementary information for cash flows is presented in Note 30.

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

PT PAM MINERAL TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT PAM Mineral Tbk ("PAM" atau "Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta No. 32 tanggal 15 Januari 2008 oleh Notaris Edison Jingga, S.H., di Jakarta dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-21657.AH.01.01 tanggal 29 April 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 60, Tambahan No. 13172 tertanggal 25 Juli 2008.

Anggaran Dasar PAM telah mengalami beberapa kali perubahan, akta terakhir No. 105 tanggal 13 September 2023 oleh Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta, berkaitan dengan; a) maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2020, b) perubahan ketentuan dalam rangka penyesuaian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, c) pengangkatan Dewan Komisaris Independen Perusahaan, d) dan perubahan alamat Perusahaan. Akta perubahan tersebut telah disahkan oleh dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0185592.AH.01.11 tanggal 19 September 2023. Akta tersebut telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 96 tertanggal 1 Desember 2023.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar PAM, ruang lingkup kegiatan utama Perusahaan bergerak dalam jasa bidang konstruksi pertambangan, jasa pemeliharaan saluran air/pipa, jasa penunjang kegiatan pertambangan, serta pertambangan meliputi batu bara, bijih uranium dan thorium, eksplorasi dan eksploitasi air mineral, menjalankan usaha di bidang pertambangan nikel, pasir besi dan bijih besi.

PAM didirikan dan berdomisili di Indonesia. Alamat yang terdaftar di Jl. Batu Jajar No. 37, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat.

PAM beroperasi secara komersial pada tahun 2012 sampai 2013 dalam industri pertambangan nikel. PAM kembali beroperasi komersial pada bulan Juni 2023.

PT PAM MINERAL TBK AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. GENERAL

a. Establishment and General information

PT PAM Mineral Tbk ("PAM" or "the Company") was established based deed No. 32 dated January 15, 2008 of Edison Jingga, S.H., Notary in Jakarta and approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-21657.AH.01.01 dated April 29, 2008, and has been announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 60, Supplement No. 13172 dated July 25, 2008.

PAM's Articles of Association have been amended several times, most recently Notarial Deed No. 105 dated September 13, 2023, of Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notary in Jakarta, regarding the: a) purposes and objectives and business activities of the Company in order to align to the Indonesian Standard Industrial Classification in 2020, b) the provisions in order to align to the revised of the Financial Services Authority Regulations, c) appointment of the Company's Independent Board of Commissioners, and d) change in the Company's address. This amendment was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-0185592.AH.01.11 dated September 19, 2023. The Deed has been announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 96 dated December 1, 2023.

In accordance with Article 3 of PAM's Articles of Association, the Company's main business encompasses construction services, maintenance services for water/pipelines, supporting services for mining activities, as well as mining including coal, uranium and thorium ores, exploration and exploitation of mineral water, running a business in nickel, iron sand and iron ore mining.

PAM is incorporated and domiciled in Indonesia. The address of its registered office is Jl. Batu Jajar No. 37, Kebon Kelapa Subdistrict, Gambir District, Central Jakarta.

PAM operated commercially in 2012 to 2013 in the nickel mining industry. PAM has resumed commercial operations in June 2023.

PT PAM MINERAL TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PAM MINERAL TBK AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan Informasi Umum (lanjutan)

Berdasarkan Akta Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., No. 105 tanggal 13 September 2023 Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi PAM pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama
Komisaris Independen
Komisaris Independen

David Kristiali
Yamin Dharmawan
Sudung Situmorang

Direksi

Direktur Utama
Direktur
Direktur

Ruddy Tjanaka
Herman
Roni Permadi Kusumah

Susunan Komite Audit Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Ketua
Anggota
Anggota

Yamin Dharmawan
Penny Halim
Steven Hartanto

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Perusahaan dan Entitas Anaknya (secara bersama-sama disebut "Grup") memiliki masing-masing sebanyak 333 dan 347 orang karyawan (tidak diaudit).

Entitas induk langsung dan entitas induk terakhir PAM adalah PT PAM Metalindo, yang didirikan dan berdomisili di Indonesia.

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan oleh Direksi Perusahaan pada tanggal 24 Maret 2025.

b. Penawaran Saham Umum Perusahaan

Berdasarkan Akta Notaris No. 122 tanggal 17 Desember 2020 dari Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., sebagaimana telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0421208 tanggal 18 Desember 2020, para pemegang saham menyetujui rencana Penawaran Umum Saham Perdana Biasa kepada masyarakat melalui pasar modal serta melakukan pencatatan saham PAM di Bursa Efek Indonesia (BEI).

1. GENERAL (continued)

a. Establishment and General information (continued)

Based on Notarial Deed No. 105 dated September 13, 2023 of Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notary in Jakarta, the composition of the Company's Boards of Commissioners and Directors as at December 31, 2024 and 2023 is as follows:

Board of Commissioners

*President Commissioner
Independent Commissioner
Independent Commissioner*

Board of Directors

*President Director
Director
Director*

The composition of the Company's Audit Committee as at December 31, 2024 and 2023 is as follows:

*Chairman
Member
Member*

As at December 31, 2024 and 2023, the Company and its subsidiary (collectively referred to as the "Group") have 333 and 347 employees, respectively (unaudited).

PAM's immediate and ultimate parent company is PT PAM Metalindo, incorporated and domiciled in Indonesia.

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, which were completed and authorized for issuance by the Company's Board of Directors on March 24, 2025.

b. Public Offering of the Company's Shares

Based on Notarial Deed No. 122 dated December 17, 2020 of Notary Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., as approved by the Ministry of Law and Human Rights in its Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0421208 dated December 18, 2020, the shareholders approved the Initial Public Offering of Ordinary Shares plan to the public through capital market and listing of PAM's shares on the Indonesia Stock Exchange (IDX).

PT PAM MINERAL TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PAM MINERAL TBK AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

b. Penawaran Saham Umum Perusahaan (lanjutan)

Pada tanggal 30 Juni 2021, PAM memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dalam suratnya No. S-98/D.04/2021 untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 2.000.000.000 lembar saham PAM kepada masyarakat dengan nilai nominal Rp20 per lembar saham, dan harga penawaran Rp100 per lembar saham. Saham tersebut telah dicatatkan pada BEI pada tanggal 9 Juli 2021.

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perusahaan secara bersamaan akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 2.600.000.000 Waran Seri I. Waran Seri I ini diberikan secara cuma-cuma kepada para pemegang Saham Baru Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal penjabatan dengan perbandingan 10 pemegang Saham Baru mendapatkan 13 Waran Seri I. Dimana setiap 1 Waran Seri I berhak untuk membeli 1 saham baru Perusahaan.

Waran Seri I dengan harga pelaksanaan Rp300 per saham dan dapat dieksekusi mulai tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan 7 Juli 2023. Bila waran tidak dilaksanakan selama periode ini, maka waran tersebut menjadi kedaluwarsa dan tidak memiliki nilai.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, jumlah Waran Seri I yang telah dieksekusi adalah masing-masing sebesar nil dan 10.635.644.907 waran.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, saham yang beredar telah dicatat di BEI.

c. Struktur Grup

Detail dari entitas anak Grup adalah sebagai berikut:

Entitas Anak/ Subsidiary	Domisili/ Domicile	Jenis usaha/ Nature of business	Persentase kepemilikan efektif/ Effective percentage of ownership	Tahun operasional komersial/ Start of commercial operations	Jumlah aset sebelum eliminasi/ Total assets before elimination	
					2024	2023
Kepemilikan langsung/ Direct ownership						
PT Indrabakti Mustika	Indonesia	Pertambangan nikel/ Nickel mining	99,77%	2018	931.990.830.005	575.857.593.196

1. GENERAL (continued)

b. Public Offering of the Company's Shares (continued)

On June 30, 2021, PAM obtained the notice of effectivity from the Financial Services Authority ("FSA") in its letter No. S-98/D.04/2021 to conduct an Initial Public Offering of 2,000,000,000 shares of PAM to the public with a par value of Rp20 per share and an offering price of Rp100 per share. The shares were listed on the IDX on July 9, 2021.

In connection with the Initial Public Offering, the Company simultaneously issued a total of 2,600,000,000 Warrants Series I. The Warrants Series I shall be granted free of charge to the holders of New Shares of the Company whose names are registered in the Register of Shareholders on the allotment date with a ratio of 10 New Shares to 13 Warrant Series I. Each Warrant Series I is entitled to purchase 1 new share of the Company.

The Warrants Series I has an exercise price of Rp300 per share and can be exercised from January 10, 2023 until July 7, 2023. If the warrants are not exercised during this period, the warrants will expire and will have no value.

As at December 31, 2024 and 2023, the total number of Warrants Series I exercised amounted to nil and 10,635,644,907 warrants, respectively.

As at December 31, 2024 and 2023, the outstanding shares of PAM are listed on the IDX.

c. The Group structure

Details of the Group's subsidiary are as follows:

1. UMUM (lanjutan)

c. Struktur Grup (lanjutan)

PT Indrabakti Mustika ("IBM")

IBM didirikan berdasarkan Akta No. 289 tanggal 18 Agustus 1988 oleh Mishardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C2-11152.HT.01.01.TH'88 tanggal 6 Desember 1988.

Pada tanggal 18 Agustus 2020, PAM mengakuisisi dengan menambah saham baru sebanyak 98,84% saham IBM dengan nilai perolehan sebesar Rp26.500.000.000. Pada tanggal yang sama, PAM membeli saham IBM yang dimiliki oleh Francisco Sumasto sebanyak 563 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 atau setara dengan Rp563.000.000. Sehingga, PAM meningkatkan kepemilikan saham di IBM menjadi 99,05% atau 265.563 lembar saham yang terdiri dari 563 saham seri A dengan nominal Rp1.000.000 atau setara dengan Rp563.000.000 dan 265.000 saham seri B dengan nominal Rp100.000 atau setara dengan Rp26.500.000.000. Sehingga memperoleh pengendalian pada IBM (Catatan 5).

PAM menambah kepemilikan sahamnya di IBM menjadi 99,77% pada tanggal 4 Oktober 2021 atas penerbitan saham baru oleh IBM sebanyak 848.300 saham Seri B senilai Rp84.830.000.000. Perbedaan antara penurunan bagian proporsional dalam jumlah tercatat aset neto IBM dan imbalan yang dibayar adalah tidak material.

d. Wilayah eksplorasi dan eksploitasi

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Grup memiliki wilayah eksplorasi dan eksploitasi yang tercakup dalam Izin Usaha Pertambangan ("IUP"), sebelumnya disebut "Kuasa Pertambangan".

1. GENERAL (continued)

c. The Group structure (continued)

PT Indrabakti Mustika ("IBM")

IBM was established based on Deed No. 289 dated August 18, 1988 of Mishardi Wilamarta, S.H., Notary in Jakarta, and has been ratified by the Ministry of Justice of the Republic of Indonesia through its Decision Letter No. C2-11152.HT.01.01.TH'88 dated December 6, 1988.

On August 18, 2020, PAM acquired 98.84% new shares of IBM with an acquisition value of Rp26,500,000,000. On same date, PAM purchased 563 shares of IBM owned by Francisco Sumasto with a par value of Rp1,000,000 or equal to Rp563,000,000. As a result, PAM increased its ownership in IBM to 99.05% or 265,563 shares consisting of 563 series A shares with par value of Rp1,000,000 or equal to Rp563,000,000 and 265,000 series B shares with par value of Rp100,000 or equal to Rp26,500,000,000. This obtaining control of IBM (Note 5).

PAM increased its share ownership in IBM to 99.77% on October 4, 2021 for the issuance of 848,300 series B shares by IBM amounted to Rp84,830,000,000. The difference between the decrease in the proportionate share in the carrying amount of the net assets of IBM and the consideration paid is immaterial.

d. Exploration and exploitation areas

As at December 31, 2024 and 2023, the Group have Exploration and Exploitation Areas which are covered by Mining Business Permit ("MBP"), previously referred as "Authority of Mining".

PT PAM MINERAL TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PAM MINERAL TBK AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

d. Wilayah eksplorasi dan eksploitasi (lanjutan)

Rincian dari IUP Grup adalah sebagai berikut:

PAM

Lokasi/ Location	Kode Wilayah/ Areas Code	Area (tidak diaudit)/ Areas (unaudited)	IUP Operasi Produksi/ Production Operation MBP	Cadangan dalam MT/ Reserves in MT			
				Terkira/ Estimated		Terbukti/ Realized	
				Ton (MT)	%	Ton (MT)	%
Buleleng dan/and Laroenai, Morowali, Sulawesi Tengah	MW058	198 Ha	Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 81203140114920005 Tahun 2024 berlaku sampai 15 April 2035/ Decree of the Ministry of Energy and Mineral Resources No. 81203140114920005 Year 2024 valid until April 15, 2035	571 ribu/ thousands	1,24	7,7 juta/ millions	1,30

Berdasarkan Laporan Estimasi Sumber Daya dan Cadangan Mineral oleh Yanri Budi Karseno, ST., MAusIMM., CPI., CP. dan Citra Kusuma, ST., MAusIMM., CPI., CP. pada Januari 2025/ Based on Report on Estimated Mineral Resources and Reserves by Yanri Budi Karseno, ST., MAusIMM., CPI., CP. and Citra Kusuma, ST., MAusIMM., CPI., CP. in January, 2025.

IBM

Lokasi/ Location	Kode Wilayah/ Areas Code	Area (tidak diaudit)/ Areas (unaudited)	IUP Operasi Produksi/ Production Operation MBP	Cadangan dalam MT/ Reserves in MT			
				Terkira/ Estimated		Terbukti/ Realized	
				Ton (MT)	%	Ton (MT)	%
Langgikima, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara	KW07 OKP 007	576 Ha	Keputusan Bupati Konawe Utara No. 230 Tahun 2014 berlaku sampai Januari 2034/ Decree of the Regent of North Konawe No. 230 Year 2014 valid until January 2034	4,3 juta/ millions	1,12	17,1 juta/ millions	1,15

Berdasarkan Laporan Estimasi Sumber Daya dan Cadangan Mineral oleh PT AKA Geosains Consulting pada tanggal 1 Juni 2023/ Based on Report on Estimated Mineral Resources and Reserves by PT AKA Geosains Consulting in June 1, 2023.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023,
perizinan terkait kegiatan usaha Grup adalah
sebagai berikut:

As at December 31, 2024 and 2023, licenses
related to the Group's business activities are as
follows:

PAM

No	Tanggal/ Date	Nomor Surat Izin/ Number of License Letter	Jenis Perizinan/ Types of Licenses
1.	21 Juni/ June 21, 2016	BX-222/XX008	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang Izin Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Khusus Pertambangan Nikel/ Decree of the Director General of Sea Transportation regarding the Construction and Operation Permit for a Special Nickel Mining Terminal
2.	11 Desember/ December 11, 2019	A.1483/AL.308/DJPL	Penetapan Pemenuhan Komitmen Pendaftaran Izin Pengoperasian Terminal Khusus Pertambangan Operasi Produksi Nikel/ Determination of Fulfillment of Commitment for Registration of Special Terminal Operation for Nickel Production Operations Mining Permits

PT PAM MINERAL TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PAM MINERAL TBK AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

d. Wilayah eksplorasi dan eksploitasi (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, perizinan terkait kegiatan usaha Grup adalah sebagai berikut: (lanjutan)

PAM

No	Tanggal/ Date	Nomor Surat Izin/ Number of License Letter	Jenis Perizinan/ Types of Licenses
3.	9 Juni/ June 9, 2020	188.4/KEP.006/DPMP TSP/E-SPEED/2020	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Morowali tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pertambangan Komoditas Logam (Nikel) di Desa Buleleng dan Desa Laroenai Kecamatan Bungku Pesisir Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah/ <i>Decree of the Head of Investment and One Stop Services of Morowali Regency regarding Environmental Feasibility of Metal Commodity (Nickel) Mining Plans in Buleleng and Laroenai Villages, Bungku Pesisir District, Morowali Regency, Central Sulawesi Province</i>
4.	9 Juni/ June 9, 2020	188.4/KEP.007/DPMP TSP/E-SPEED/2020	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Morowali tentang Izin Lingkungan Rencana Pertambangan Komoditas Logam (Nikel) di Desa Buleleng dan Desa Laroenai Kecamatan Bungku Pesisir Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah/ <i>Decree of the Head of Investment and One Stop Services of Morowali Regency regarding Environmental Permits for Metal Commodity (Nickel) Mining Plans in Buleleng and Laroenai Villages, Bungku Pesisir District, Morowali Regency, Central Sulawesi Province</i>
5.	30 Desember/ December 30, 2020	188.4/KEP.041/IPAL/D PMPTSP/E- SPEED/XII/2020	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Morowali tentang Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ke Air Penerima PT PAM Mineral Tbk/ <i>Decree of the Head of the Morowali Regency Investment and One-Stop Integrated Service Office on Permit for Management of Hazardous and Toxic Waste to Receiving Water of PT PAM Mineral Tbk</i>
6.	30 Desember/ December 30, 2020	188.4/KEP.042/LB3/D PMPTSP/E- SPEED/XII/2020	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Morowali tentang Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) Untuk Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) PT PAM Mineral Tbk/ <i>Decree of the Head of the Morowali Regency Investment and One-Stop Integrated Service Office on the Permit for Hazardous and Toxic Waste Management (LB3) for Temporary Storage of Hazardous and Toxic Waste (LB3) PT PAM Mineral Tbk</i>

IBM

No	Tanggal/ Date	Nomor Surat Izin/ Number of Licenses Letter	Jenis Perizinan/ Types of Licenses
1.	11 Desember/ December 11, 2013	551 Tahun 2013/ 551 Year 2013	Keputusan Bupati Konawe Utara tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pertambangan Bijih Nikel PT Indrabakti Mustika di Kecamatan Langgikima/ <i>Decree of the North Konawe Regent regarding the environmental feasibility of PT Indrabakti Mustika's nickel ore mining activities in Langgikima District</i>
2.	11 Desember/ December 11, 2013	552 Tahun 2013/ 552 Year 2013	Keputusan Bupati Konawe Utara tentang Izin Lingkungan Pertambangan Bijih Nikel PT Indrabakti Mustika di Kecamatan Langgikima/ <i>Decree of the North Konawe Regent regarding the environmental permit for nickel ore mining of PT Indrabakti Mustika in Langgikima District</i>
3.	23 Oktober/ October 23, 2017	5560/Menlhk- PDASHL/KTA/DAS.1/1 0/2017	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tentang Penetapan Lokasi Penanaman Daerah Aliran Sungai/ <i>Decree of the Ministry of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia on the Establishment of Watershed Planting Sites</i>

PT PAM MINERAL TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PAM MINERAL TBK AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

d. Wilayah eksplorasi dan eksploitasi (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, perizinan terkait kegiatan usaha Grup adalah sebagai berikut: (lanjutan)

IBM

No	Tanggal/ Date	Nomor Surat Izin/ Number of License Letter	Jenis Perizinan/ Types of Licenses
4.	5 Juni/ June 5, 2017	54/1/IPPKH/PMDN/20 17	Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Bijih Nikel dan Sarana Penunjangnya dari Badan Koordinasi Penanaman Modal/ <i>Borrowing and Use of Forest Area Permits for nickel ore production operations and supporting facilities from the Investment Coordinating Board</i>
5.	9 Desember/ December 9, 2019	503/31/TPSLB3DPMP TSP/XII/2019	Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (TPSLB3) PT Indrabakti Mustika oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara/ <i>Permit for temporary storage of hazardous and toxic waste (TSHTW) PT Indrabakti Mustika by the Head of the Investment Service and One Stop Services of North Konawe Regency</i>
6.	9 Desember/ December 9, 2019	503/32/IPLCDPMPTS P/XII/2019	Izin Pembuangan Limbah Cair Kegiatan Penambangan Bijih Nikel PT Indrabakti Mustika oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara/ <i>Permit for disposal of liquid waste for nickel ore mining activities of PT Indrabakti Mustika by the Head of the Investment and One Stop Services Office of North Konawe Regency</i>

1. GENERAL (continued)

d. Exploration and exploitation areas (continued)

As at December 31, 2024 and 2023, licenses related to the Group's business activities are as follows: (continued)

2. PENERAPAN STANDAR BARU DAN REVISI

a. Perubahan Nomenklatur Standar Akuntansi Keuangan Indonesia

Sejalan dengan pengesahan Kerangka Standar Pelaporan Keuangan Indonesia, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI") menyetujui perubahan nomenklatur Standar Akuntansi Keuangan Indonesia yang mengatur penomoran Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi atas Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK"). Hal ini bertujuan untuk membedakan antara PSAK dan ISAK yang diadopsi dari *International Financial Reporting Standards* ("IFRS") dan yang tidak. Perubahan nomenklatur Standar Akuntansi Keuangan Indonesia yang berlaku efektif pada 1 Januari 2024, tidak akan mempengaruhi isi masing-masing PSAK dan ISAK.

2. ADOPTION OF NEW AND REVISED STANDARDS

a. Change in the Indonesian Financial Accounting Standards Nomenclature

In line with the ratification of the Indonesian Financial Reporting Standards Framework, the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants ("DSAK-IAI") approved the change in the Indonesian Financial Accounting Standards nomenclature which regulates the numbering of Statements of Financial Accounting Standards ("PSAK") and Interpretations of Financial Accounting Standards ("ISAK"). This aims to differentiate between PSAK and ISAK which are adopted from *International Financial Reporting Standards* ("IFRS") and to those which are not. The change in the Indonesian Financial Accounting Standards nomenclature, which is effective on January 1, 2024, does not affect the contents of each PSAK and ISAK.

2. PENERAPAN STANDAR BARU DAN REVISI (lanjutan)

b. Amendemen/Penyesuaian Standar yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan

Dalam tahun berjalan, Grup telah menerapkan sejumlah amendemen/penyesuaian PSAK yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024. Penerapan atas PSAK revisi tidak mengakibatkan perubahan atas kebijakan akuntansi Grup dan tidak memiliki dampak material terhadap jumlah yang dilaporkan pada tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya.

- PSAK 201 (Amendemen), "Penyajian Laporan Keuangan": Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang

Amendemen ini hanya mempengaruhi penyajian liabilitas sebagai jangka pendek atau jangka panjang dalam laporan posisi keuangan dan bukan jumlah atau waktu pengakuan aset, liabilitas, penghasilan atau beban, atau informasi yang diungkapkan mengenai pos-pos tersebut.

Amendemen tersebut mengklarifikasi bahwa klasifikasi liabilitas sebagai jangka pendek atau jangka panjang didasarkan pada hak yang ada pada akhir periode pelaporan, menetapkan bahwa klasifikasi tersebut tidak dipengaruhi oleh ekspektasi apakah entitas akan menggunakan haknya untuk menunda penyelesaian suatu liabilitas, menjelaskan bahwa hak tersebut ada jika kovenan dipatuhi pada akhir periode pelaporan, dan memperkenalkan definisi 'penyelesaian' untuk memperjelas bahwa penyelesaian mengacu pada pengalihan ke pihak lain atas kas, instrumen ekuitas, aset dan jasa lainnya.

- PSAK 201 (Amendemen), "Penyajian Laporan Keuangan": Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan

Amendemen tersebut menetapkan bahwa hanya perjanjian yang harus dipatuhi entitas pada atau sebelum akhir periode pelaporan yang memengaruhi hak entitas untuk menunda penyelesaian liabilitas setidaknya selama dua belas bulan setelah tanggal pelaporan (dan karenanya harus dipertimbangkan dalam menilai klasifikasi liabilitas sebagai lancar atau tidak lancar).

2. ADOPTION OF NEW AND REVISED STANDARDS (continued)

b. Amendments/Improvements to Standards Effective in the Current Year

In the current year, the Group has applied amendments/improvements to PSAK that are relevant to its operations and effective for accounting period beginning on or after January 1, 2024. The adoption of these revised PSAKs does not result in changes to the Group's accounting policies and has no material effect on the amounts reported for the current or prior years.

- *PSAK 201 (Amendment), "Presentation of Financial Statements": Classification of Liabilities as Current or Non-current*

The amendments affect only the presentation of liabilities as current or non-current in the statement of financial position and not the amount or timing of recognition of any asset, liability, income or expenses, or the information disclosed about those items.

The amendments clarify that the classification of liabilities as current or non-current is based on rights that are in existence at the end of the reporting period, specify that classification is unaffected by expectations about whether an entity will exercise its right to defer settlement of a liability, explain that rights are in existence if covenants are complied with at the end of the reporting period, and introduce a definition of 'settlement' to make clear that settlement refers to the transfer to the counterparty of cash, equity instruments, other assets or services.

- *PSAK 201 (Amendment), "Presentation of Financial Statements": Non-current Liabilities with Covenants*

The amendments specify that only covenants that an entity is required to comply with on or before the end of the reporting period affect the entity's right to defer settlement of a liability for at least twelve months after the reporting date (and therefore must be considered in assessing the classification of the liability as current or non-current).

2. PENERAPAN STANDAR BARU DAN REVISI (lanjutan)

b. Amendemen/Penyesuaian Standar yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan (lanjutan)

- PSAK 201 (Amendemen), "Penyajian Laporan Keuangan": Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan (lanjutan)

Perjanjian tersebut memengaruhi apakah hak tersebut ada pada akhir periode pelaporan, bahkan jika kepatuhan terhadap perjanjian dinilai hanya setelah tanggal pelaporan (misalnya perjanjian berdasarkan posisi keuangan entitas pada tanggal pelaporan yang dinilai kepatuhannya hanya setelah tanggal pelaporan).

DSAK-IAI juga menetapkan bahwa hak untuk menunda penyelesaian liabilitas setidaknya selama dua belas bulan setelah tanggal pelaporan tidak terpengaruh jika entitas hanya harus mematuhi perjanjian setelah periode pelaporan. Namun, jika hak entitas untuk menunda penyelesaian liabilitas bergantung pada kepatuhan entitas terhadap perjanjian dalam waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan, entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan memahami risiko liabilitas yang harus dibayar kembali dalam waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan. Ini akan mencakup informasi tentang perjanjian (termasuk sifat perjanjian dan kapan entitas diharuskan untuk mematuhi), jumlah tercatat liabilitas terkait dan fakta serta keadaan, jika ada, yang menunjukkan bahwa entitas mungkin mengalami kesulitan dalam mematuhi perjanjian.

- PSAK 207 (Amendemen), "Laporan Arus Kas" dan PSAK 107 (Amendemen), "Instrumen Keuangan: Pengungkapan": Pengaturan Pembiayaan Pemasok

Amendemen tersebut menambahkan tujuan pengungkapan pada PSAK 207 yang menyatakan bahwa suatu entitas diharuskan untuk mengungkapkan informasi tentang pengaturan keuangan pemasoknya yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk menilai dampak pengaturan tersebut terhadap liabilitas dan arus kas entitas. Selain itu, PSAK 107 diamendemen untuk menambahkan pengaturan keuangan pemasok sebagai contoh dalam persyaratan untuk mengungkapkan informasi tentang paparan entitas terhadap konsentrasi risiko likuiditas.

2. ADOPTION OF NEW AND REVISED STANDARDS (continued)

b. Amendments/Improvements to Standards Effective in the Current Year (continued)

- PSAK 201 (Amendment), "Presentation of Financial Statements": Non-current Liabilities with Covenants (continued)

Such covenants affect whether the right exists at the end of the reporting period, even if compliance with the covenant is assessed only after the reporting date (e.g. a covenant based on the entity's financial position at the reporting date that is assessed for compliance only after the reporting date).

DSAK-IAI also specifies that the right to defer settlement of a liability for at least twelve months after the reporting date is not affected if an entity only has to comply with a covenant after the reporting period. However, if the entity's right to defer settlement of a liability is subject to the entity complying with covenants within twelve months after the reporting period, an entity discloses information that enables users of financial statements to understand the risk of the liabilities becoming repayable within twelve months after the reporting period. This would include information about the covenants (including the nature of the covenants and when the entity is required to comply with them), the carrying amount of related liabilities and facts and circumstances, if any, that indicate that the entity may have difficulties complying with the covenants.

- PSAK 207 (Amendment), "Statements of Cash Flows" and PSAK 107 (Amendment), "Financial Instruments: Disclosures": Supplier Finance Arrangements

The amendments add a disclosure objective to PSAK 207 stating that an entity is required to disclose information about its supplier finance arrangements that enables users of financial statements to assess the effects of those arrangements on the entity's liabilities and cash flows. In addition, PSAK 107 is amended to add supplier finance arrangements as an example within the requirements to disclose information about an entity's exposure to concentration of liquidity risk.

2. PENERAPAN STANDAR BARU DAN REVISI (lanjutan)

b. Amendemen/Penyesuaian Standar yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan (lanjutan)

- PSAK 207 (Amendemen), "Laporan Arus Kas" dan PSAK 107 (Amendemen), "Instrumen Keuangan: Pengungkapan": Pengaturan Pembiayaan Pemasok (lanjutan)

Amendemen tersebut berisi ketentuan transisi khusus untuk periode pelaporan tahunan pertama di mana Grup menerapkan amendemen tersebut. Berdasarkan ketentuan transisi, suatu entitas tidak diharuskan untuk mengungkapkan:

- informasi komparatif untuk setiap periode pelaporan yang disajikan sebelum awal periode pelaporan tahunan di mana entitas pertama kali menerapkan amendemen tersebut.
- informasi yang diwajibkan oleh PSAK 207:44H(b)(ii)-(iii) pada awal periode pelaporan tahunan di mana entitas pertama kali menerapkan amendemen tersebut.
- PSAK 116 (Amendemen), "Sewa": Liabilitas Sewa dalam Jual dan Sewa-Balik

Amendemen PSAK 116 menambahkan persyaratan pengukuran selanjutnya untuk transaksi jual dan sewa-balik yang memenuhi persyaratan dalam PSAK 115 Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan untuk dicatat sebagai penjualan. Amendemen tersebut mengharuskan penjual-penyewa untuk menentukan 'pembayaran sewa' atau 'pembayaran sewa yang direvisi' sehingga penjual-penyewa tidak mengakui keuntungan atau kerugian yang terkait dengan hak penggunaan yang dimiliki oleh penjual-penyewa, setelah tanggal dimulainya.

Amendemen tersebut tidak memengaruhi keuntungan atau kerugian yang diakui oleh penjual-penyewa terkait dengan penghentian sebagian atau seluruh sewa.

2. ADOPTION OF NEW AND REVISED STANDARDS (continued)

b. Amendments/Improvements to Standards Effective in the Current Year (continued)

- PSAK 207 (Amendment), "Statements of Cash Flows" and PSAK 107 (Amendment), "Financial Instruments: Disclosures": Supplier Finance Arrangements (continued)

The amendments contain specific transition provisions for the first annual reporting period in which the Group applies the amendments. Under the transitional provisions an entity is not required to disclose:

- comparative information for any reporting periods presented before the beginning of the annual reporting period in which the entity first applies those amendments.
- the information otherwise required by PSAK 207:44H(b)(ii)-(iii) as at the beginning of the annual reporting period in which the entity first applies those amendments.
- PSAK 116 (Amendment), "Leases": Lease Liability in a Sale and Leaseback

The amendments to PSAK 116 add subsequent measurement requirements for sale and leaseback transactions that satisfy the requirements in PSAK 115 Revenue from Contracts with Customers to be accounted for as a sale. The amendments require the seller-lessee to determine 'lease payments' or 'revised lease payments' such that the seller-lessee does not recognize a gain or loss that relates to the right of use retained by the seller-lessee, after the commencement date.

The amendments do not affect the gain or loss recognized by the seller-lessee relating to the partial or full termination of a lease.

2. PENERAPAN STANDAR BARU DAN REVISI (lanjutan)

b. Amendemen/Penyesuaian Standar yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan (lanjutan)

- PSAK 116 (Amendemen), "Sewa": Liabilitas Sewa dalam Jual dan Sewa-Balik (lanjutan)

Tanpa persyaratan baru ini, penjual-penyewa bisa mengakui keuntungan atas hak penggunaan yang dimilikinya semata-mata karena pengukuran ulang liabilitas sewa (misalnya, setelah modifikasi sewa atau perubahan jangka waktu sewa) dengan menerapkan persyaratan umum dalam PSAK 116. Hal ini khususnya dapat terjadi dalam sewa-balik yang mencakup pembayaran sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau suku bunga.

Sebagai bagian dari amendemen, DSAK-IAI mengubah Contoh Ilustrasi dalam PSAK 116 dan menambahkan contoh baru untuk mengilustrasikan pengukuran selanjutnya atas aset hak-guna dan liabilitas sewa dalam transaksi jual dan sewa-balik dengan pembayaran sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau suku bunga. Contoh ilustrasi tersebut juga mengklarifikasi bahwa liabilitas yang timbul dari transaksi jual dan sewa-balik yang memenuhi syarat sebagai penjualan dengan menerapkan PSAK 115 adalah liabilitas sewa.

Penjual-penyewa menerapkan amendemen secara retrospektif sesuai dengan PSAK 208 terhadap transaksi jual dan sewa-balik yang dilakukan setelah tanggal penerapan awal, yang didefinisikan sebagai awal periode pelaporan tahunan di mana entitas pertama kali menerapkan PSAK 116.

c. Standar dan Amendemen/Penyesuaian Standar Telah Diterbitkan tapi Belum Diterapkan

Pada tanggal persetujuan laporan keuangan konsolidasian, standar dan amendemen-amendemen atas PSAK, yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif, dengan penerapan dini diijinkan, adalah sebagai berikut:

Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2025

- PSAK 117 "Kontrak Asuransi"
- PSAK 117 (Amendemen), "Kontrak Asuransi", Penerapan Awal PSAK 117 dan PSAK 109- Informasi Komparatif

2. ADOPTION OF NEW AND REVISED STANDARDS (continued)

b. Amendments/Improvements to Standards Effective in the Current Year (continued)

- PSAK 116 (Amendment), "Leases": Lease Liability in a Sale and Leaseback (continued)

Without these new requirements, a seller-lessee may have recognized a gain on the right of use it retains solely because of a remeasurement of the lease liability (for example, following a lease modification or change in the lease term) applying the general requirements in PSAK 116. This could have been particularly the case in a leaseback that includes variable lease payments that do not depend on an index or rate.

As part of the amendments, the DSAK-IAI amended an Illustrative Example in PSAK 116 and added a new example to illustrate the subsequent measurement of a right-of-use asset and lease liability in a sale and leaseback transaction with variable lease payments that do not depend on an index or rate. The illustrative examples also clarify that the liability that arises from a sale and leaseback transaction that qualifies as a sale applying PSAK 115 is a lease liability.

A seller-lessee applies the amendments retrospectively in accordance with PSAK 208 to sale and leaseback transactions entered into after the date of initial application, which is defined as the beginning of the annual reporting period in which the entity first applied PSAK 116.

c. Standards and Amendments/Improvements to Standards Issued not yet Adopted

At the date of authorization of these consolidated financial statements, the following standards and amendments to PSAK, were issued but not effective, with early application permitted:

Effective for periods beginning on or after January 1, 2025

- PSAK 117 "Insurance Contracts"
- PSAK 117 (Amendment), "Insurance Contracts", Initial Application of PSAK 117 and PSAK 109 - Comparative Information

PT PAM MINERAL TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. PENERAPAN STANDAR BARU DAN REVISI (lanjutan)

c. Standar dan Amendemen/Penyesuaian Standar Telah Diterbitkan tapi Belum Diterapkan (lanjutan)

Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2025 (lanjutan)

- PSAK 221 (Amendemen), "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing": Kekurangan Ketertukaran"

Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2026

- Amendemen PSAK 109, "Instrumen Keuangan" dan PSAK 107, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan": Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan
- Penyesuaian Tahunan 2024 terhadap PSAK 107, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan", PSAK 109, "Instrumen Keuangan", PSAK 110, "Laporan Keuangan Konsolidasian" dan PSAK 207, "Laporan Arus Kas"

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, dampak dari penerapan standar dan amendemen tersebut terhadap laporan keuangan konsolidasian tidak dapat diketahui atau diestimasi oleh manajemen.

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

a. Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian Grup disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK"), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI") serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah selaras dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, kecuali bagi penerapan beberapa SAK yang telah direvisi. Seperti diungkapkan dalam Catatan 2, beberapa standar akuntansi yang telah direvisi dan diterbitkan, diterapkan efektif tanggal 1 Januari 2024.

PT PAM MINERAL TBK AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. ADOPTION OF NEW AND REVISED STANDARDS (continued)

c. Standards and Amendments/Improvements to Standards Issued not yet Adopted (continued)

Effective for periods beginning on or after January 1, 2025 (continued)

- PSAK 221 (Amendment), "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates": Lack of Exchangeability

Effective for periods beginning on or after January 1, 2026

- Amendments to PSAK 109, "Financial Instruments" and PSAK 107, "Financial Instruments: Disclosures": Classification and Measurement of Financial Instruments
- 2024 Annual Improvements to PSAK 107, "Financial Instruments: Disclosures", PSAK 109, "Financial Instruments", PSAK 110, "Consolidated Financial Statements" and PSAK 207, "Statement of Cash Flows"

As at the issuance date of the consolidated financial statements, the effects of adopting these standard and amendments on the consolidated financial statements are not known nor reasonably estimable by management.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION

a. Basis of Preparation and Presentation of Consolidated Financial Statements

The consolidated financial statements of the Group have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK"), which comprise the Statement of Financial Accounting Standards ("PSAK") and Interpretations of Statement of Financial Accounting Standard ("ISAK") issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants ("DSAK-IAI") and regulations of capital market regulator for entities under its control.

The accounting policies adopted in the preparation of the consolidated financial statements are consistent with those made in the preparation of the Group's consolidated financial statements for the year ended December 31, 2023, except for the adoption of several amended SAKs. As disclosed in Note 2, several amended and published accounting standards were adopted effective January 1, 2024.

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

a. Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian (lanjutan)

Grup telah menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan dasar bahwa Grup akan terus mempertahankan kelangsungan usaha.

Laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian, disusun berdasarkan dasar akrual dengan menggunakan konsep harga perolehan, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Grup.

b. Klasifikasi Lancar/Jangka Pendek dan Tidak Lancar/Jangka Panjang

Grup menyajikan aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian berdasarkan klasifikasi lancar/tidak lancar atau jangka pendek/jangka panjang.

Suatu aset disajikan lancar bila:

- i) akan direalisasi, dijual atau digunakan dalam siklus operasi normal,
- ii) untuk diperdagangkan,
- iii) akan direalisasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau kas atau setara kas kecuali yang dibatasi penggunaannya atau akan digunakan untuk melunasi suatu liabilitas dalam paling lambat 12 bulan setelah periode pelaporan.

Seluruh aset lain diklasifikasikan sebagai tidak lancar.

Suatu liabilitas disajikan sebagai jangka pendek bila:

- i) akan dilunasi dalam siklus operasi normal,
- ii) untuk diperdagangkan,
- iii) akan dilunasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau
- iv) tidak ada hak tanpa syarat untuk menangguhkan pelunasannya selama paling tidak 12 bulan setelah periode pelaporan.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

a. Basis of Preparation and Presentation of Consolidated Financial Statements (continued)

The Group has prepared the consolidated financial statements on the basis that it will continue to operate as a going concern.

The consolidated financial statements, except for the consolidated statement of cash flows, have been prepared on the accrual basis using the historical cost basis of accounting, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies for those accounts.

The consolidated statement of cash flows is prepared based on the direct method by classifying cash flows on the basis of operating, investing, and financing activities.

The presentation currency used in the preparation of the consolidated financial statements is the Indonesian Rupiah, which is the Group's functional currency.

b. Current and Non-current Classification

The Group presents assets and liabilities in the statement of financial position based on current/non-current classification.

An asset is current when it is:

- i) expected to be realized or intended to be sold or consumed in the normal operating cycle,*
- ii) held primarily for the purpose of trading,*
- iii) expected to be realized within 12 months after the reporting period, or cash or cash equivalent unless restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least 12 months after the reporting period.*

All other assets are classified as non-current.

A liability is current when it is:

- i) expected to be settled in the normal operating cycle,*
- ii) held primarily for the purpose of trading,*
- iii) due to be settled within 12 months after the reporting period, or*
- iv) there is no unconditional right to defer the settlement of the liability for at least 12 months after the reporting period.*

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

b. Klasifikasi Lancar/Jangka Pendek dan Tidak Lancar/Jangka Panjang (lanjutan)

Seluruh liabilitas lain diklasifikasikan sebagai jangka panjang.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar dan liabilitas jangka panjang.

c. Prinsip-prinsip Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan dan entitas-entitas yang dikendalikan secara langsung ataupun tidak langsung oleh Perusahaan.

Secara spesifik, Grup mengendalikan *investee* jika dan hanya jika Grup memiliki seluruh hal berikut ini:

- a. Kekuasaan atas *investee* (misal, hak yang ada memberikan kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan *investee*).
- b. Eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*.
- c. Kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil investor.

Grup menilai kembali apakah investor mengendalikan *investee* jika fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian.

Ketika Grup memiliki kurang dari hak suara mayoritas, Grup dapat mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang relevan dalam menilai apakah memiliki kekuasaan atas *investee* tersebut:

- a. Pengaturan kontraktual dengan pemilik hak suara yang lain.
- b. Hak yang timbul dari pengaturan kontraktual lain.
- c. Hak suara dan hak suara potensial Perusahaan.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

b. Current and Non-current Classification (continued)

All other liabilities are classified as non-current.

Deferred tax assets and liabilities are classified as non-current assets and liabilities.

c. Principles of Consolidation

The consolidated financial statements incorporate the financial statements of the Company and entities in which the Company has the ability to directly or indirectly exercise control.

Specifically, the Group controls an investee if and only if the Group has:

- a. *Power over the investee (i.e., existing rights that give it the current ability to direct the relevant activities of the investee).*
- b. *Exposure, or rights, to variable returns from its involvement with the investee, and*
- c. *The ability to use its power over the investee to affect its returns.*

The Group re-assesses whether or not it controls an investee if facts and circumstances indicate that there are changes to one or more of the three elements of control.

When the Group has less than a majority of the voting or similar right of an investee, the Group considers all relevant facts and circumstances in assessing whether it has power over an investee, including:

- a. *The contractual arrangement with the other vote holders of the investee.*
- b. *Rights arising from other contractual arrangements.*
- c. *The Group's voting rights and potential voting rights.*

PT PAM MINERAL TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

c. Prinsip-prinsip Konsolidasi (lanjutan)

Konsolidasi atas entitas anak dimulai ketika Grup memiliki pengendalian atas entitas anak dan berhenti ketika Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak. Aset, liabilitas, penghasilan dan beban atas entitas anak yang diakuisisi atau dilepas selama periode termasuk dalam laporan keuangan konsolidasi dari tanggal Grup memperoleh pengendalian sampai dengan tanggal Grup menghentikan pengendalian atas entitas anak.

Laporan keuangan entitas anak disusun dengan periode pelaporan yang sama dengan Perusahaan. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan konsolidasian telah diterapkan secara konsisten oleh Grup, kecuali dinyatakan lain.

Semua aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban dan arus kas berkaitan dengan transaksi antar anggota Grup juga akan dieliminasi secara penuh dalam proses konsolidasi.

Kepentingan nonpengendali mencerminkan bagian atas laba atau rugi dan aset neto dari entitas anak yang tidak dapat diatribusikan, secara langsung maupun tidak langsung, pada Perusahaan, yang masing-masing disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan dalam ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari bagian yang dapat diatribusikan kepada pemilik Perusahaan.

Kepentingan nonpengendali pada awalnya dapat diukur sebesar nilai wajar atau bagian proporsional kepentingan nonpengendali atas nilai wajar aset neto teridentifikasi pihak yang diakuisisi. Pilihan pengukuran dibuat untuk masing-masing akuisisi. Kepentingan nonpengendali lain awalnya diukur sebesar nilai wajar. Setelah akuisisi, jumlah tercatat kepentingan nonpengendali adalah jumlah kepentingan tersebut pada pengakuan awal ditambah bagian kepentingan nonpengendali dari perubahan selanjutnya di ekuitas.

Laba atau rugi dan setiap komponen atas penghasilan komprehensif lain diatribusikan pada pemegang saham entitas induk Perusahaan dan pada kepentingan nonpengendali, walaupun hasil di kepentingan nonpengendali mempunyai saldo defisit.

PT PAM MINERAL TBK AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY
INFORMATION (continued)

c. Principles of Consolidation (continued)

Consolidation of a subsidiary begins when the Group obtains control over the subsidiary and ceases when the Group loses control of the subsidiary. Assets, liabilities, income and expenses of a subsidiary acquired or disposed of during the period are included in the consolidated financial statements from the date the Group gains control until the date the Group ceases to control the subsidiary.

The financial statements of the subsidiary are prepared for the same reporting period as the Company. The accounting policies adopted in preparing the consolidated financial statements have been consistently applied by the Group, unless otherwise stated.

All intra-group assets and liabilities, equity, income, expenses and cash flows relating to transactions between members of the Group are eliminated in full on consolidation.

Non-controlling interest ("NCI") represents the portion of the profit or loss and net assets of the subsidiary not attributable directly or indirectly to the Company, which are presented in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income and under the equity section of the consolidated statement of financial position, respectively, separately from the corresponding portion attributable to the owners of the Company.

Non-controlling interest may initially be measured at fair value or at the non-controlling interest proportionate share of the fair value of the acquiree's identifiable net assets. The choice of measurement is made on an acquisition-by-acquisition basis. Other non-controlling interest are initially measured at fair value. Subsequent to acquisition, the carrying amount of non-controlling interest is the amount of those interests at initial recognition plus the non-controlling interest' share of subsequent changes in equity.

Profit or loss and each component of other comprehensive income are attributed to the equity holders of the Company and to the non-controlling interest, even if this results in the NCI having a deficit balance.

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Prinsip-prinsip Konsolidasi (lanjutan)

Perubahan kepemilikan pada entitas anak, tanpa kehilangan pengendalian, dihitung sebagai transaksi ekuitas. Jumlah tercatat dari kepemilikan Grup dan kepentingan nonpengendali disesuaikan untuk mencerminkan perubahan kepentingan relatifnya dalam entitas anak. Selisih antara jumlah tercatat kepentingan nonpengendali yang disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang dibayar atau diterima diakui secara langsung dalam ekuitas dan diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

Jika Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak, maka Grup:

- a. menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap *goodwill*) dan liabilitas entitas anak;
- b. menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap kepentingan nonpengendali;
- c. menghentikan pengakuan akumulasi selisih penjabaran, yang dicatat di ekuitas, bila ada;
- d. mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima;
- e. mengakui setiap sisa investasi pada nilai wajarnya;
- f. mengakui setiap perbedaan yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian sebagai laba rugi; dan
- g. mereklasifikasi ke laba rugi proporsi keuntungan dan kerugian yang telah diakui sebelumnya dalam penghasilan komprehensif lain atau saldo laba, begitu pula menjadi persyaratan jika Grup akan melepas secara langsung aset atau liabilitas yang terkait.

Nilai wajar setiap sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada tanggal hilangnya pengendalian dianggap sebagai nilai wajar pada saat pengakuan awal untuk perlakuan akuntansi berikutnya dalam PSAK 109, "Instrumen Keuangan", ketika berlaku, biaya perolehan pada saat pengakuan awal dari investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

c. Principles of Consolidation (continued)

A change in the ownership interest of a subsidiary, without a loss of control, is accounted for as an equity transaction. The carrying amounts of the Group's interest and the non-controlling interest are adjusted to reflect the changes in their relative interests in the subsidiary. Any difference between the amount by which the non-controlling interest are adjusted and the fair value of the consideration paid or received is recognized directly in equity and attributed to the owners of the Company.

If the Group loses control over a subsidiary, it:

- a. *derecognizes the assets (including goodwill) and liabilities of the subsidiary;*
- b. *derecognizes the carrying amount of any non-controlling interest;*
- c. *derecognizes the cumulative translation differences, recorded in equity, if any;*
- d. *recognizes the fair value of the consideration received;*
- e. *recognizes the fair value of any investment retained;*
- f. *recognizes any surplus or deficit in profit or loss; and*
- g. *reclassifies the parent's share of components previously recognized in other comprehensive income to profit or loss or retained earnings, as appropriate, as would be required if the Group had directly disposed of the related assets or liabilities.*

The fair value of any investment retained in the former subsidiary at the date when control is lost is regarded as the fair value on initial recognition for subsequent accounting under PSAK 109, "Financial Instruments", when applicable, the cost on initial recognition of an investment in an associate or a joint venture.

PT PAM MINERAL TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

d. Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali

Kombinasi bisnis antara entitas sepengendali diperlakukan sesuai dengan PSAK 338. Berdasarkan PSAK 338, transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali, berupa pengalihan bisnis yang dilakukan dalam rangka reorganisasi entitas-entitas yang berada di dalam suatu Grup yang sama, bukan merupakan perubahan kepemilikan dalam arti substansi ekonomi, sehingga transaksi tersebut tidak menimbulkan laba atau rugi bagi Grup secara keseluruhan ataupun bagi entitas individu dalam Grup tersebut.

Kombinasi bisnis sepengendali dicatat dengan menggunakan metode penyatuan kepemilikan.

Metode penyatuan kepemilikan diterapkan seolah-olah entitas-entitas tersebut telah bergabung sejak periode dimana entitas yang bergabung berada dalam sepengendalian. Selisih antara imbalan yang dialihkan dan nilai tercatat aset neto pihak yang diakuisisi disajikan dalam "tambahan modal disetor" dan tidak direklasifikasi ke laba rugi atau direklasifikasi ke saldo laba ketika pengendalian hilang.

e. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing dan Translasi Saldo

Transaksi dalam mata uang asing dicatat dalam Rupiah berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada setiap akhir periode pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan sesuai dengan rata-rata kurs jual dan beli yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tanggal transaksi perbankan terakhir untuk periode yang bersangkutan, dan laba atau rugi kurs yang timbul, dikreditkan atau dibebankan pada operasi periode yang bersangkutan.

Kurs yang digunakan untuk menjabarkan ke mata uang Rupiah, mata uang penyajian Grup, pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, adalah sebagai berikut:

	2024
1 Dolar Amerika Serikat ("ASD")	16.162

Tidak ada transaksi dalam mata uang asing selain ASD.

PT PAM MINERAL TBK AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY
INFORMATION (continued)

d. Business Combination of Entities Under Common Control

Business combination involving entities under common control is accounted in accordance with PSAK 338. Under this PSAK, business combination of entities under common control transactions, such as transfers of business conducted within the framework of the reorganization of the entities that are in the same group, is not a change of ownership in terms of economic substance, hence, the transaction does not result in a gain or loss for the Group as a whole or for individual entities within the Group.

Business combinations under common control are accounted for using the pooling-of-interests method.

The pooling-of-interest method is applied as if the entities had been combined from the period when the merging entities were placed under common control. The difference between the consideration transferred and the book value of the net assets of the acquiree is presented under "additional paid-in capital" and is not recycled to profit or loss nor reclassified to retained earnings when control is lost.

e. Foreign Currency Transactions and Balances Translation

Transactions involving foreign currencies are recorded in Indonesian Rupiah at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At the end of each of the reporting period, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to reflect the average of the selling and buying rates of exchange prevailing at the last banking transaction date of the period, as published by Bank Indonesia, and any resulting gains or losses are credited or charged to operations of the current period.

The exchange rates used for translation into Rupiah, the Group's presentation currency, as at December 31, 2024 and 2023 are as follows:

	2024	2023	
1 Dolar Amerika Serikat ("ASD")	16.162	15.416	1 United States Dollar ("USD")

There are no transactions in foreign currencies other than USD.

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

f. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Grup:

- a. Orang atau anggota keluarga dekatnya yang mempunyai relasi dengan Grup jika orang tersebut:
 - (i) memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas Grup;
 - (ii) memiliki pengaruh signifikan atas Grup; atau
 - (iii) personil manajemen kunci Grup atau entitas induk Grup.
- b. Suatu entitas berelasi dengan Grup jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - (i) entitas dan Grup adalah anggota dari grup yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lainnya).
 - (ii) satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain atau entitas asosiasi (atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu grup, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - (iii) kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - (iv) satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
 - (v) entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari Grup atau entitas yang terkait dengan Grup.
 - (vi) entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf a).
 - (vii) orang yang diidentifikasi dalam huruf a.(i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
 - (viii) entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada Grup atau kepada entitas induk dari Grup.
 - (ix) entitas yang merupakan entitas anak dari entitas asosiasi atau ventura bersama dari Grup.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY
INFORMATION (continued)

f. Transactions with Related Parties

A related party is a person or entity that is related to the Group:

- a. *A person or a close member of that person's family is related to the Group if that person:*
 - (i) has control or joint control over the Group;*
 - (ii) has significant influence over the Group; or*
 - (iii) is a member of the key management personnel of the Group or of a parent of the Group.*
- b. *An entity is related to the Group if any of the following conditions applies:*
 - (i) the entity and the Group are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).*
 - (ii) one entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member).*
 - (iii) both entities are joint ventures of the same third party.*
 - (iv) one entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.*
 - (v) the entity is a post-employment defined benefit plan for the benefit of employees of either the Group or an entity related to the Group.*
 - (vi) the entity is controlled or jointly controlled by a person identified in a).*
 - (vii) a person identified in a.(i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity).*
 - (viii) the entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the Group or to the parent of the Group.*
 - (ix) an entity which is a subsidiary of an associate or joint venture of the Group.*

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

f. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi (lanjutan)

Transaksi signifikan yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sama dengan pihak ketiga maupun tidak, diungkapkan pada laporan keuangan konsolidasian.

g. Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian pada saat Grup menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen tersebut.

Klasifikasi

i. Aset keuangan

Aset keuangan diklasifikasikan pada saat pengakuan awal dan selanjutnya diukur pada (i) biaya perolehan diamortisasi, (ii) nilai wajar melalui laba rugi ("FVTPL"), dan (iii) nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ("FVTOCI").

Grup mengukur aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut dipenuhi:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan pada tanggal tertentu meningkatkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga ("SPPI") dari jumlah pokok terutang.

Agar dapat diklasifikasikan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau FVTOCI, aset keuangan harus memiliki arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang. Pengujian ini dikenal sebagai SPPI testing dan dilakukan pada tingkat instrumen.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

f. Transactions with Related Parties (continued)

Significant transactions with related parties, whether or not made at similar terms and conditions as those done with third parties, are disclosed in the consolidated financial statements.

g. Financial Instruments

Financial assets and financial liabilities are recognized on the consolidated statement of financial position when the Group becomes a party to the contractual provisions of the instrument.

Classification

i. Financial assets

Financial assets are classified, at initial recognition, and subsequently measured at (i) amortized cost, (ii) fair value through profit or loss (FVTPL), or (iii) fair value through other comprehensive income (FVTOCI).

The Group measures financial assets at amortized cost if both of the following conditions are met:

- *The financial asset is held within a business model with the objective to hold financial assets in order to collect contractual cash flows; and*
- *The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest (SPPI) on the principal amount outstanding.*

In order for a financial asset to be classified and measured at amortized cost or FVTOCI, it needs to give rise to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding. This assessment is referred to as SPPI testing and it is performed at instrument level.

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

g. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Klasifikasi (lanjutan)

i. Aset keuangan (lanjutan)

Model bisnis Grup dalam mengelola aset keuangan mengacu kepada bagaimana Grup mengelola aset keuangan untuk menghasilkan arus kas. Model bisnis menentukan apakah arus kas akan dihasilkan dari memperoleh arus kas kontraktual, menjual aset keuangan atau keduanya.

Aset keuangan Grup terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha, piutang non-usaha dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya yang diklasifikasikan sebagai aset yang diukur dengan biaya diamortisasi. Grup tidak memiliki aset keuangan yang diukur pada FVTPL and FVTOCI.

ii. Liabilitas keuangan

Grup mengklasifikasikan liabilitas keuangannya pada pengakuan awal sebagai (i) liabilitas keuangan diukur pada FVTPL atau (ii) liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Liabilitas keuangan Grup terdiri dari utang usaha, utang non-usaha, biaya yang masih harus dibayar, liabilitas sewa, dan utang sewa pembiayaan konsumen diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi. Grup tidak memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL.

Pengakuan dan pengukuran

Aset keuangan, kecuali piutang usaha yang diukur sesuai harga transaksi, dan liabilitas keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajar. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan dan liabilitas keuangan ditambahkan atau dikurangkan dari nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan, jika diperlukan, pada pengakuan awal.

3. MATERIAL ACCOUNTING
INFORMATION (continued)

g. Financial Instruments (continued)

Classification (continued)

i. Financial assets (continued)

The Group's business model for managing financial assets refers to how it manages its financial assets in order to generate cash flows. The business model determines whether cash flows will result from collecting contractual cash flows, selling the financial assets, or both.

The Group's financial assets consist of cash and cash equivalents, trade receivables, non-trade receivables and restricted time deposits classified as financial assets at amortized cost. The Group has no financial assets measured at FVTPL and FVTOCI.

ii. Financial liabilities

The Group classifies its financial liabilities, at initial recognition, as: (i) financial liabilities at FVTPL or (ii) financial liabilities measured at amortized cost.

The Group's financial liabilities consist of trade payables, non-trade payables, accrued expenses, lease liability, and consumer financing payables classified as financial liabilities at amortized cost. The Group has no financial liabilities measured at FVTPL.

Recognition and measurement

Financial assets, except for trade receivables which are measured at transaction price, and financial liabilities are initially measured at fair value. Transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue of financial assets and financial liabilities are added to or deducted from the fair value of the financial assets and financial liabilities, as appropriate, on initial recognition.

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

g. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan pengukuran (lanjutan)

i. Aset keuangan

Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian yang lazim) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Grup berkomitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut.

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi setelah pengakuan awal diukur menggunakan metode suku bunga efektif dan merupakan subjek penurunan nilai. Keuntungan dan kerugian diakui pada laba rugi saat aset dihentikan pengakuannya, dimodifikasi atau mengalami penurunan nilai.

ii. Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan yang bukan merupakan 1) imbalan kontingen dari pihak pengakuisisi dalam kombinasi bisnis, 2) dimiliki untuk diperdagangkan, atau 3) ditetapkan sebagai FVTPL, selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan biaya bunga selama periode yang relevan.

Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas masa depan selama perkiraan umur dari aset atau liabilitas keuangan dengan jumlah tercatat bruto aset keuangan atau biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas keuangan. Pada saat menghitung suku bunga efektif, entitas mengestimasi arus kas ekspektasian dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dari instrumen keuangan tersebut (sebagai contoh, percepatan pelunasan, perpanjangan, opsi beli dan opsi-opsi serupa), tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit ekspektasian. Perhitungan mencakup seluruh fee (imbalan) dan komisi yang dibayarkan atau diterima oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premium atau diskonto lainnya.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

g. Financial Instruments (continued)

Recognition and measurement (continued)

i. Financial assets

Purchases or sales of financial assets that require delivery of assets within a time frame established by regulation or convention in the marketplace (regular way trades) are recognized on the trade date, i.e., the date that the Group commits to buy or sell the asset.

Financial assets at amortized cost are subsequently measured using the effective interest method and are subject to impairment. Gains and losses are recognized in profit or loss when the asset is derecognized, modified or impaired.

ii. Financial liabilities

Financial liabilities that are not 1) contingent consideration of an acquirer in a business combination, 2) held-for-trading, or 3) designated as at FVTPL, are subsequently measured at amortized cost using the effective interest method.

Effective interest method

Effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial liability and of allocating interest expense over the relevant period.

The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial asset or financial liability to the gross carrying amount of a financial asset or to the amortized cost of a financial liability. When calculating the effective interest rate, an entity shall estimate the expected cash flows by considering all the contractual terms of the financial instrument (for example, prepayment, extension, call and similar options) but shall not consider the expected credit losses. The calculation includes all fees and points paid or received between parties to the contract that are an integral part of the effective interest rate, transaction costs, and all other premiums or discounts.

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

g. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Saling hapus dari instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan dengan menggunakan dasar neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

Hak saling hapus harus ada pada saat ini dan tidak bersifat kontingen atas terjadinya suatu peristiwa di masa depan dan harus dapat dieksekusi oleh pihak lawan, baik dalam situasi bisnis normal dan dalam peristiwa gagal bayar, peristiwa kepailitan atau kebangkrutan.

Penurunan nilai aset keuangan

Grup mengakui cadangan untuk kerugian kredit ekspektasian ("ECL") atas aset tetap diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Pengukuran kerugian kredit ekspektasian merupakan fungsi dari *probability of default*, *loss given default* (yaitu besarnya kerugian jika terjadi gagal bayar) dan eksposur pada gagal bayar. Penilaian *probability of default* dan *loss given default* berdasarkan data historis yang disesuaikan dengan informasi masa depan. Adapun eksposur atas gagal bayar, untuk aset keuangan, diwakili oleh nilai tercatat bruto aset pada tanggal pelaporan; untuk kontrak jaminan keuangan, eksposur mencakup jumlah yang ditarik pada tanggal pelaporan, ditambah dengan jumlah yang diperkirakan akan ditarik di masa depan sebelum tanggal gagal bayar yang ditentukan berdasarkan tren historis, pemahaman Grup mengenai kebutuhan pembiayaan masa depan yang spesifik dari debiturnya, dan informasi perkiraan masa depan lainnya yang relevan.

ECL didasarkan pada perbedaan antara arus kas kontraktual yang tertuang dalam kontrak dan seluruh arus kas yang diharapkan akan diterima Grup, didiskontokan menggunakan suku bunga efektif awal. Arus kas yang diharapkan akan diterima tersebut mencakup arus kas dari penjualan agunan yang dimiliki atau perluasan perbaikan risiko-kredit lainnya yang merupakan bagian integral dari persyaratan kontrak.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY
INFORMATION (continued)

g. Financial Instruments (continued)

Offsetting of financial instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the consolidated statement of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

A right to offset must be available today rather than being contingent on a future event and must be exercisable by any of the counterparties, both in the normal course of business and in the event of default, insolvency or bankruptcy.

Impairment of financial assets

The Group recognizes an allowance for expected credit losses ("ECL") on financial assets that are measured at amortized cost.

The measurement of expected credit losses is a function of the probability of default, loss given default (i.e. the magnitude of the loss if there is a default) and the exposure at default. The assessment of the probability of default and loss given default is based on historical data adjusted by forward-looking information. As for the exposure at default, for financial assets, this is represented by the assets' gross carrying amount at the reporting date; for financial guarantee contracts, the exposure includes the amount drawn down as at the reporting date, together with any additional amounts expected to be drawn down in the future by default date determined based on historical trend, the Group's understanding of the specific future financing needs of the debtors, and other relevant forward-looking information.

ECL are based on the difference between the contractual cash flows due in accordance with the contract and all the cash flows that the Group expects to receive, discounted at an approximation of the original effective interest rate. The expected cash flows will include cash flows from the sale of collateral held or other credit enhancements that are integral to the contractual terms.

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

g. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

ECL diakui dalam dua tahap. Untuk risiko kredit atas instrumen keuangan yang tidak mengalami peningkatan secara signifikan sejak pengakuan awal, ECL dilakukan untuk kerugian kredit yang diakibatkan oleh peristiwa gagal bayar yang mungkin terjadi dalam 12 bulan ke depan (ECL 12 bulan). Untuk risiko kredit atas instrumen keuangan yang mengalami peningkatan secara signifikan sejak pengakuan awal, penyisihan kerugian dilakukan sepanjang sisa umurnya, terlepas dari waktu terjadinya gagal bayar (ECL sepanjang umurnya).

Karena piutang usaha dan aset kontrak tidak memiliki komponen pembiayaan signifikan, Grup menerapkan pendekatan yang disederhanakan dalam perhitungan ECL. Oleh karena itu, Grup tidak menelusuri perubahan dalam risiko kredit, namun justru mengakui penyisihan kerugian berdasarkan ECL sepanjang umurnya pada setiap tanggal pelaporan. Grup membentuk matriks provisi berdasarkan pengalaman kerugian kredit masa lampau, disesuaikan dengan perkiraan masa depan (*forward-looking*) atas faktor yang spesifik untuk debitur dan lingkungan ekonomi.

Peningkatan risiko kredit secara signifikan

Dalam menilai apakah risiko kredit pada instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, Grup membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada instrumen keuangan pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi pada instrumen keuangan pada tanggal pengakuan awal. Dalam melakukan penilaian, Grup mempertimbangkan baik informasi kuantitatif maupun kualitatif yang wajar dan mendukung, termasuk pengalaman historis dan informasi bersifat perkiraan masa depan, yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan. Informasi masa depan yang dipertimbangkan mencakup prospek masa depan industri di mana debitur Grup beroperasi, yang diperoleh dari laporan ahli ekonomi, analisis keuangan, badan pemerintah, lembaga terkait, dan organisasi serupa lainnya, serta pertimbangan berbagai sumber eksternal aktual dan prakiraan informasi ekonomi yang terkait dengan operasi inti Grup.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY
INFORMATION (continued)

g. Financial Instruments (continued)

Impairment of financial assets (continued)

ECL are recognized in two stages. For credit exposures for which there has not been a significant increase in credit risk since initial recognition, ECL are provided for credit losses that result from default events that are possible within the next 12-months (a 12-month ECL). For those credit exposures for which there has been a significant increase in credit risk since initial recognition, a loss allowance is required for credit losses expected over the remaining life of the exposure, irrespective of the timing of the default (a lifetime ECL).

Because its trade receivables and contract assets do not contain significant financing component, the Group applies a simplified approach in calculating ECL. Therefore, the Group does not track changes in credit risk, but instead recognizes a loss allowance based on lifetime ECL at each reporting date. The Group established a provision matrix that is based on its historical credit loss experience, adjusted for forward-looking factors specific to the debtors and the economic environment.

Significant increase in credit risk

In assessing whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition, the Group compares the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition. In making this assessment, the Group considers both quantitative and qualitative information that is reasonable and supportable, including historical experience and forward-looking information that is available without undue cost or effort. Forward-looking information considered includes the future prospects of the industries in which the Group's debtors operate, obtained from economic expert reports, financial analysts, governmental bodies, relevant think-tanks and other similar organizations, as well as consideration of various external sources of actual and forecast economic information that relate to the Group's operations.

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

g. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Peningkatan risiko kredit secara signifikan (lanjutan)

Secara khusus, informasi berikut diperhitungkan ketika menilai apakah risiko kredit telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal: (a) indikasi pihak peminjam atau kelompok pihak peminjam mengalami kesulitan keuangan signifikan, (b) wanprestasi atau tunggakan pembayaran bunga atau pokok, (c) kemungkinan bahwa mereka akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya dan (d) di mana data yang dapat diobservasi mengindikasikan bahwa ada terukur penurunan arus kas estimasi masa mendatang, seperti perubahan tunggakan atau kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan wanprestasi.

Definisi gagal bayar

Grup menganggap hal-hal berikut ini merupakan peristiwa gagal bayar untuk tujuan manajemen risiko kredit internal karena pengalaman historis menunjukkan bahwa aset keuangan yang memenuhi salah satu kriteria berikut umumnya tidak dapat dipulihkan:

- ketika terdapat pelanggaran persyaratan keuangan oleh debitur; atau
- informasi yang dikembangkan secara internal atau diperoleh dari sumber eksternal menunjukkan bahwa debitur kemungkinan tidak akan membayar kreditornya, termasuk Grup, secara penuh (tanpa memperhitungkan jaminan yang dimiliki oleh Grup).

Terlepas dari analisis di atas, Grup menganggap bahwa gagal bayar telah terjadi ketika aset keuangan tertunggak lebih dari 90 hari kecuali jika Grup memiliki informasi yang wajar dan didukung untuk menunjukkan bahwa kriteria yang lebih panjang lebih tepat.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

g. Financial Instruments (continued)

Significant increase in credit risk (continued)

In particular, the following information is taken into account when assessing whether credit risk has increased significantly since initial recognition: (a) indications that the debtors or a group of debtors is experiencing significant financial difficulty, (b) default or delinquency in interest or principal payments, (c) the probability that they will enter bankruptcy or other financial reorganization and (d) where observable data indicate that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows, such as changes in arrears or economic conditions that correlate with defaults.

Definition of default

The Group considers the following as constituting an event of default for internal credit risk management purposes as historical experience indicates that financial assets that meet either of the following criteria are generally not recoverable:

- *when there is a breach of financial covenants by the debtor; or*
- *information developed internally or obtained from external sources indicates that the debtor is unlikely to pay its creditors, including the Group, in full (without taking into account any collateral held by the Group).*

Irrespective of the above analysis, the Group considers that default has occurred when a financial asset is more than 90 days past due unless the Group has reasonable and supportable information to demonstrate that a more lagging default criterion is more appropriate.

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

g. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset keuangan memburuk

Aset keuangan mengalami penurunan nilai kredit ketika satu atau lebih peristiwa yang memiliki dampak buruk pada estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan tersebut telah terjadi. Bukti bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai termasuk data yang dapat diobservasi tentang peristiwa berikut:

- kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau peminjam;
- pelanggaran kontrak, seperti peristiwa gagal bayar atau tunggakan;
- pihak pemberi pinjaman, untuk alasan ekonomik atau kontraktual sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, telah memberikan konsesi pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
- terjadi kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
- hilangnya pasar aktif untuk aset keuangan itu akibat kesulitan keuangan; atau
- pembelian atau penerbitan aset keuangan dengan diskon sangat besar yang mencerminkan kerugian kredit yang terjadi.

Kebijakan penghapusan

Grup menghapuskan aset keuangan ketika ada informasi yang menunjukkan bahwa pihak lawan berada dalam kesulitan keuangan yang buruk dan tidak ada prospek pemulihan yang realistis, contoh ketika pihak lawan dalam proses likuidasi atau telah memasuki proses kebangkrutan, atau untuk hal piutang usaha, ketika jumlahnya sudah lebih dari 120 hari tertunggak, mana yang terjadi lebih dulu. Aset keuangan yang dihapuskan dapat menjadi subjek aktivitas penagihan dalam prosedur pemulihan Grup, dengan mempertimbangkan nasihat hukum yang sesuai. Setiap pemulihan yang terjadi diakui dalam laba rugi.

Grup mengakui keuntungan atau kerugian penurunan nilai dalam laba rugi untuk semua instrumen keuangan dengan penyesuaian terkait ke jumlah tercatat melalui akun cadangan kerugian dan tidak mengurangi nilai tercatat aset keuangan pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

g. Financial Instruments (continued)

Credit-impaired financial assets

A financial asset is credit-impaired when one or more events that have a detrimental impact on the estimated future cash flows of that financial asset have occurred. Evidence that a financial asset is credit-impaired includes observable data about the following events:

- *significant financial difficulty of the issuer or the borrower;*
- *a breach of contract, such as a default or past due event;*
- *the lender(s) of the borrower, for economic or contractual reasons relating to the borrower's financial difficulty, having granted to the borrower a concession(s) that the lender(s) would not otherwise consider;*
- *it is becoming probable that the borrower will enter bankruptcy or other financial reorganization;*
- *the disappearance of an active market for that financial asset because of financial difficulties; or*
- *the purchase or origination of a financial asset at a deep discount that reflects the incurred credit losses.*

Write-off policy

The Group writes off a financial asset when there is information indicating that the counterparty is in severe financial difficulty and there is no realistic prospect of recovery, e.g. when the counterparty has been placed under liquidation or has entered into bankruptcy proceedings, or in the case of trade accounts receivable, when the amounts are over 120 days past due, whichever occurs sooner. Financial assets written off may still be subject to enforcement activities under the Group's recovery procedures, taking into account legal advice where appropriate. Any recoveries made are recognized in profit or loss.

The Group recognizes an impairment gain or loss in profit or loss for all financial instruments with a corresponding adjustment to their carrying amount through a loss allowance account and does not reduce the carrying amount of the financial asset in the consolidated statement of financial position.

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

g. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penghentian pengakuan

i Aset keuangan

Suatu aset keuangan, atau mana yang berlaku, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan sejenis, dihentikan pengakuannya pada saat:

- hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
- Grup mengalihkan hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau menanggung kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tanpa penundaan yang material kepada pihak ketiga melalui suatu kesepakatan penyerahan dan (i) secara substansial mengalihkan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, atau (ii) secara substansial tidak mengalihkan dan tidak mempertahankan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, namun telah mengalihkan pengendalian atas aset keuangan tersebut.

Ketika Grup telah mengalihkan hak untuk menerima arus kas dari suatu aset atau telah menandatangani kesepakatan pelepasan (*pass-through arrangement*), dan secara substansial tidak mengalihkan dan tidak mempertahankan seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, maupun tidak mengalihkan pengendalian atas aset, aset tersebut diakui sejauh keterlibatan berkelanjutan Grup terhadap aset keuangan tersebut.

Keterlibatan berkelanjutan yang berbentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer diukur sebesar jumlah terendah dari jumlah tercatat aset dan jumlah maksimal dari pembayaran yang diterima yang mungkin harus dibayar kembali. Dalam hal ini, Grup juga mengakui liabilitas terkait. Aset yang dialihkan dan liabilitas terkait diukur dengan dasar yang mencerminkan hak dan liabilitas yang masih dipertahankan Grup.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

g. Financial Instruments (continued)

Derecognition

i Financial assets

A financial asset, or where applicable a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets, is derecognized when:

- the contractual rights to receive cash flows from the financial asset have expired; or
- the Group has transferred its contractual rights to receive cash flows from the financial asset or has assumed an obligation to pay them in full without material delay to a third party under a "pass-through" arrangement and either (i) has transferred substantially all the risks and rewards of the financial asset, or (ii) has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the financial asset, but has transferred control of the financial asset.

When the Group has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a pass-through arrangement, and has neither transferred nor retained substantially all of the risks and rewards of the asset nor transferred control of the asset, the asset is recognized to the extent of the Group's continuing involvement in the asset.

Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration that the Group could be required to repay. In that case, the Group also recognizes an associated liability. The transferred asset and the associated liability are measured on a basis that reflects the rights and obligations that the Group has retained.

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

g. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penghentian pengakuan (lanjutan)

i Aset keuangan (lanjutan)

Pada penghentian pengakuan aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, perbedaan antara nilai tercatat aset dan jumlah imbalan yang diterima dan piutang diakui dalam laba rugi.

ii Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

Ketika liabilitas keuangan saat ini digantikan dengan yang lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, atau modifikasi secara substansial atas ketentuan liabilitas keuangan yang saat ini ada, maka pertukaran atau modifikasi tersebut dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru.

Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang dihentikan pengakuannya dan imbalan yang dibayarkan dan utang diakui dalam laba rugi.

h. Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima dari menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:

- i. di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut; atau
- ii. jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut

Grup harus memiliki akses ke pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan.

Nilai wajar aset atau liabilitas diukur menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaiknya.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

g. Financial Instruments (continued)

Derecognition (continued)

i Financial assets (continued)

On derecognition of a financial asset measured at amortized cost, the difference between the asset's carrying amount and the sum of the consideration received and receivable is recognized in profit or loss.

ii Financial liabilities

A financial liability is derecognized when the obligation specified in the contract is discharged or cancelled or expired.

When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as a derecognition of the original liability and the recognition of a new liability.

The difference between the carrying amount of the financial liability derecognized and the consideration paid and payable is recognized in profit or loss.

h. Fair Value Measurement

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:

- i. *in the principal market for the asset or liability; or*
- ii. *in the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.*

The principal or the most advantageous market must be accessible to the Group.

The fair value of an assets and liabilities is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their best economic interest.

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

h. Pengukuran Nilai Wajar (lanjutan)

Pengukuran nilai wajar aset nonkeuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomik dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya, atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

Grup menggunakan teknik penilaian yang sesuai dalam keadaan dan dimana data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Seluruh aset dan liabilitas, baik yang diukur pada nilai wajar, atau dimana nilai wajar aset atau liabilitas tersebut diungkapkan, dikategorikan dalam hirarki nilai wajar, berdasarkan tingkat input terendah yang signifikan terhadap keseluruhan pengukuran, sebagai berikut:

- i. Level 1 - Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik.
- ii. Level 2 - Teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar dapat diobservasi, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- iii. Level 3 - Teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar tidak dapat diobservasi.

Untuk aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar secara berulang dalam laporan keuangan konsolidasian, maka Grup menentukan apakah telah terjadi perpindahan di antara level hirarki nilai wajar dengan cara menilai kembali pengkategorian tingkat nilai wajar pada setiap akhir periode pelaporan.

i. Kas dan Setara Kas

Dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, kas dan setara kas terdiri dari kas, bank, dan deposito jangka pendek yang dapat segera dikonversikan menjadi kas dalam jumlah yang dapat yang ditentukan dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan dan tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman serta tidak dibatasi penggunaannya.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

h. Fair Value Measurement (continued)

A fair value measurement of a non-financial asset takes into account a market participant's ability to generate economic benefits by using the asset in its highest and best use or by selling it to another market participants that would use the asset in its highest and best use.

The Group uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximizing the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are categorized within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is significant to fair value measurement as a whole:

- i. Level 1 - Quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities.*
- ii. Level 2 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable.*
- iii. Level 3 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable*

For assets and liabilities that are recognized in the consolidated financial statements on a recurring basis, the Group determines whether transfers have occurred between levels in the hierarchy by reassessing categorization at the end of each reporting period.

i. Cash and Cash Equivalents

In the consolidated statement of financial position, cash and cash equivalents include cash on hand, cash in bank, and short-term deposits that are readily convertible to known amounts of cash, are neither pledged as collateral nor restricted in use and are subject to an insignificant risk of changes in value.

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

i. Kas dan Setara Kas (lanjutan)

Saldo bank yang penggunaannya oleh Grup tunduk pada pembatasan kontrak pihak ketiga dimasukkan sebagai bagian dari kas kecuali pembatasan tersebut mengakibatkan saldo bank tidak lagi memenuhi definisi kas. Jika pembatasan kontraktual untuk penggunaan kas melebihi 12 bulan setelah akhir periode pelaporan, maka jumlah terkait diklasifikasikan sebagai tidak lancar dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

j. Persediaan

Persediaan bijih nikel disajikan berdasarkan nilai terendah antara harga perolehan atau nilai realisasi neto. Harga perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang yang mencakup biaya penambangan, biaya tenaga kerja langsung, biaya langsung lainnya dan alokasi bagian biaya tidak langsung variabel dan tetap yang berkaitan dengan kegiatan penambangan. Nilai realisasi neto adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan.

Grup menetapkan penyisihan untuk nilai realisasi neto persediaan berdasarkan hasil penelaahan berkala atas kondisi fisik dan nilai realisasi neto persediaan.

k. Uang Muka

Uang muka dicatat pada saat terjadinya.

l. Aset Tetap

Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai, kecuali untuk tanah yang tidak disusutkan. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap pada saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Demikian pula, pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu diakui ke dalam jumlah tercatat aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya perbaikan dan pemeliharaan lainnya yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi pada saat terjadinya.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

i. Cash and Cash Equivalents (continued)

Bank balances for which use by the Group is subject to third party contractual restrictions are included as part of cash unless the restrictions result in a bank balance no longer meeting the definition of cash. If the contractual restrictions to use the cash extend beyond 12 months after the end of the reporting period, the related amounts are classified as non-current in the consolidated statement of financial position.

j. Inventories

Nickel ore inventories are presented at the lower of cost or net realizable value. Cost is determined using the weighted average method which includes mining costs, direct labor costs, other direct costs and an allocation of the share of fixed and variable indirect costs related to mining activities. Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business, less the estimated costs of completion and the estimated costs necessary to make the sale.

The Group provides allowance for net realizable value of inventories based on periodic reviews of the physical conditions and net realizable values of the inventories.

k. Advances

Advances are recorded as incurred.

l. Fixed Assets

Fixed Assets are stated at cost less accumulated depreciation and any impairment loss, except for land which is not depreciated. Such cost includes the cost of replacing part of the fixed assets the cost is incurred, if the recognition criteria are met. Likewise, when a major inspection is performed, its cost is recognized in the carrying amount of the assets as a replacement if the recognition criteria are met. All other repairs and maintenance costs that do not meet the recognition criteria are recognized in profit or loss as incurred.

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

I. Aset Tetap (lanjutan)

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap, sebagai berikut:

	Tahun/Years
Alat berat dan kendaraan	4 - 8
Dermaga	8 - 20
Bangunan	10
Mesin	8
Peralatan kantor	4 - 8
Jalan	8

Nilai residu, estimasi masa manfaat dan metode penyusutan direviu dan disesuaikan, setiap akhir tahun, bila diperlukan.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaannya. Ketika aset tetap dijual atau dihentikan, biaya perolehan, beban akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai dieliminasi dari akun. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset diakui dalam laporan laba rugi pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

m. Aset Takberwujud

Aset takberwujud yang diperoleh secara terpisah pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan. Setelah pengakuan awal, aset takberwujud dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada.

Aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas diamortisasi selama masa manfaat ekonomis dan menguji penurunan nilai apabila terdapat indikasi aset takberwujud mengalami penurunan nilai.

Periode amortisasi dan metode amortisasi untuk aset takberwujud dengan umur manfaat yang terbatas ditinjau setidaknya pada setiap akhir periode pelaporan. Perubahan pada perkiraan umur manfaat atau perkiraan pola konsumsi manfaat ekonomi terjadi pada aset tersebut dicatat dengan mengubah periode amortisasi atau metode, yang sesuai, dan diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi. Beban amortisasi aset takberwujud dengan masa manfaat terbatas diakui dalam laporan laba rugi dalam kategori biaya yang konsisten dengan fungsi dari aset takberwujud.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY
INFORMATION (continued)

I. Fixed Assets (continued)

Depreciation is computed using the straight-line method over the estimated useful lives of the assets as follows:

<i>Heavy equipment and vehicles</i>
<i>Jetty</i>
<i>Building</i>
<i>Machineries</i>
<i>Office equipment</i>
<i>Road</i>

The residual values, estimated useful lives, and depreciation method are reviewed and adjusted, at year end, if necessary.

The carrying value of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use. When property, plant and equipment are sold or retired, the cost, accumulated depreciation and any impairment losses are eliminated from the accounts. Any gain or loss arising on derecognition of the assets is charged to profit or loss in the year the assets is derecognized.

m. Intangible Assets

Other intangible assets acquired separately are measured on initial recognition at cost. Following initial recognition, other intangible assets are carried at cost less any accumulated amortization and accumulated impairment losses, if any.

Intangible assets with finite lives are amortized over the useful economic life and assessed for impairment whenever there is an indication that the intangible asset may be impaired.

The amortization period and the amortization method for an intangible asset with a finite useful life is reviewed at least at the end of each reporting period. Changes in the expected useful life or the expected pattern of consumption of future economic benefits embodied in the asset is accounted for by changing the amortization period or method, as appropriate, and are treated as changes in accounting estimates. The amortization expense on intangible assets with finite lives is recognized in profit or loss in the expense category consistent with the function of the intangible assets.

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

m. Aset Takberwujud (lanjutan)

Suatu aset takberwujud dihentikan pengakuannya saat pelepasan, atau ketika tidak terdapat ekspektasi manfaat ekonomi masa depan dari penggunaan atau pelepasan. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset takberwujud ditentukan sebagai selisih antara hasil neto pelepasan dan jumlah tercatat aset dan diakui dalam laporan laba rugi ketika aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Piranti lunak

Biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh lisensi piranti lunak komputer dan mempersiapkan piranti lunak tersebut sehingga siap untuk digunakan dikapitalisasi.

Amortisasi dihitung dengan menggunakan metode garis lurus selama umur manfaat ekonomis aset takberwujud sebagai berikut:

	<u>Tahun/Years</u>
Piranti lunak	4

n. Aset Eksplorasi dan Evaluasi

Aktivitas eksplorasi dan evaluasi meliputi pencarian sumber daya mineral setelah Grup memperoleh hak hukum untuk mengeksplorasi suatu wilayah tertentu, penentuan kelayakan teknis dan penilaian komersial atas sumber daya mineral teridentifikasi.

Pengeluaran eksplorasi dan evaluasi meliputi biaya yang berhubungan langsung dengan:

- Perolehan hak untuk eksplorasi;
- Kajian topografi, geologi, geokimia dan geofisika;
- Pengeboran eksplorasi;
- Pamaritan dan pengambilan contoh; dan
- Aktivitas yang terkait dengan evaluasi kelayakan teknis dan komersial atas penambangan sumber daya mineral.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

m. Intangible Assets (continued)

An intangible asset is derecognized on disposal, or when no future economic benefits are expected from use or disposal. Gains or losses arising from derecognition of an intangible asset are measured as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset and are recognized in profit or loss when the asset is derecognized.

Software

Acquired computer software licenses are capitalized on the basis of the costs incurred to acquire and bring to use the specific software.

Amortization is computed using the straight-line method over the estimated useful lives of the intangible asset as follows:

	<u>Tahun/Years</u>
Software	4

n. Exploration and Evaluation Assets

Exploration and evaluation activities include searching for mineral resources after the Group has obtained the legal right to explore a specific area, determining the technical feasibility and commercial viability of identified mineral resources.

Exploration and evaluation expenditures include costs that are directly related to:

- *Obtaining rights to explore;*
- *Topographical, geological, geochemical and geophysical studies;*
- *Exploratory drilling;*
- *Trenching and sampling; and*
- *Activities involved in evaluating the technical feasibility and commercial viability of extracting mineral resources.*

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

n. Aset Eksplorasi dan Evaluasi (lanjutan)

Biaya eksplorasi dan evaluasi yang berhubungan dengan suatu *area of interest* dibebankan pada saat terjadinya kecuali biaya tersebut dikapitalisasi dan ditangguhkan, berdasarkan *area of interest*, apabila memenuhi salah satu dari ketentuan berikut ini:

- terdapat hak untuk mengeksplorasi dan mengevaluasi suatu area dan biaya tersebut diharapkan dapat diperoleh kembali melalui keberhasilan pengembangan dan eksploitasi di *area of interest* tersebut atau melalui penjualan atas *area of interest* tersebut; atau
- kegiatan eksplorasi dalam *area of interest* tersebut belum mencapai tahap yang memungkinkan penentuan adanya cadangan terbukti yang secara ekonomis dapat diperoleh, serta kegiatan yang aktif dan signifikan dalam atau berhubungan dengan *area of interest* tersebut masih berlanjut.

Biaya yang dikapitalisasi mencakup biaya-biaya yang berkaitan langsung dengan aktivitas eksplorasi dan evaluasi pada *area of interest* yang relevan, tidak termasuk aset berwujud yang dicatat sebagai aset tetap. Biaya umum dan administrasi dialokasikan sebagai aset eksplorasi atau evaluasi hanya jika biaya tersebut berkaitan langsung dengan aktivitas operasional pada *area of interest* yang relevan.

Pengeluaran eksplorasi dan evaluasi yang dikapitalisasi dihapusbukukan ketika kondisi tersebut di atas tidak lagi terpenuhi.

Aset eksplorasi dan evaluasi teridentifikasi yang diperoleh dalam suatu kombinasi bisnis pada awalnya diakui sebagai aset pada nilai wajar pada saat akuisisi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan dikurangi kerugian penurunan nilai. Pengeluaran eksplorasi dan evaluasi yang terjadi setelah perolehan aset eksplorasi dalam suatu kombinasi bisnis dicatat dengan mengacu pada kebijakan akuntansi di atas.

Oleh karena aset eksplorasi dan evaluasi tidak tersedia untuk digunakan, maka aset tersebut tidak disusutkan.

Aset eksplorasi dan evaluasi diuji penurunan nilainya ketika fakta dan kondisi mengindikasikan adanya penurunan nilai. Aset eksplorasi dan evaluasi juga diuji penurunan nilainya ketika terjadi penemuan cadangan komersial, sebelum aset tersebut ditransfer ke "properti pertambangan-tambang dalam pengembangan".

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

n. Exploration and Evaluation Assets (continued)

Exploration and evaluation expenditure related to an area of interest is written off as incurred, unless it is capitalised and carried forward, on an area of interest basis, provided that one of the following conditions is met:

- *the tenure rights of an area are current and it is considered probable that the costs will be recouped through the successful development and exploitation of the area of interest or, alternatively, through its sale; or*
- *exploration activities in the area of interest have not yet reached a stage which permits a reasonable assessment of the existence or otherwise of economically recoverable reserves and active and significant operations in or in relation to the area of interest are ongoing.*

Capitalized costs include costs directly related to exploration and evaluation activities in the relevant area of interest, and exclude physical assets which are recorded in fixed assets. General and administrative costs are allocated to exploration or evaluation assets only to the extent that those costs can be related directly to operational activities in the relevant area of interest.

Capitalized exploration and evaluation expenditure is written off where the above conditions are no longer satisfied.

Identifiable exploration and evaluation assets acquired in a business combination are recognised initially as assets at fair value upon acquisition, and subsequently at cost less impairment charges. Exploration and evaluation expenditure incurred subsequent to the acquisition of an exploration asset in a business combination is accounted for in accordance with the policy outlined above.

As the exploration and evaluation assets are not available for use, they are not depreciated.

Exploration and evaluation assets are assessed for impairment if facts and circumstances indicate that impairment may exist. Exploration and evaluation assets are also tested for impairment once commercial reserves are found, before the assets are transferred to "mining properties - mines under development".

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

n. Aset Eksplorasi dan Evaluasi (lanjutan)

Pengeluaran yang terjadi sebelum entitas memperoleh hak hukum untuk mengeksplorasi suatu area spesifik dibiayakan pada saat terjadinya.

Aset eksplorasi dan evaluasi diuji penurunan nilainya ketika fakta dan kondisi mengindikasikan adanya penurunan nilai. Aset eksplorasi dan evaluasi juga diuji penurunan nilainya ketika terjadi penemuan cadangan komersial, sebelum aset tersebut ditransfer ke "properti pertambangan - tambang dalam pengembangan".

Pengeluaran yang terjadi sebelum Grup memperoleh hak hukum untuk mengeksplorasi suatu area spesifik dibiayakan pada saat terjadinya.

o. Properti Pertambangan

Biaya pengembangan yang dikeluarkan oleh atau atas nama Grup diakumulasikan secara terpisah untuk setiap *area of interest* pada saat cadangan terpulihkan yang secara ekonomis dapat diidentifikasi. Biaya tersebut termasuk biaya yang dapat diatribusikan secara langsung pada konstruksi tambang dan infrastruktur terkait, tidak termasuk biaya aset berwujud dan hak atas tanah (seperti hak-guna bangunan, hak-guna usaha, dan hak pakai) yang dicatat sebagai aset tetap.

Ketika keputusan pengembangan telah diambil, jumlah tercatat aset eksplorasi dan evaluasi pada *area of interest* tertentu dipindahkan sebagai "pertambangan yang sedang dikembangkan" pada akun properti pertambangan dan digabung dengan pengeluaran biaya pengembangan selanjutnya.

"Tambang dalam pengembangan" direklasifikasi ke "tambang yang memproduksi" pada akun properti pertambangan pada akhir tahap *commissioning*, ketika tambang tersebut mampu beroperasi sesuai maksud manajemen.

"Tambang dalam pengembangan" tidak disusutkan sampai direklasifikasi menjadi "tambang yang memproduksi".

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

n. Exploration and Evaluation Assets (continued)

Expenditure incurred before the entity has obtained the legal right to explore a specific area is expensed as incurred.

Exploration and evaluation assets are tested for impairment when facts and circumstances indicate that they are impaired. Exploration and evaluation assets are also tested for impairment when commercial reserves are discovered, before they are transferred to "mining properties - mines under development".

Expenditures incurred before the Group obtains the legal right to explore a specific area are expensed at the time they occur.

o. Mining Properties

Development costs incurred by or on behalf of the Group are accumulated separately for each area of interest when the economically recoverable reserves are identified. These costs include costs that are directly attributable to the construction of the mine and related infrastructure, excluding costs for tangible assets and land rights (such as rights to build, right to cultivate and use rights) which are recorded as fixed assets.

When the development decision has been made, the carrying amount of exploration and evaluation assets in a particular area of interest is transferred as "mining under development" to the mining property account and is combined with subsequent development costs incurred.

"Mine under development" is reclassified to "mine in production" on the mining property account at the end of the commissioning phase, when the mine is capable of operating as intended by management.

"Mining under development" is not depreciated until it is reclassified as "mine in production".

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

o. Properti Pertambangan (lanjutan)

Ketika timbul biaya pengembangan lebih lanjut atas properti pertambangan setelah dimulainya produksi, maka biaya tersebut akan dicatat sebagai bagian dari "pertambangan yang berproduksi" apabila terdapat kemungkinan besar tambahan manfaat ekonomi masa depan sehubungan dengan biaya tersebut akan mengalir ke Grup. Apabila tidak, biaya tersebut dibebankan sebagai biaya produksi.

"Tambang yang berproduksi" (termasuk biaya eksplorasi, evaluasi dan pengembangan, serta pembayaran untuk memperoleh hak penambangan dan sewa) diamortisasi dengan menggunakan metode unit produksi berdasarkan cadangan terbukti dan cadangan terduga, dengan perhitungan terpisah yang dibuat untuk setiap *area of interest*.

Properti pertambangan teridentifikasi yang diperoleh melalui suatu kombinasi bisnis pada awalnya diakui sebagai aset sebesar nilai wajarnya. Pengeluaran pengembangan yang terjadi sebagai akuisisi properti pertambangan dicatat berdasarkan kebijakan akuntansi yang dijelaskan di atas.

"Tambang dalam pengembangan" dan "tambang yang berproduksi" diuji penurunan nilainya dengan mengacu pada kebijakan akuntansi pada Catatan 3p.

p. Penurunan Nilai Aset Non-keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian penurunan nilai aset (yaitu aset takberwujud dengan umur manfaat tidak terbatas, aset takberwujud yang belum dapat digunakan, atau *goodwill* yang diperoleh dalam suatu kombinasi bisnis), maka Grup membuat estimasi jumlah terpulihkan aset tersebut.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

o. Mining Properties (continued)

When further development costs are incurred on mining properties after the commencement of production, they will be recorded as part of "mine in production" when it is probable that additional future economic benefits associated with those costs will flow to the Group. If not, these costs are charged as production costs.

"Mine in production" (including exploration, evaluation and development costs, as well as payments for obtaining mining rights and leases) is amortized using the unit of production method based on proven and probable reserves, with separate calculations made for each area of interest.

Identifiable mining properties acquired in a business combination are recognized initially as assets at fair value. Development expenditures incurred as the acquisition of mining properties are accounted for in accordance with the accounting policies described above.

"Mines under development" and "mines in production" are tested for impairment in accordance with the policy described in Note 3p.

p. Impairment of Non-financial Assets

The Group assesses at each reporting period whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, or when annual impairment testing for an asset is required (i.e. an intangible asset with an indefinite useful life, an intangible asset not yet available for use, or goodwill acquired in a business combination), the Group makes an estimate of the asset's recoverable amount.

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

p. Penurunan Nilai Aset Non-keuangan
(lanjutan)

Jumlah terpulihkan suatu aset adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau unit penghasil kas dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya, dan ditentukan untuk aset individual, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang Sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain. Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset atau unit penghasil kas tersebut mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai terpulihkannya dan rugi penurunan nilai segera diakui dalam laba rugi, kecuali aset tersebut disajikan pada jumlah revaluasi, di mana kerugian penurunan nilai diperlakukan sebagai penurunan revaluasi.

Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar terkini atas nilai waktu dari uang dan risiko spesifik dari aset. Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan harga penawaran pasar terakhir, jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, Grup menggunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini dikuatkan oleh penilaian berganda atau indikasi nilai wajar yang tersedia.

Penilaian dilakukan pada akhir setiap periode pelaporan tahunan apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain *goodwill* mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka Grup mengestimasi jumlah terpulihkan aset atau unit penghasil kas tersebut.

Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain *goodwill* dibalik hanya jika terdapat perubahan estimasi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Dalam hal ini, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun jumlah tercatat, neto setelah penyusutan atau amortisasi, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada tahun-tahun sebelumnya.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY
INFORMATION (continued)

p. Impairment of Non-financial Assets
(continued)

An asset's recoverable amount is the higher of the asset's or cash-generating unit's fair value less costs to sell and its value in use, and is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or groups of assets. Where the carrying amount of an asset or cash-generating unit exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount and an impairment loss is recognized immediately in profit or loss, unless the relevant asset is carried at revalued amount, in which the impairment loss is treated as a revaluation decrease.

In assessing the value in use, the estimated net future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. In determining fair value less costs to sell, recent market transactions are taken into account, if available. If no such transactions can be identified, an appropriate valuation model is used to determine the fair value of the assets. These calculations are corroborated by valuation multiples or other available fair value indicators.

An assessment is made at each annual reporting period as to whether there is any indication that previously recognized impairment losses recognized for an asset other than goodwill may no longer exist or may have decreased. If such indication exists, the Group estimates the asset's or cash generating unit's recoverable amount.

A previously recognized impairment loss for an asset other than goodwill is reversed only if there has been a change in the estimates used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognized. If that is the case, the carrying amount of the asset is increased to its recoverable amount. The reversal is limited so that the carrying amount of the asset does not exceed its recoverable amount, nor exceeds the carrying amount that would have been determined, net of depreciation or amortization, had no impairment loss been recognized for the asset in prior years.

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

p. Penurunan Nilai Aset Non-keuangan
(lanjutan)

Pembalikan rugi penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, kecuali aset yang bersangkutan disajikan pada jumlah revaluasi, dalam hal ini pembalikan kerugian penurunan nilai diperlakukan sebagai kenaikan revaluasi. Setelah pembalikan tersebut, penyusutan atau amortisasi aset tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar terkini atas nilai waktu dari uang dan risiko spesifik dari aset. Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan harga penawaran pasar terakhir, jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, Grup menggunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini dikuatkan oleh penilaian berganda atau indikasi nilai wajar yang tersedia.

Penilaian dilakukan pada akhir setiap periode pelaporan tahunan apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain *goodwill* mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka Grup mengestimasi jumlah terpulihkan aset atau unit penghasil kas tersebut.

Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain *goodwill* dibalik hanya jika terdapat perubahan estimasi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Dalam hal ini, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun jumlah tercatat, neto setelah penyusutan atau amortisasi, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada tahun-tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, kecuali aset yang bersangkutan disajikan pada jumlah revaluasi, dalam hal ini pembalikan kerugian penurunan nilai diperlakukan sebagai kenaikan revaluasi.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY
INFORMATION (continued)

p. Impairment of Non-financial Assets
(continued)

Reversal of an impairment loss is recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, unless the relevant asset is carried at a revalued amount, in which case the reversal of the impairment loss is treated as a revaluation increase. After such a reversal, the depreciation or amortization charge on the said asset is adjusted in future periods to allocate the asset's revised carrying amount, less any residual value, on a systematic basis over its remaining useful life.

In assessing the value in use, the estimated net future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. In determining fair value less costs to sell, recent market transactions are taken into account, if available. If no such transactions can be identified, an appropriate valuation model is used to determine the fair value of the assets. These calculations are corroborated by valuation multiples or other available fair value indicators.

An assessment is made at each annual reporting period as to whether there is any indication that previously recognized impairment losses recognized for an asset other than *goodwill* may no longer exist or may have decreased. If such indication exists, the Group estimates the asset's or cash generating unit's recoverable amount.

A previously recognized impairment loss for an asset other than *goodwill* is reversed only if there has been a change in the estimates used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognized. If that is the case, the carrying amount of the asset is increased to its recoverable amount. The reversal is limited so that the carrying amount of the asset does not exceed its recoverable amount, nor exceeds the carrying amount that would have been determined, net of depreciation or amortization, had no impairment loss been recognized for the asset in prior years. Reversal of an impairment loss is recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, unless the relevant asset is carried at a revalued amount, in which case the reversal of the impairment loss is treated as a revaluation increase.

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

p. Penurunan Nilai Aset Non-keuangan (lanjutan)

Pembalikan tersebut, penyusutan atau amortisasi aset tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

q. Provisi dan Kontinjensi

Provisi diakui ketika Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, kemungkinan besar Grup diharuskan menyelesaikan kewajiban dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat

Jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan, dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian yang meliputi kewajibannya. Apabila suatu provisi diukur menggunakan arus kas yang diperkirakan untuk menyelesaikan kewajiban kini, maka nilai tercatatnya adalah nilai kini dari arus kas (ketika pengaruh nilai waktu uang bersifat material).

Tingkat diskonto yang digunakan untuk menentukan nilai kini adalah tingkat sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar saat ini atas nilai waktu uang dan risiko spesifik terhadap liabilitas. Peningkatan provisi karena berlalunya waktu diakui sebagai beban bunga.

Ketika beberapa atau seluruh manfaat ekonomi untuk penyelesaian provisi yang diharapkan dapat dipulihkan dari pihak ketiga, piutang diakui sebagai aset apabila terdapat kepastian bahwa penggantian akan diterima dan jumlah piutang dapat diukur secara andal.

Aset dan liabilitas kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan konsolidasian. Liabilitas kontinjensi diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian, kecuali kemungkinan arus keluar sumber daya yang mewujudkan manfaat ekonomi bersifat kecil. Aset kontinjensi diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian di mana kemungkinan besar terjadi arus masuk manfaat ekonomi.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

p. Impairment of Non-financial Assets (continued)

After such a reversal, the depreciation or amortization charge on the said asset is adjusted in future periods to allocate the asset's revised carrying amount, less any residual value, on a systematic basis over its remaining useful life.

q. Provisions and Contingencies

Provisions are recognized when the Group has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it is probable that the Group will be required to settle the obligations, and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

The amount recognized as a provisions is the best estimate of the consideration required to settle the present obligation at the end of the reporting period, taking into account the risks and uncertainties surrounding the obligation. Where a provision is measured using the cash flows estimated to settle the present obligation, its carrying amount is the present value of those cash flows (when the effect of time value of money is material).

The discount rate used to determine the present value is a pre-tax rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the liability. The increase in the provision due to the passage of time is recognized as interest expense.

When some or all of the economic benefits required to settle a provision are expected to be recovered from a third party, a receivable is recognized as asset if it is virtually certain that reimbursement will be received and the amount of the receivable can be measured reliably.

Contingent assets and liabilities are not recognized in the consolidated financial statements. Contingent liabilities are disclosed in the consolidated financial statements, unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefits is remote. Contingent assets are disclosed in the consolidated financial statements where inflow of economic benefits is probable.

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

q. Provisi dan Kontinjensi (lanjutan)

Provisi pembongkaran, rehabilitasi, reklamasi dan penutupan tambang

Reklamasi, rehabilitasi, dan biaya lingkungan yang berkaitan dengan pemulihan atas area yang terganggu selama tahap produksi dibebankan pada beban pokok pendapatan pada saat kewajiban dari pemulihan atas area yang terganggu tersebut timbul selama penambangan.

Kewajiban ini diakui sebagai liabilitas pada saat timbulnya kewajiban hukum atau konstruktif yang berasal dari aktivitas yang telah dilaksanakan. Kewajiban ini diukur pada saat dan setelah pengakuan sebesar nilai kini dari perkiraan pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak, yang mencerminkan penilaian pasar kini atas nilai waktu uang dan risiko yang terkait dengan kewajiban tersebut. Perubahan pada pengukuran kewajiban yang timbul selama tahap produksi juga dibebankan ke beban pokok pendapatan, sementara peningkatan kewajiban yang sehubungan dengan berlalunya waktu diakui sebagai biaya keuangan.

Provisi pembongkaran aset-aset tambang dan kegiatan pascatambang terkait beserta peninggalan dan pembongkaran aset-aset berumur panjang dibentuk sehubungan dengan kewajiban hukum berkaitan dengan penarikan aset tambang terkait dan aset berumur panjang lainnya termasuk pembongkaran bangunan, peralatan, fasilitas peremukan dan pengolahan, infrastruktur, dan fasilitas lainnya yang berasal dari pembelian, konstruksi atau pengembangan aset tersebut.

Kewajiban ini diakui sebagai liabilitas pada saat timbulnya kewajiban hukum atau konstruktif yang berkaitan dengan penarikan sebuah aset, dengan pengukuran pada saat dan setelah pengakuan sebesar nilai kini dari perkiraan pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak, yang mencerminkan penilaian pasar kini atas nilai waktu uang dan risiko yang terkait dengan kewajiban tersebut.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

q. Provisions and Contingencies (continued)

Provision for decommissioning, mine rehabilitation, reclamation and mine closure

Reclamation, rehabilitation and environmental expenditure to be incurred related to the remediation of disturbed areas during the production phase are charged to the cost of revenue when an obligation arising from the disturbance occurs as extraction progresses.

These obligations are recognized as liabilities when a legal or constructive obligation has arisen from activities that have already been performed. This obligation is initially and subsequently measured at the present value of the expenditure expected to be required to settle the obligation using a pre-tax rate, which reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the obligation. Changes in the measurement of a liability which arise during production are also charged to the cost of revenue, while the increase in the provision due to the passage of time is recognised as finance costs.

Provision for decommissioning of mining assets and related post-mining activities, as well as the abandonment and decommissioning of other long-lived assets, is made for the legal obligations associated with the retirement of mining related assets and other long-lived assets including the decommissioning of building, equipment, crushing and handling facilities, infrastructure and other facilities that resulted from the acquisition, construction or development of such assets.

These obligations are recognized as liabilities when a legal or constructive obligation with respect to the retirement of an asset is incurred, with initial and subsequent measurement of the obligation at the present value of the expenditure expected to be required to settle the obligation using a pre-tax rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the obligations.

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

q. Provisi dan Kontinjensi (lanjutan)

Provisi pembongkaran, rehabilitasi, reklamasi dan penutupan tambang (lanjutan)

Biaya penarikan aset dalam jumlah yang setara dengan jumlah liabilitas tersebut dikapitalisasi sebagai bagian dari suatu aset tertentu dan kemudian disusutkan atau didepleksi selama masa manfaat aset tersebut. Peningkatan kewajiban sehubungan dengan berlalunya waktu diakui dalam biaya keuangan.

Perubahan dalam pengukuran kewajiban pembongkaran yang timbul dari perubahan estimasi waktu atau jumlah pengeluaran sumber daya ekonomis (contohnya: arus kas) yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut, atau perubahan dalam tingkat diskonto, akan ditambahkan pada atau dikurangkan dari, harga perolehan aset yang bersangkutan pada tahun berjalan. Jumlah yang dikurangkan dari harga perolehan aset tidak boleh melebihi jumlah tercatatnya. Jika penurunan dalam liabilitas melebihi nilai tercatat aset, kelebihan tersebut segera diakui dalam laba rugi. Jika penyesuaian tersebut menghasilkan penambahan pada harga perolehan aset, Perusahaan akan mempertimbangkan apakah hal ini mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset yang baru mungkin tidak bisa dipulihkan secara penuh. Jika terdapat indikasi tersebut, Grup akan melakukan pengujian penurunan nilai terhadap aset tersebut dengan melakukan estimasi atas nilai yang dapat dipulihkan dan akan memperhitungkan setiap kerugian dari penurunan nilai yang terjadi.

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset Grup setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Grup dicatat sebesar hasil penerimaan netto setelah dikurangi biaya penerbitan langsung.

r. Dividen

Pembagian dividen kepada para pemegang saham Grup diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian pada periode ketika dividen tersebut disetujui oleh para pemegang saham Grup.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

q. Provisions and Contingencies (continued)

Provision for decommissioning, mine rehabilitation, reclamation and mine closure (continued)

An asset retirement cost equivalent to these liabilities is capitalized as part of the related asset's carrying amount, and is subsequently depreciated or depleted over the asset's useful life. The increase in these obligations due to the passage of the time is recognized as part of finance costs.

The changes in the measurement of decommissioning obligations that result from changes in the estimated timing or amount of the outflow of resources embodying economic benefits (e.g. cash flow) required to settle the obligations, or a change in the discount rate, will be added to or deducted from the cost of the related asset in the current year. The amount deducted from the cost of the asset should not exceed its carrying amount. If a decrease in the liability exceeds the carrying amount of the asset, the excess is recognised immediately in profit or loss. If the adjustment results in an addition to the cost of an asset, the Group's will consider whether this is an indication that the new carrying amount of the asset may not be fully recoverable. If there is any such indication, the Company will test the asset for impairment by estimating its recoverable amount and will account for any impairment losses incurred.

An equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the assets of an entity after deducting all of its liabilities. Equity instruments issued by the Group are recorded at the proceeds received, net of direct issue costs.

r. Dividends

Dividend distribution to the Group's shareholders is recognized as a liability in the consolidated financial statements in the period in which the dividends are approved by the Group's shareholders.

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

s. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan diukur berdasarkan imbalan yang Perusahaan perkiraan menjadi haknya dalam kontrak dengan pelanggan dan tidak termasuk jumlah yang ditagih atas nama pihak ketiga. Perusahaan mengakui pendapatan ketika mengalihkan pengendalian barang atau jasa kepada pelanggan.

Grup mengakui pendapatan sumber utama yaitu penjualan bijih nikel. Pendapatan dari penjualan produk diakui pada saat kewajiban pelaksanaan dipenuhi Grup pada waktu tertentu, yaitu saat pengendalian atas produk telah beralih kepada pelanggan.

Grup secara umum menjual nikel dengan syarat *Free on Board* ("FOB"), di mana Grup tidak memiliki tanggung jawab untuk pengangkutan atau asuransi setelah kontrol barang telah berlalu di pelabuhan muat. Untuk jangka waktu ini hanya ada satu kewajiban kinerja, yaitu untuk penyediaan produk pada titik di mana kontrol lewat. Selain itu juga, Grup menjual nikel dengan syarat *Cost, Insurance and Freight* ("CIF"), tetapi berdasarkan perjanjian penjualan, kepemilikan dan risiko kerugian atas nikel akan tetap berada pada Grup sampai nikel melewati Pelabuhan bongkar. Dalam kondisi ini, Grup menganggap bahwa biaya asuransi dan pengangkutan adalah satu kesatuan dengan kewajiban kinerja dengan penjualan nikel dikarenakan kontrol atas persediaan nikel berpindah ke pembeli pada saat nikel tersebut sudah sampai di lokasi pembeli.

Beban diakui pada saat terjadinya (basis akrual).

t. Laba per Saham

Jumlah laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik Perusahaan dengan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar pada periode yang bersangkutan.

Laba per saham dilusi dihitung dengan membagi laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik Perusahaan (setelah disesuaikan dengan dampak pajak penghasilan atas bunga dan biaya keuangan lainnya yang terkait dengan instrumen berpotensi saham biasa yang dilutif) dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar selama periode yang telah disesuaikan dengan dampak dari semua efek berpotensi saham biasa yang dilutif.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY
INFORMATION (continued)

s. Revenue and Expense Recognition

Revenue is measured based on the consideration to which the Company expects to be entitled in a contract with a customer and excludes amounts collected on behalf of third parties. The Company recognizes revenue when it transfers control of a product of service to a customer.

The Group recognizes revenue from sale of nickel ore. Revenue from the sale of products is recognised when the performance obligation is satisfied by the Group at the point in time when the control of products has been transferred to the customer.

The Group generally sells its nickel products on Free on Board ("FOB") terms, where the Group has no responsibility for freight or insurance once control of the goods has passed at the loading port. Under these terms, there is only one performance obligation, for the provision of product at the point where control passes. In addition, the Group also sells nickel on Cost, Insurance and Freight ("CIF") terms, but under the sales agreement, the title and risk of loss of nickel shall remain with the Group until the nickel passes the discharging port. In this condition, the Group considers that insurance and transportation costs are one and the same performance obligation with the sale of nickel because control over the nickel inventory transfers to the buyer when the nickel arrives at the buyer's location.

Expenses are recognized when incurred (accrual basis).

t. Earnings per Share

Basic earnings per share is calculated by dividing net profit for the year attributable to the Owners of the Company the weighted average number of ordinary shares outstanding during the year.

Diluted earnings per share is calculated by dividing the net profit attributable to the owners of the Company (after adjusting for the after-income tax effect of interest and other financing costs associated with dilutive potential ordinary shares) by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the year as adjusted for the effects of all dilutive potential ordinary shares.

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

u. Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan

Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek adalah imbalan kerja yang jatuh tempo dalam jangka waktu dua belas bulan setelah akhir periode pelaporan dan diakui pada saat pekerja telah memberikan jasa kerjanya. Kewajiban diakui ketika karyawan memberikan jasa kepada Grup dimana semua perubahan pada nilai bawaan dari kewajiban diakui pada laba rugi.

Hak karyawan atas cuti tahunan diakui ketika karyawan mendapat hak. Provisi dibuat untuk liabilitas cuti tahunan akibat jasa yang diserahkan oleh karyawan sampai tanggal periode pelaporan.

Imbalan pascakerja program imbalan pasti

Grup mengakui kewajiban imbalan kerja yang tidak didanai sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang No. 6 tahun 2023. Beban pensiun berdasarkan program dana pensiun manfaat pasti Grup ditentukan melalui perhitungan aktuarial secara periodik dengan menggunakan metode *projected unit credit* dan menerapkan asumsi atas tingkat diskonto dan tingkat kenaikan manfaat pasti pensiun tahunan.

Pengukuran kembali, terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, yang tercermin langsung dalam laporan posisi keuangan konsolidasian yang dibebankan atau dikreditkan diakui dalam penghasilan komprehensif lain pada periode terjadinya untuk mencerminkan liabilitas pensiun neto yang diakui pada laporan keuangan konsolidasian untuk mencerminkan nilai penuh dari defisit. Pengukuran kembali diakui sebagai pos terpisah pada penghasilan komprehensif lain di ekuitas dan tidak akan direklasifikasi ke laba rugi.

Biaya jasa lalu diakui dalam laba rugi ketika terjadi amendemen program atau kurtailmen, atau ketika Grup mengakui biaya restrukturisasi terkait atau pesangon, jika lebih dahulu.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

u. Employee Benefits Liability

Short-term employee benefits

Short term employee benefits are employee benefits which are due for payment within twelve months after the reporting period and recognized when the employees have rendered this related service. Liabilities are recognized when the employee renders services to the Group where all changes in the carrying amount of the liability are recognized in profit or loss.

Employee entitlements to annual leave are recognized when they accrue to employees. A provision is made for the estimated liability for annual leave as a result of services rendered by employees up to the end of the reporting period.

Defined benefit plan

The Group recognized unfunded employee benefits liability in accordance with Government Regulation in Lieu of Law ("Perppu") No. 2 of 2022 on Job Creation which was later passed into Law No. 6 in 2023. Pension costs under the Group's defined benefit pension plans are determined by periodic actuarial calculation using the projected unit credit method and applying the assumptions on discount rate and annual rate of increase in compensation.

Remeasurement, comprising actuarial gains and losses, is reflected immediately in the consolidated statement of financial position with a charge or credit recognized in other comprehensive income in the period in which they occur in order for the net pension liability recognized in the consolidated statement of financial position to reflect the full value of the plan deficit. Remeasurement recognized in other comprehensive income is reflected immediately as a separate item under other comprehensive income in equity and will not be reclassified to profit or loss.

Past service cost is recognized in profit or loss when the plan amendment or curtailment occurs, or when the Group recognizes related restructuring costs or termination benefits, if earlier.

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

u. Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan (lanjutan)

Imbalan pascakerja program imbalan pasti (lanjutan)

Bunga neto dihitung dengan menggunakan tingkat diskonto terhadap liabilitas imbalan pasti neto. Biaya imbalan pasti dikategorikan sebagai berikut:

- Biaya jasa (termasuk biaya jasa kini, biaya jasa lalu serta keuntungan dan kerugian kurtailmen dan penyelesaian)
- Beban bunga
- Pengukuran kembali

Grup menyajikan dua komponen pertama dari biaya imbalan pasti di laba rugi. Keuntungan dan kerugian kurtailmen dicatat sebagai biaya jasa lalu.

Kewajiban imbalan pensiun yang diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian merupakan defisit atau surplus aktual dalam program imbalan pasti Grup.

Pesangon

Liabilitas untuk pesangon diakui mana yang terjadi lebih dulu ketika entitas tidak dapat lagi menarik penawaran imbalan tersebut dan ketika entitas mengakui biaya restrukturisasi terkait.

v. Sewa

Sebagai penyewa

Grup menilai apakah sebuah kontrak mengandung sewa, pada tanggal inisiasi kontrak. Grup mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa terkait sehubungan dengan seluruh kesepakatan sewa di mana Grup merupakan penyewa, kecuali untuk sewa jangka-pendek (yang didefinisikan sebagai sewa yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang) dan sewa yang aset dasarnya bernilai-rendah. Untuk sewa-sewa tersebut, Grup mengakui pembayaran sewa sebagai beban operasi secara garis lurus selama masa sewa kecuali dasar sistematis lainnya lebih merepresentasikan pola konsumsi manfaat penyewa dari aset sewa.

Liabilitas sewa awalnya diukur pada nilai kini pembayaran sewa masa depan yang belum dibayarkan pada tanggal permulaan, yang didiskontokan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa. Jika suku bunga ini tidak dapat ditentukan, Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental khusus untuk penyewa.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

u. Employee Benefits Liability (continued)

Defined benefit plan (continued)

Net interest is calculated by applying the discount rate to the net defined benefits liability. Defined benefit costs are categorized as follows:

- *Service cost (including current service cost, past service cost, as well as gains and losses on curtailments and settlements)*
- *Interest expense*
- *Remeasurement*

The Group presents the first two components of defined benefit costs in profit or loss. Curtailment gains and losses are accounted for as past service costs.

The retirement benefit obligation recognized in the consolidated statement of financial position represents the actual deficit in the Group's defined benefit plans.

Termination

A liability for a termination benefit is recognized at the earlier of when the entity can no longer withdraw the offer of the termination benefit and when the entity recognizes any related restructuring costs.

v. Leases

As lessee

The Group assesses whether a contract is or contains a lease, at the inception of the contract. The Group recognizes a right-of-use asset and a corresponding lease liability with respect to all lease arrangements in which it is the lessee, except for short-term leases (defined as leases with a lease term of 12 months or less) and leases of low value assets. For these leases, the Group recognizes the lease payments as an operating expense on a straight-line basis over the term of the lease unless another systematic basis is more representative of the time pattern in which economic benefits from the leased assets are consumed.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted by using the rate implicit in the lease. If this rate cannot be readily determined, the Group uses the incremental borrowing rate specific to the lessee.

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

v. Sewa (lanjutan)

Sebagai penyewa (lanjutan)

Bunga pinjaman inkremental bergantung pada jangka waktu, mata uang dan tanggal mulai sewa, dan ditentukan berdasarkan serangkaian input, termasuk: tingkat bebas risiko berdasarkan suku bunga obligasi pemerintah; penyesuaian risiko khusus negara; penyesuaian risiko kredit berdasarkan imbal hasil obligasi; dan penyesuaian khusus entitas ketika profil risiko entitas yang melakukan perjanjian sewa berbeda dengan grup dan sewa tersebut tidak memperoleh manfaat atas jaminan dari Grup.

Pembayaran sewa yang diperhitungkan dalam pengukuran liabilitas sewa terdiri atas:

- pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara-substansi), dikurangi insentif sewa;
- pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan;
- jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa dalam jaminan nilai residual;
- harga eksekusi opsi beli jika penyewa cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut; dan
- pembayaran penalti karena penghentian sewa, jika masa sewa merefleksikan penyewa mengeksekusi opsi untuk menghentikan sewa.

Liabilitas sewa disajikan sebagai pos terpisah dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Liabilitas sewa selanjutnya diukur dengan meningkatkan jumlah tercatat untuk merefleksikan bunga atas liabilitas sewa (menggunakan metode suku bunga efektif) dan dengan mengurangi jumlah tercatat untuk merefleksikan sewa yang telah dibayar.

Setiap pembayaran sewa dialokasikan antara liabilitas dan biaya keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas untuk setiap periode.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

v. Leases (continued)

As lessee (continued)

The incremental borrowing rate depends on the term, currency and start date of the lease and is determined based on a series of inputs including: the risk-free rate based on government bond rates; a country-specific risk adjustment; a credit risk adjustment based on bond yields; and an entity-specific adjustment when the risk profile of the entity that enters into the lease is different to that of the group and the lease does not benefit from a guarantee from the Group.

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise:

- *fixed lease payments (including insubstance fixed payments), less any lease incentives;*
- *variable lease payments that depend on an index or rate, initially measured using the index or rate at the commencement date;*
- *the amount expected to be payable by the lessee under residual value guarantees;*
- *the exercise price of purchase options, if the lessee is reasonably certain to exercise the options; and*
- *payments of penalties for terminating the lease, if the lease term reflects the exercise of an option to terminate the lease.*

The lease liability is presented as a separate line in the consolidated statement of financial position.

The lease liability is subsequently measured by increasing the carrying amount to reflect the interest on the lease liability (using the effective interest method) and by reducing the carrying amount to reflect the lease payments made.

Each lease payment is allocated between the liability and finance cost. The finance cost is charged to profit or loss over the lease period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period.

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

v. Sewa (lanjutan)

Sebagai penyewa (lanjutan)

Grup mengukur kembali liabilitas sewa (dan melakukan penyesuaian terkait terhadap aset hak-guna) jika:

- terdapat perubahan dalam masa sewa atau perubahan dalam penilaian atas eksekusi opsi pembelian, di mana liabilitas sewa diukur dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian;
- terdapat perubahan sewa masa depan sebagai akibat dari perubahan indeks atau perubahan perkiraan pembayaran berdasarkan nilai residual jaminan di mana liabilitas sewa diukur Kembali dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto awal (kecuali jika pembayaran sewa berubah karena perubahan suku bunga mengambang, di mana tingkat diskonto revisian digunakan); atau
- kontrak sewa dimodifikasi dan modifikasi sewa tidak dicatat sebagai sewa terpisah, di mana liabilitas sewa diukur dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian.

Grup tidak melakukan penyesuaian tersebut selama periode yang disajikan.

Aset hak-guna terdiri dari pengukuran awal atas liabilitas sewa, pembayaran sewa yang dilakukan pada saat atau sebelum permulaan sewa dan biaya langsung awal. Aset hak-guna selanjutnya diukur sebesar biaya dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai.

Jika Grup dibebankan kewajiban atas biaya membongkar dan memindahkan aset sewa, merestorasi tempat di mana aset berada atau merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan oleh syarat dan ketentuan sewa, provisi diakui dan diukur sesuai PSAK 237. Biaya tersebut diperhitungkan dalam aset hak-guna terkait, kecuali jika biaya tersebut terjadi untuk memproduksi persediaan.

Aset hak-guna disusutkan secara garis lurus selama jangka waktu sewa yang lebih pendek dan estimasi masa manfaat aset.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

v. Leases (continued)

As lessee (continued)

The Group remeasures the lease liability (and makes a corresponding adjustment to the related right-of-use assets) whenever:

- *the lease term has changed or there is a change in the assessment of the exercise of a purchase option, in which case the lease liability is remeasured by discounting the revised lease payments using a revised discount rate;*
- *the lease payments change due to changes in an index or rate or a change in expected payment under a guaranteed residual value, in which cases the lease liability is remeasured by discounting the revised lease payments using the initial discount rate (unless the lease payments change is due to a change in a floating interest rate, in which case a revised discount rate is used); or*
- *a lease contract is modified and the lease modification is not accounted for as a separate lease, in which case the lease liability is remeasured by discounting the revised lease payments using a revised discount rate.*

The Group did not make such any adjustment during the periods presented.

The right-of-use assets comprise the initial measurements of the corresponding lease liability, lease payments made at or before the commencement day and any initial direct costs. They are subsequently measured at cost less accumulated depreciation and impairment losses.

Whenever the Group incurs an obligation for costs to dismantle and remove a leased asset, restore the site on which it is located or restore the underlying assets to the conditions required by the terms and conditions of the lease, a provision is recognized and measured under PSAK 237. The costs are included in the related right-of-use asset, unless those costs are incurred to produce inventories.

Right-of-use assets are depreciated on a straight-line basis over the shorter of the lease term and the estimated useful lives of the assets.

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

v. Sewa (lanjutan)

Aset hak pakai disajikan sebagai bagian dari "Aset Tetap - neto" pada laporan keuangan konsolidasian.

Grup menerapkan PSAK 236 untuk menentukan apakah aset hak-guna mengalami penurunan nilai dan mencatat kerugian penurunan nilai yang teridentifikasi sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan penurunan nilai aset nonkeuangan.

w. Pajak Penghasilan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan tangguhan. Beban pajak diakui dalam laporan laba rugi kecuali untuk transaksi yang berhubungan dengan transaksi diakui di luar laba atau rugi, baik dalam penghasilan komprehensif lain atau langsung pada ekuitas.

Pajak kini

Beban pajak kini dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku pada tanggal pelaporan keuangan, dan ditetapkan berdasarkan taksiran laba kena pajak tahun berjalan.

Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sehubungan dengan situasi di mana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

Kekurangan atau kelebihan pembayaran pajak penghasilan badan dicatat sebagai bagian dari beban pajak dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Bunga dan denda yang timbul dari ketetapan pajak dan kurang bayar atau lebih bayar pajak lainnya disajikan sebagai bagian dari penghasilan atau beban operasi lain karena tidak dianggap sebagai bagian dari beban pajak penghasilan.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima. Jika Grup mengajukan keberatan, Grup mempertimbangkan apakah besar kemungkinan otoritas pajak akan menerima keberatan tersebut dan merefleksikan dampaknya terhadap liabilitas perpajakan Grup.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

v. Leases (continued)

The right-of-use assets are presented as part of "Fixed Assets - net" in the consolidated financial statements.

The Group applies PSAK 236 to determine whether a right-of-use asset is impaired and accounts for any identified impairment loss as described in the impairment of non-financial assets policy.

w. Income Taxes

Income tax expense comprises current and deferred tax. Income tax expense is recognized in profit or loss except to the extent that it relates to items recognized outside profit or loss, either in other comprehensive income or directly in equity.

Current tax

Current tax expense is calculated using tax rates that have been enacted or substantively enacted at end of the reporting period, and is provided based on the estimated taxable income for the year.

Management periodically evaluates positions taken in tax returns with respect to situations in which applicable tax regulation is subject to interpretation. It establishes provision where appropriate on the basis of amounts expected to be paid to the tax authorities.

Underpayment or overpayment of corporate income tax are presented as part of income tax expense in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

Interests and penalties arising from tax assessments and underpayment or overpayment of other taxes are presented as part of other operating income or expenses since they are not considered as part of the income tax expense.

Amendments to tax obligations are recorded when a tax assessment letter is received. If the Group files an appeal, the Group considers whether it is probable that a taxation authority will accept the appeal and reflect its effect on the Group's tax obligations.

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

w. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Pajak tangguhan

Pajak tangguhan diukur dengan metode liabilitas atas beda waktu pada tanggal pelaporan antara dasar pengenaan pajak untuk aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dengan beberapa pengecualian. Aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan rugi fiskal apabila terdapat kemungkinan besar bahwa jumlah laba kena pajak pada masa mendatang akan memadai untuk mengkompensasi perbedaan temporer dan rugi fiskal. Aset dan liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika perbedaan temporer timbul dari pengakuan awal (selain dari kombinasi bisnis atau transaksi yang tidak menimbulkan perbedaan temporer kena pajak dan perbedaan temporer dapat dikurangkan dalam jumlah yang sama) dari aset dan liabilitas suatu transaksi yang tidak memengaruhi laba kena pajak atau laba akuntansi.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dihitung berdasarkan tarif yang akan dikenakan pada periode saat aset direalisasikan atau liabilitas tersebut diselesaikan, berdasarkan undang-undang pajak yang berlaku atau berlaku secara substantif pada akhir periode laporan keuangan. Pengaruh pajak terkait dengan penyisihan dan/atau pemulihan semua perbedaan temporer selama tahun berjalan, termasuk pengaruh perubahan tarif pajak, dikreditkan atau dibebankan pada periode operasi berjalan, untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah dibebankan atau dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain atau langsung ke ekuitas.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan dikaji ulang pada setiap akhir periode pelaporan, dan mengurangi jumlah tercatat jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasi sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan yang belum diakui dinilai kembali pada setiap akhir periode pelaporan dan diakui sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak mendatang akan memungkinkan aset pajak tangguhan tersedia untuk dipulihkan.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY
INFORMATION (continued)

w. Income Taxes (continued)

Deferred tax

Deferred tax is provided using the liability method on temporary differences at the reporting date between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences with certain exceptions. Deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and tax losses carry-forward to the extent that it is probable that taxable income will be available in future years against which the deductible temporary differences and tax losses carry forward can be utilized. Such deferred tax assets and liabilities are not recognized if the temporary differences arise from the initial recognition (other than in a business combination or transactions that give rise to equal taxable and deductible temporary differences) of assets and liabilities in a transaction that affects neither the taxable profit nor the accounting profit.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the period when the asset is realized or the liability is settled, based on tax laws that have been enacted or substantively enacted at the end of reporting period. The related tax effects of the provisions for and/or reversals of all temporary differences during the year, including the effect of change in tax rates, are credited or charged to current period operations, except to the extent that they relate to items previously charged or credited to other comprehensive income or directly in equity.

The carrying amount of a deferred tax asset is reviewed at each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable income will be available to allow all or part of the benefit of that deferred tax asset to be utilized. Unrecognized deferred tax assets are reassessed at each reporting date and are recognized to the extent that it has become probable that future taxable income will allow the deferred tax assets to be recovered.

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

w. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Pajak tangguhan (lanjutan)

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan secara saling hapus saat hak yang dapat dipaksakan secara hukum ada untuk saling hapus aset pajak kini dan liabilitas pajak kini, dan aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan berkaitan dengan entitas kena pajak yang sama, atau Grup bermaksud untuk menyelesaikan liabilitas dan aset pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan di mana jumlah signifikan atas liabilitas atau aset pajak tangguhan diharapkan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

x. Informasi Segmen

Segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal mengenai komponen dari Grup yang secara regular direviu oleh "pengambil keputusan operasional" dalam rangka mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- yang terlibat dalam aktivitas bisnis untuk memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- yang hasil operasinya dikaji ulang secara regular oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- dimana tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber daya dan penilaian kinerja mereka terfokus pada kategori dari setiap produk.

Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen termasuk hal-hal yang dapat diatribusikan secara langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang memadai untuk segmen tersebut. Segmen ditentukan sebelum saldo dan transaksi antar grup dieliminasi sebagai bagian dari proses konsolidasi.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

w. Income Taxes (continued)

Deferred tax (continued)

Deferred tax assets and liabilities are offset when a legally enforceable right exists to offset current tax assets against current tax liabilities, and the deferred tax assets and the deferred tax liabilities relate to the same taxable entity, or the Group intends to settle its current tax liabilities and assets on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.

x. Segment Information

Operating segments are identified on the basis of internal reports about components of the Group that are regularly reviewed by the "chief operating decision maker" in order to allocate resources to the segments and to assess their performances.

An operating segment is a component of an entity:

- that engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses (including revenues and expenses relating to the transactions with other components of the same entity);*
- whose operating results are reviewed regularly by the entity's chief operating decision maker to make decision about resources to be allocated to the segments and assess its performance; and*
- for which discrete financial information is available.*

Information reported to the chief operating decision maker for the purpose of resource allocation and assessment of performance is more specifically focused on the category of each product.

Segment revenue, expenses, results, assets and liabilities include items directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis to that segment. They are determined before intragroup balances and intragroup transactions are eliminated.

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

y. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa setelah periode pelaporan yang memberikan informasi tambahan tentang posisi Grup pada periode pelaporan (menyesuaikan peristiwa) tercermin dalam laporan keuangan konsolidasian. Peristiwa setelah periode pelaporan yang tidak menyesuaikan peristiwa, jika ada, diungkapkan ketika material terhadap laporan keuangan konsolidasian.

4. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dalam laporan dan pengungkapan yang terkait, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat pada aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

Pertimbangan

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup, manajemen telah membuat pertimbangan berikut, yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasi:

Penilaian Model Bisnis

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan bergantung pada hasil SPPI testing dan uji model bisnis. Grup menentukan model bisnis pada tingkat yang mencerminkan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola bersama untuk mencapai tujuan bisnis tertentu. Penilaian ini mencakup penilaian yang mencerminkan semua bukti yang relevan termasuk bagaimana kinerja aset dievaluasi dan kinerjanya diukur, risiko yang memengaruhi kinerja aset dan bagaimana hal ini dikelola dan bagaimana manajer aset diberi kompensasi. Grup memantau aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi yang dihentikan pengakuannya sebelum jatuh tempo untuk memahami alasan pelepasannya dan apakah alasan tersebut konsisten dengan tujuan bisnis di mana aset tersebut dimiliki. Pemantauan adalah bagian dari penilaian berkelanjutan Grup atas apakah model bisnis di mana aset keuangan yang tersisa dimiliki tetap sesuai dan jika tidak sesuai apakah telah terjadi perubahan dalam model bisnis dan dengan demikian terdapat perubahan prospektif terhadap klasifikasi aset keuangan tersebut. Tidak ada perubahan yang diperlukan selama periode yang disajikan.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

y. Events after the Reporting Period

Events after the reporting period that provide additional information about the Group's position at the reporting period (adjusting events) are reflected in the consolidated financial statements. Events after the reporting period that are not adjusting events, if any, are disclosed when material to the consolidated financial statements.

4. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND KEY SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINTY

The preparation of the Group's consolidated financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts herein, and the related disclosures, at the end of the reporting period. However, uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of the asset or liability affected in future periods.

Judgments

In the process of applying the Group's accounting policies, management has made the following judgments, which have the most significant effect on the amounts recognized in the consolidated financial statements:

Business Model Assessment

Classification and measurement of financial assets depends on the results of the SPPI testing and the business model test. The Group determines the business model at a level that reflects how groups of financial assets are managed together to achieve a particular business objective. This assessment includes judgment reflecting all relevant evidence including how the performance of the assets is evaluated and their performance measured, the risks that affect the performance of the assets and how these are managed and how the managers of the assets are compensated. The Group monitors financial assets measured at amortized cost that are derecognized prior to their maturity to understand the reason for their disposal and whether the reasons are consistent with the objective of the business for which the asset was held. Monitoring is part of the Group's continuous assessment of whether the business model for which the remaining financial assets are held continues to be appropriate and if it is not appropriate whether there has been a change in business model and so a prospective change to the classification of those assets. No such changes were required during the periods presented.

4. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

Penentuan Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional Grup adalah mata uang dari lingkungan ekonomi primer dimana entitas beroperasi. Mata uang tersebut adalah mata uang yang mempengaruhi pendapatan dan beban dari jasa yang diberikan. Berdasarkan penilaian manajemen Grup, mata uang fungsional Grup adalah Rupiah.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan ketidakpastian sumber estimasi utama yang lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Grup. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Estimasi Cadangan

Cadangan nikel adalah perkiraan nikel yang dapat secara ekonomis dan sah diekstrak dari properti Grup. Dalam rangka untuk memperkirakan cadangan, dibutuhkan asumsi faktor geologi, teknis dan ekonomi, termasuk jumlah produksi, teknik produksi, rasio pengupasan, biaya produksi, biaya transportasi, permintaan komoditas, harga komoditas, dan nilai tukar.

Memperkirakan jumlah dan/atau nilai kandungan cadangan membutuhkan ukuran, bentuk, dan kedalaman tubuh nikel, atau lapangan yang akan ditentukan dengan menganalisis data geologi seperti "uji petik" (sampel) pengeboran. Proses ini mungkin memerlukan penilaian geologi untuk menginterpretasikan data.

4. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND KEY SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINTY (continued)

Judgments (lanjutan)

Determination of Functional Currency

The functional currency of the Group is the currency of the primary economic environment in which it operates. It is the currency that mainly influences the revenue and cost of rendering services. Based on the Group's management assessment, Group's functional currency is Rupiah.

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date, that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year, are described below. The Group based its assumptions and estimates on parameters available when the consolidated financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments however, may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Group. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

Reserve Estimation

Nickel reserves are nickel estimates that can be economically and legally extracted from Group property. In order to estimate reserves, assumptions of geological, technical and economic factors are required, including production quantities, production techniques, stripping ratios, production costs, transportation costs, commodity demand, commodity prices and exchange rates.

Estimating the amount and/or value of the reserve content requires the size, shape and depth of the nickel body, or the field to be determined by analyzing geological data such as "sampling" drilling. This process may require complex geological judgements to interpret the data.

4. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Estimasi Cadangan (lanjutan)

Karena asumsi ekonomi yang digunakan untuk memperkirakan cadangan berubah dari tahun ke tahun dan karena data geologi tambahan yang dihasilkan selama operasi, perkiraan cadangan dapat berubah dari tahun ke tahun. Perubahan cadangan yang dilaporkan dapat mempengaruhi hasil dan posisi keuangan Grup dalam berbagai cara di antaranya:

- Nilai tercatat aset dapat terpengaruh akibat perubahan estimasi arus kas masa depan;
- Penyusutan dan amortisasi yang dibebankan ke dalam laba rugi dapat berubah dimana beban-beban tersebut ditentukan berdasarkan metode unit produksi, atau dimana masa manfaat ekonomi umur aset berubah;
- Provisi penutupan tambang dapat berubah apabila terjadi perubahan dalam perkiraan cadangan yang mempengaruhi ekspektasi tentang waktu atau biaya kegiatan ini; dan
- Nilai tercatat aset/liabilitas pajak tangguhan dapat berubah karena perubahan estimasi atas kemungkinan terpulihkannya manfaat pajak.

Estimasi Kadar Nikel

Fluktuasi laba rugi Grup dipengaruhi oleh estimasi kadar Nikel ("Ni") yang ditetapkan Grup. Kadar nikel tersebut dievaluasi setiap akhir periode pelaporan berdasarkan tingkat realisasi dari aktivitas pemurnian bijih nikel, kondisi mesin dan peralatan produksi.

Penurunan kadar nikel dibebankan sebagai penambahan biaya produksi pada laba rugi dan berlaku prospektif.

Taksiran Masa Manfaat Ekonomis Aset Tetap dan Aset Hak-Guna

Biaya perolehan aset tetap dan aset hak-guna disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Masa manfaat setiap aset tetap dan aset hak-guna Grup ditentukan berdasarkan periode kegunaan yang diharapkan dari aset tersebut. Estimasi ini ditentukan berdasarkan evaluasi teknis internal dan pengalaman atas aset sejenis. Masa manfaat setiap aset direviu secara periodik dan disesuaikan apabila prakiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya karena keausan, keusangan teknis dan komersial, hukum atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset.

4. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND KEY SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINTY (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

Reserve Estimation (continued)

As the economic assumptions used to estimate reserves change from year to year and because of the additional geological data generated during operations, estimated reserves may change from year to year. Changes in the reported reserves could affect the Group's results and financial position in a number of ways including:

- The carrying amount of the asset could be affected by changes in the estimated future cash flows;
- Depreciation and amortization charged to profit or loss may change where the expenses are determined using the unit of production method, or where the economic useful lives of the assets change;
- Mine closure provisions may change if there is a change in estimated reserves that affects expectations about the timing or cost of this activity; and
- The carrying amount of deferred tax assets/liabilities may change due to changes in estimates of the possible recoverability of tax benefits.

Estimated Nickel Content

The fluctuation of the Group's profit or loss is affected by the estimated Nickel ("Ni") grade determined by the Group. The nickel grade is evaluated at the end of each reporting period based on the realization rate of nickel ore refining activities, the condition of machinery and production equipment.

The decrease in nickel grade is charged as additional production costs in profit or loss and applies prospectively.

Estimated Useful Lives of Fixed Assets and Right-of-Use Assets

The costs of fixed assets and right-of use assets are depreciated on a straight-line method over their estimated useful lives. The useful life of each item of the Group's fixed assets and right-of-use assets is estimated based on the period over which the asset is expected to be available for use. Such estimation is based on internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful life of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limits on the use of the asset.

4. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Taksiran Masa Manfaat Ekonomis Aset Tetap dan Aset Hak-Guna (lanjutan)

Namun terdapat kemungkinan bahwa hasil operasi dimasa mendatang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas jumlah serta periode pencatatan beban yang diakibatkan karena perubahan faktor yang disebutkan di atas.

Perubahan masa manfaat aset tetap dan aset hak-guna dapat mempengaruhi jumlah beban penyusutan dan amortisasi yang diakui dan penurunan nilai tercatat aset tersebut.

Nilai tercatat aset tetap dan aset hak-guna diungkapkan dalam Catatan 11.

Imbalan Pasca Kerja dan Pensiun

Penentuan utang dan biaya pensiun dan liabilitas imbalan kerja Grup bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan Grup diakui segera pada laporan posisi keuangan konsolidasian dengan debit atau kredit ke penghasilan komprehensif lain dalam periode terjadinya. Grup berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Grup dapat mempengaruhi secara material liabilitas diestimasi atas pensiun dan imbalan kerja dan beban imbalan kerja neto. Nilai tercatat liabilitas imbalan kerja diungkapkan pada Catatan 20.

4. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND KEY SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINTY (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

Estimated Useful Lives of Fixed Assets and Right-of-Use Assets (continued)

It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above.

A change in the estimated useful life of any item of fixed asset and right-of-use asset would affect the recorded depreciation and amortization expense, respectively, and decrease in the carrying values of these assets.

The carrying values of fixed assets and right-of-use assets are disclosed in Note 11.

Pension and Employee Benefits

The determination of the Group's obligations and cost for pension and employee benefits liabilities is dependent on its selection of certain assumptions used by the independent actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include among others, discount rates, future annual salary increase, annual employee turn-over rate, disability rate, retirement age and mortality rate. Actual results that differ from the Group's assumptions are recognized immediately in the consolidated statement of financial position with a corresponding debit or credit to other comprehensive income in the period which they occur. While the Group believes that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Group's actual experiences or significant changes in the Group's assumptions may materially affect its estimated liabilities for pension and employee benefits and net employee benefits expense. The carrying amounts of the employee benefits obligation are disclosed in Note 20.

4. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Provisi Pembongkaran, Rehabilitasi, Reklamasi dan Penutupan Tambang

Reklamasi area terganggu dan pembongkaran aset tambang dan aset-aset berumur panjang lainnya akan dilakukan selama beberapa tahun mendatang dan persyaratan atas reklamasi ini terus berubah untuk memenuhi ekspektasi politik, lingkungan, keamanan, dan publik. Dengan demikian waktu pelaksanaan dan jumlah arus kas di masa mendatang yang dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban pada setiap tanggal pelaporan dipengaruhi oleh ketidakpastian yang signifikan. Asumsi utama yang digunakan untuk menentukan provisi pembongkaran, rehabilitasi, reklamasi dan penutupan tambang termasuk umur operasi, perkiraan biaya di masa mendatang, waktu kegiatan, tarif diskonto, dan tingkat inflasi.

Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan seluruh rugi fiskal yang belum digunakan sepanjang besar kemungkinannya bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga rugi fiskal tersebut dapat digunakan. Estimasi signifikan oleh manajemen diharuskan dalam menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan saat penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak serta strategi perencanaan pajak masa depan. Rincian lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan 15.

Ketidakpastian liabilitas perpajakan

Dalam situasi tertentu, Perusahaan tidak dapat menentukan secara pasti jumlah liabilitas pajak mereka pada saat ini atau masa depan karena proses pemeriksaan oleh otoritas perpajakan yang masih berlangsung.

Ketidakpastian timbul terkait dengan interpretasi dari peraturan perpajakan yang kompleks dan jumlah dan waktu dari penghasilan kena pajak di masa depan. Dalam menentukan jumlah yang harus diakui terkait dengan liabilitas pajak yang tidak pasti, Perusahaan menerapkan pertimbangan yang sama yang akan mereka gunakan dalam menentukan jumlah cadangan yang harus diakui sesuai dengan PSAK 237, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi". Perusahaan membuat analisa untuk semua posisi pajak terkait dengan pajak penghasilan untuk menentukan apakah liabilitas pajak atas beban pajak yang belum diakui harus diakui. Rincian lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan 15.

4. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND KEY SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINTY (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

Provision for Decommissioning, Rehabilitation, Reclamation and Closure Mine

The reclamation of disturbed areas and decommissioning of mining assets and other long-lived assets will be undertaken several years into the future and precise requirements are constantly changing to satisfy political, environmental, safety and public expectations. As such, the timing and amounts of future cash flows required to settle the obligations at each of the reporting dates are subject to significant uncertainty. The key assumptions used in determining the provision for decommissioning, mine rehabilitation, reclamation and closure included the life of operation, estimated future costs, timing of activities, discount rates and inflation rates.

Deferred Tax Assets

Deferred tax assets are recognized for deductible temporary difference and all unused tax losses to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the losses can be utilized. Significant management estimates are required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and the level of future taxable profits together with future tax planning strategies. Further details are disclosed in Note 15.

Uncertainty Tax Liabilities

In certain circumstances, the Company may not be able to determine the exact amount of its current or future tax liabilities due to ongoing investigations by the taxation authority.

Uncertainties exist with respect to the interpretation of complex tax regulations and the amount and timing of future taxable income. In determining the amount to be recognized in respect of an uncertain tax liability, the Company applies similar considerations as it would use in determining the amount of a provision to be recognized in accordance with PSAK 237, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets". The Company makes an analysis of all tax positions related to income taxes to determine whether a tax liability of unrecognized tax expense should be recognized. Further details are discussed in Note 15.

PT PAM MINERAL TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Provisi atas kerugian kredit ekspektasian aset keuangan

Perusahaan menerapkan provisi khusus untuk aset keuangan. Tingkat provisi tertentu dievaluasi oleh manajemen berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kolektibilitas piutang. Dalam kasus ini, Perusahaan menggunakan penilaian berdasarkan fakta dan keadaan terbaik yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, lamanya hubungan Perusahaan dengan pelanggan dan status kredit pelanggan berdasarkan laporan kredit pihak ketiga dan faktor pasar yang diketahui, untuk mencatat cadangan khusus untuk pelanggan terhadap jumlah yang jatuh tempo dalam jumlah yang diharapkan untuk dikumpulkan. Cadangan spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan karena informasi tambahan yang diterima mempengaruhi jumlah yang diestimasi.

Jumlah tercatat piutang usaha diungkapkan dalam Catatan 7.

5. KOMBINASI BISNIS ENTITAS SEPENGENDALI

Pada tanggal 18 Agustus 2020, PAM mengakuisisi 99,05% saham PT Indrabakti Mustika ("IBM"), entitas sepengendali, sejak tanggal 18 Agustus 2020 dan pengendalian tersebut tidak bersifat sementara, dengan total biaya sebesar Rp. 27.063.000.000. Atas pemetaan tersebut, PAM mengakuisisi 99,05% kepemilikan saham IBM. Nilai tercatat aset bersih yang diperoleh pada tanggal akuisisi adalah sebesar Rp. 25.471.131.676. Selisih antara biaya perolehan dan nilai tercatat aset bersih yang diperoleh di IBM sebesar Rp1.591.868.324 dicatat pada akun "Tambahan modal disetor" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian (Catatan 22).

IBM bergerak di bidang industri pertambangan nikel yang sama dengan PAM.

Nilai perolehan dan nilai tercatat aset neto IBM yang diakuisisi adalah sebagai berikut:

Nilai perolehan	27.063.000.000
Aset bersih yang diakuisisi	<u>(25.471.131.676)</u>
Selisih nilai transaksi	
restrukturisasi entitas sepengendali	
(Catatan 22)	<u>1.591.868.324</u>

Manajemen berkeyakinan bahwa akuisisi IBM telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh OJK.

PT PAM MINERAL TBK AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

4. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND KEY SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINTY (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

Provision for ECL of financial assets

The Company implements specific provisions for financial assets. The level of a specific provision is evaluated by management on the basis of factors that affect the collectability of the accounts. In these cases, the Company uses judgement based on the best available facts and circumstances, including but not limited to, the length of the Company's relationship with the customers and customers' credit status based on third-party credit reports and known market factors, to record specific allowances for customers against amounts due in amounts that it expects to collect. These specific allowances are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amounts estimated.

The carrying amounts of trade receivables are disclosed in Note 7.

5. BUSINESS COMBINATIONS OF ENTITY UNDER COMMON CONTROL

On August 18, 2020, PAM acquired 99.05% of the shares of PT Indrabakti Mustika ("IBM"), entity under common control, since August 18, 2020 and the control is not temporary, for a total cost of Rp27,063,000,000. Upon the said mapping, PAM acquired 99.05% ownership of IBM's shares. The carrying amount of net assets acquired at the date of acquisition amounted to Rp25,471,131,676. The difference between the acquisition cost and carrying amount of the net assets acquired in IBM amounting to Rp1,591,868,324 was recorded in "Additional paid-in-capital" account in the consolidated statements of financial position (Note 22).

IBM is in the same nickel mining industry as PAM.

The acquisition cost and carrying value of the net assets of IBM which was acquired are as follows:

Acquisition cost
Net assets acquired
Difference in value arising from
restructuring transaction of entities
under common control (Note 22)

Management believes that the acquisition of IBM has been conducted in accordance with OJK regulations.

PT PAM MINERAL TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PAM MINERAL TBK AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

6. KAS DAN SETARA KAS

Akun ini terdiri dari:

	2024	2023
Kas	3.506.959.595	1.215.724.677
Kas di Bank		
<u>Rupiah</u>		
PT Bank Central Asia Tbk	39.205.608.213	22.350.354.950
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	31.518.075.970	95.320.026.829
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	2.803.777.754	975.710.957
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara	629.871.369	536.999.618
PT Bank Mayapada Internasional Tbk	179.593.332	155.088.421
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	103.180.338	54.905.162
PT Bank MNC Internasional Tbk	1.690.000	-
Sub-jumlah	74.441.796.976	119.393.085.937
<u>Dolar Amerika Serikat</u>		
PT Bank Central Asia Tbk	1.773.835	4.856.032
Bank of China Ltd.	1.214.575	2.303.533
Sub-jumlah	2.988.410	7.159.565
Deposito berjangka		
<u>Rupiah</u>		
PT Bank Mayapada Internasional Tbk	140.000.000.000	15.157.510.000
PT Bank MNC Internasional Tbk	10.000.000.000	-
Sub-jumlah	150.000.000.000	15.157.510.000
Jumlah	227.951.744.981	135.773.480.179

Seluruh bank dan deposito ditempatkan pada pihak ketiga. Bunga atas deposito berjangka pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar 7,50% sampai 7,85% dan 6,75%.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, seluruh kas dan setara kas tidak digunakan sebagai jaminan dan tidak dibatasi penggunaannya.

6. CASH AND CASH EQUIVALENTS

This account consists of:

	2024	2023
Cash on hand		
Cash in Banks		
<u>Rupiah</u>		
PT Bank Central Asia Tbk	39.205.608.213	22.350.354.950
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	31.518.075.970	95.320.026.829
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	2.803.777.754	975.710.957
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara	629.871.369	536.999.618
PT Bank Mayapada Internasional Tbk	179.593.332	155.088.421
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	103.180.338	54.905.162
PT Bank MNC Internasional Tbk	1.690.000	-
Sub-total	74.441.796.976	119.393.085.937
<u>United States Dollars</u>		
PT Bank Central Asia Tbk	1.773.835	4.856.032
Bank of China Ltd.	1.214.575	2.303.533
Sub-total	2.988.410	7.159.565
Time deposits		
<u>Rupiah</u>		
PT Bank Mayapada Internasional Tbk	140.000.000.000	15.157.510.000
PT Bank MNC Internasional Tbk	10.000.000.000	-
Sub-total	150.000.000.000	15.157.510.000
Total	227.951.744.981	135.773.480.179

All cash in banks and deposits are placed with third parties. Annual interest rate for time deposits as at December 31, 2024 and 2023 are 7.50% to 7.85% and 6.75%, respectively.

As at December 31, 2024 and 2023, all cash and cash equivalents are neither pledged as collateral nor restricted in use.

PT PAM MINERAL TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PAM MINERAL TBK AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

7. PIUTANG USAHA

Akun ini terdiri dari:

	2024
Pihak ketiga	
PT Marin Mitra Nusantara	110.101.300.040
PT Xingda Trading Indonesia	64.056.966.423
PT Bumi Mineral Sentosa	19.300.536.283
PT Wanxiang Nickel Indonesia	7.002.953.718
PT Lestari Smelter Indonesia	5.479.617.886
PT Huafei Nickel Cobalt	4.215.368.900
PT Walsin Nickel Industrial Indonesia	4.005.202.482
PT Eco Energi Perkasa	1.717.420.935
PT Nadesico Nickel Industry	1.509.988.675
PT Mineral Maju Sejahtera	846.886.753
PT Huayue Nikel Cobalt	427.392.270
PT Kyara Sukses Mandiri	-
PT Global Metal Trading	-
PT Zhao Hui Nickel	-
Lain-lain	103.958.042
Jumlah	218.767.592.407

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, seluruh nilai tercatat piutang usaha berdenominasi Rupiah.

Berikut merupakan pelanggan yang mewakili lebih dari 5% dari jumlah saldo piutang usaha:

	2024	
	Persentase dari piutang usaha/ Percentage to total trade receivables	
Rp		
PT Marin Mitra Nusantara	50,33%	PT Marin Mitra Nusantara
PT Xingda Trading Indonesia	29,28%	PT Xingda Trading Indonesia
PT Bumi Mineral Sentosa	8,82%	PT Bumi Mineral Sentosa
	2023	
	Persentase dari piutang usaha/ Percentage to total trade receivables	
Rp		
PT Kyara Sukses Mandiri	58,41%	PT Kyara Sukses Mandiri
PT Global Metal Trading	23,98%	PT Global Metal Trading
PT Zhao Hui Nickel	17,38%	PT Zhao Hui Nickel

Jangka waktu rata-rata kredit penjualan barang adalah 14 hari. Tidak ada bunga yang dibebankan pada piutang usaha yang telah melebihi jangka waktu tersebut.

7. TRADE RECEIVABLES

This account consists of:

	2023	
		Third parties
-	-	PT Marin Mitra Nusantara
-	-	PT Xingda Trading Indonesia
-	-	PT Bumi Mineral Sentosa
-	-	PT Wanxiang Nickel Indonesia
-	-	PT Lestari Smelter Indonesia
-	-	PT Huafei Nickel Cobalt
-	-	PT Walsin Nickel Industrial Indonesia
-	-	PT Eco Energi Perkasa
-	-	PT Nadesico Nickel Industry
-	-	PT Mineral Maju Sejahtera
-	-	PT Huayue Nikel Cobalt
28.408.578.049	28.408.578.049	PT Kyara Sukses Mandiri
11.665.811.937	11.665.811.937	PT Global Metal Trading
8.455.257.157	8.455.257.157	PT Zhao Hui Nickel
110.113.512	110.113.512	Others
48.639.760.655	48.639.760.655	Total

As at December 31, 2024 and 2023, all of the Group's trade receivables are denominated in Rupiah.

Details of customers who represent more than 5% of the total trade receivable balance are as follows:

	2024	
	Persentase dari piutang usaha/ Percentage to total trade receivables	
		PT Marin Mitra Nusantara
		PT Xingda Trading Indonesia
		PT Bumi Mineral Sentosa
	2023	
	Persentase dari piutang usaha/ Percentage to total trade receivables	
		PT Kyara Sukses Mandiri
		PT Global Metal Trading
		PT Zhao Hui Nickel

The average credit period for sales of goods is 14 days. No interest is charged on trade receivable that have exceeded this period.

PT PAM MINERAL TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PAM MINERAL TBK AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

7. PIUTANG USAHA (lanjutan)

Rincian umur piutang usaha adalah sebagai berikut:

	2024
Lancar	59.656.700.745
Jatuh tempo:	
1 - 30 hari	140.775.562.611
31 - 60 hari	18.335.329.051
61 - 90 hari	-
Lebih dari 90 hari	-
Jumlah	218.767.592.407

Dalam menentukan ECL, manajemen telah mempertimbangkan pengalaman gagal bayar masa lalu dan posisi keuangan pelanggan, disesuaikan dengan faktor-faktor yang khusus bagi pelanggan dan kondisi ekonomi umum industri tempat mereka beroperasi.

Tidak ada perubahan dalam teknik estimasi atau asumsi signifikan yang dibuat selama periode pelaporan berjalan.

Grup tidak membentuk penyisihan ECL atas piutang usaha karena manajemen berkeyakinan bahwa seluruh piutang usaha dapat tertagih.

8. PERSEDIAAN

Akun ini terdiri dari:

	2024
Bijih nikel	12.821.916.983

Grup berpendapat bahwa semua persediaan dapat digunakan atau dijual dan nilai realisasi neto persediaan masih melebihi nilai tercatat persediaan. Sehingga tidak diperlukan adanya provisi persediaan usang dan penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, persediaan Grup tidak diasuransikan terhadap seluruh risiko.

7. TRADE RECEIVABLES (continued)

The aging of trade receivables is as follows:

	2023	
	456.747.732	<i>Current</i>
		<i>Overdue:</i>
	17.076.657.666	<i>1 - 30 days</i>
	31.106.355.257	<i>31 - 60 days</i>
	-	<i>61 - 90 days</i>
	-	<i>More than 90 days</i>
Jumlah	48.639.760.655	Total

In determining the ECL, management has taken into account the past default experience and financial position of the customers, adjusted for factors that are specific to the customers and general economic conditions of the industry in which they operate.

There has been no change in the estimation techniques or significant assumptions made during the current reporting period.

The Group did not provide any allowance for ECL on trade receivables since management believes that all trade receivables are collectible.

8. INVENTORIES

This account consists of:

	2023	
	65.713.358.864	Nickel ore

The Group believes that all inventories can be utilized or sold, and the net realizable value of the inventories still exceeds their carrying value. Therefore, no provision for obsolete inventory or impairment is required as at December 31, 2024 and 2023.

As at December 31, 2024 and 2023, the Group's inventory were not insured against all risks.

PT PAM MINERAL TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PAM MINERAL TBK AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

9. UANG MUKA

Akun ini terdiri dari:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Pengadaan barang dan jasa	88.595.462.883	234.744.032.026
Jasa kontraktor	46.499.687.305	109.994.047.875
Pembelian aset tetap	3.515.148.000	-
Pembelian aset takberwujud	837.170.103	-
Eksplorasi	565.080.000	3.042.014.000
Lain-lain	26.248.713	39.336.810
Jumlah	<u>140.038.797.004</u>	<u>347.819.430.711</u>
Dikurangi bagian jangka pendek	<u>(135.686.478.901)</u>	<u>(223.114.220.577)</u>
Bagian jangka panjang	<u>4.352.318.103</u>	<u>124.705.210.134</u>

9. ADVANCES

This account consists of:

<i>Procurement of goods and services</i>
<i>Contractor services</i>
<i>Purchase of fixed assets</i>
<i>Purchase of intangible assets</i>
<i>Exploration</i>
<i>Others</i>
Total
<i>Less current portion</i>
Non-current portion

10. UANG MUKA INVESTASI

Akun ini terdiri dari:

	<u>2024</u>	<u>2023¹⁾</u>
Pihak ketiga		
PT Sumber Mineral Abadi	<u>311.865.000.000</u>	<u>125.000.000.000</u>

10. ADVANCES FOR INVESTMENT

This account consists of:

Third party
<i>PT Sumber Mineral Abadi</i>

¹⁾ Direklasifikasi kembali (Catatan 36)

As reclassified (Note 36)¹⁾

PT Sumber Mineral Abadi ("SMA")

Pada tanggal 12 September 2023, Perusahaan dan SMA menandatangani Perjanjian Pembelian Saham Baru Bersyarat ("PPSBB") dengan periode paling lambat 108 hari kalender setelah tanggal perjanjian atau perpanjangannya yang disepakati oleh Para Pihak.

Tanggal penyelesaian dilakukan dan tidak melebihi periode kondisi prasyarat, yakni paling lambat pada tanggal 29 Desember 2023 dengan menggunakan laporan keuangan 30 Juni 2023 sebagai acuan. Harga penyetoran untuk saham baru yang harus dibayarkan oleh Perusahaan kepada SMA sebanyak-banyaknya Rp140.000.000.000.

PT Sumber Mineral Abadi ("SMA")

On September 12, 2023, the Company and SMA entered into a Conditional New Share Purchase Agreement ("PPSBB") for a period of no later than 108 calendar days after the date of the agreement or any extension agreed by the Parties.

The completion date is conducted and does not exceed the conditional period, which is no later than December 29, 2023 using the financial statement as at June 30, 2023 as a reference. The deposit price for new shares to be paid by the Company to SMA is up to Rp140,000,000,000.

10. UANG MUKA INVESTASI (lanjutan)

PT Sumber Mineral Abadi ("SMA") (lanjutan)

Berdasarkan Adendum Pertama PPSBB pada tanggal 27 Desember 2023 sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk membeli saham baru SMA sejumlah sebesar-besarnya 50% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor pada SMA, perubahan sebagai berikut:

1. Perubahan periode kondisi prasyarat yang sebelumnya 108 (seratus delapan) hari kalender setelah tanggal perjanjian menjadi 290 hari kalender setelah tanggal perjanjian.
2. Perubahan tanggal penyelesaian yang sebelumnya paling lambat pada tanggal 29 Desember 2023 menjadi 28 Juni 2024.
3. Perubahan referensi laporan keuangan SMA yang sebelumnya laporan keuangan per 30 Juni 2023 menjadi laporan keuangan SMA per 31 Desember 2023 yang menjadi acuan definisi akun dan juga salah satu kondisi prasyarat dimana SMA perlu menyerahkan laporan keuangan SMA per 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh akuntan publik.

Berdasarkan adendum kedua PPSBB pada tanggal 20 Juni 2024, perubahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perubahan periode kondisi prasyarat yang sebelumnya 290 hari kalender setelah tanggal perjanjian menjadi paling lambat pada tanggal 30 Mei 2025.
2. Perubahan tanggal penyelesaian yang sebelumnya 28 Juni 2024 menjadi paling lambat pada tanggal 30 Mei 2025.
3. Perubahan referensi laporan keuangan SMA yang sebelumnya laporan keuangan per 31 Desember 2023 menjadi 31 Desember 2024, yang menjadi acuan definisi akun dan juga salah satu kondisi prasyarat dimana SMA perlu menyerahkan laporan keuangan SMA per 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh akuntan publik.

10. ADVANCES FOR INVESTMENT (continued)

PT Sumber Mineral Abadi ("SMA") (continued)

Based on the First Addendum of PPSBB dated December 27, 2023 in connection with Company's plan to purchase new SMA shares amounting to 50% of the total issued and paid-in capital of SMA, the changes are as follows:

1. *Change in the prerequisite condition period from 108 (one hundred and eight) calendar days after the date of the agreement to 290 calendar days after the date of the agreement.*
2. *Change of completion date from December 29, 2023 to June 28, 2024.*
3. *Changes in the reference of SMA's financial statements which were previously financial statements as at June 30, 2023 to SMA's financial statements as at December 31, 2023 which became a reference for account definitions and also one of the prerequisite conditions where SMA needs to submit its financial statements as at December 31, 2023 which have been audited by a public accountant.*

Based on the second addendum of PPSBB dated June 20, 2024, the changes are as follows:

1. *Change in the prerequisite period, which was previously 290 calendar days after the agreement date to no later than May 30, 2025.*
2. *Change in the completion date, which was previously June 28, 2024 to no later than May 30, 2025.*
3. *Change in the reference for the SMA financial statements, which was previously the financial statements as at December 31, 2023 to as at December 31, 2024. This will serve as the reference for the account definitions and also as one of the prerequisites where the SMA is required to submit the audited SMA financial statements as at December 31, 2024, by a public accountant*

10. UANG MUKA INVESTASI (lanjutan)

PT Sumber Mineral Abadi ("SMA") (lanjutan)

Berdasarkan addendum ketiga PPSBB pada tanggal 6 Desember 2024, perubahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perubahan periode kondisi prasyarat yang sebelumnya paling lambat pada tanggal 30 Mei 2025 menjadi paling lambat pada tanggal 31 Desember 2025 atau tanggal perpanjangan yang disepakati oleh para pihak.
2. Perubahan tanggal penyelesaian yang sebelumnya 30 Mei 2025 menjadi paling lambat pada tanggal 31 Desember 2025.
3. Perubahan harga penyetoran uang muka yang sebelumnya sebanyak-banyaknya senilai Rp140.000.000.000 menjadi sebanyak-banyaknya senilai Rp650.000.000.000
4. Perubahan periode kondisi prasyarat yang sebelumnya paling lambat pada tanggal 30 Mei 2025 menjadi paling lambat pada tanggal 31 Desember 2025 atau tanggal perpanjangan yang disepakati oleh para pihak.
5. Perubahan tanggal penyelesaian yang sebelumnya 30 Mei 2025 menjadi paling lambat pada tanggal 31 Desember 2025.
6. Perubahan harga penyetoran uang muka yang sebelumnya sebanyak-banyaknya senilai Rp140.000.000.000 menjadi sebanyak-banyaknya senilai Rp650.000.000.000
7. Perubahan tahap penyetoran yang menjadi 3 (tiga) tahap sebagai berikut; 1) Penyetoran dana sebesar Rp85.000.000.000, yang telah dibayar tanggal 18 September 2023; 2) Penyetoran dana sebesar Rp40.000.000.000, yang telah dibayarkan tanggal 26 September 2023; 3) Penyetoran dana sebesar Rp525.000.000.000, yang akan dibayarkan baik secara bertahap maupun seluruhnya selambat-lambatnya tanggal penyelesaian.
8. Penyelesaian rencana transaksi tergantung pada dipenuhinya seluruh kondisi prasyarat oleh perseroan.

Perusahaan akan melakukan akuisisi terhadap SMA apabila persyaratan dalam PPSBB telah terpenuhi. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, Perusahaan masih dalam proses pemenuhan persyaratan yang terdapat dalam PPSBB.

10. ADVANCES FOR INVESTMENT (continued)

PT Sumber Mineral Abadi ("SMA") (continued)

Based on the third addendum of PPSBB dated December 6, 2024, the changes are as follows:

1. *Change in the prerequisite period, which was previously no later than May 30, 2025 to no later than December 31, 2025, or the extension date agreed upon by the parties.*
2. *Change in the completion date, which was previously May 30, 2025 to no later than December 31, 2025.*
3. *Change in the advance payment amount, which was previously up to Rp140,000,000,000 to up to Rp650,000,000,000*
4. *Change in the prerequisite period, which was previously no later than May 30, 2025 to no later than December 31, 2025, or the extension date agreed upon by the parties.*
5. *Change in the completion date, which was previously May 30, 2025 to no later than December 31, 2025.*
6. *Change in the advance payment amount, which was previously up to Rp140,000,000,000 to up to Rp650,000,000,000*
7. *The change in the deposit stages, which are now 3 (three) stages as follows: 1) A deposit of Rp85,000,000,000 paid on September 18, 2023; 2) A deposit of Rp40,000,000,000 paid on September 26, 2023; 3) A deposit of Rp525,000,000,000 which will be paid either in stages or in full, no later than the completion date.*
8. *The completion of the transaction plan depends on the fulfillment of all the prerequisites by the company.*

The Company will make an acquisition of SMA if the requirements in the PPSBB have been fulfilled. As of the date of issuance of these consolidated financial statements, the Company is still in the process of fulfilling the requirements contained in the PPSBB.

PT PAM MINERAL TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PAM MINERAL TBK AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

11. ASET TETAP - NETO

Akun ini terdiri dari:

11. FIXED ASSETS - NET

This account consists of:

	2024				
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Saldo akhir/ Ending balance	
Harga perolehan					Acquisition cost
<u>Kepemilikan langsung</u>					<u>Direct ownership</u>
Alat Berat dan Kendaraan	47.913.554.076	-	(25.000.000)	47.888.554.076	Heavy equipment and vehicles
Dermaga	36.170.817.729	-	-	36.170.817.729	Jetty
Bangunan	8.562.922.105	801.251.000	(200.000.000)	9.164.173.105	Building
Mesin	7.787.542.886	890.395.874	-	8.677.938.760	Machineries
Peralatan kantor	12.632.742.041	756.929.138	-	13.389.671.179	Office equipment
Jalan	3.533.801.710	-	-	3.533.801.710	Road
Sub-jumlah	116.601.380.547	2.448.576.012	(225.000.000)	118.824.956.559	Sub-total
<u>Aset hak-guna</u>					<u>Right-of-use assets</u>
Bangunan	2.019.380.977	719.585.804	(1.632.380.977)	1.106.585.804	Building
Kendaraan	1.777.154.469	3.055.851.467	(2.316.422.679)	2.516.583.257	Vehicles
Sub-jumlah	3.796.535.446	3.775.437.271	(3.948.803.656)	3.623.169.061	Sub-total
Jumlah harga perolehan	120.397.915.993	6.224.013.283	(4.173.803.656)	122.448.125.620	Total acquisition cost
Akumulasi penyusutan					Accumulated Depreciation
<u>Kepemilikan langsung</u>					<u>Direct ownership</u>
Alat berat dan kendaraan	40.419.331.201	1.106.370.652	(25.000.000)	41.500.701.853	Heavy equipment and vehicles
Dermaga	28.911.672.259	419.285.407	-	29.330.957.666	Jetty
Bangunan	4.032.774.605	701.823.407	(61.666.667)	4.672.931.345	Building
Mesin	5.425.133.789	466.581.054	-	5.891.714.843	Machineries
Peralatan kantor	6.273.651.227	1.667.347.890	-	7.940.999.117	Office equipment
Jalan	3.303.510.301	42.515.337	-	3.346.025.638	Road
Sub-jumlah	88.366.073.382	4.403.923.747	(86.666.667)	92.683.330.462	Sub-total
<u>Aset hak-guna</u>					<u>Right-of-use assets</u>
Bangunan	1.046.703.127	1.289.336.380	(1.632.380.977)	703.658.530	Building
Kendaraan	836.475.610	3.265.905.278	(2.316.422.679)	1.785.958.209	Vehicles
Sub-jumlah	1.883.178.737	4.555.241.658	(3.948.803.656)	2.489.616.739	Sub-total
Jumlah akumulasi penyusutan	90.249.252.119	8.959.165.405	(4.035.470.323)	95.172.947.201	Total accumulated depreciation
Penurunan nilai	289.682.657			289.682.657	Impairment
Nilai buku neto	29.858.981.217			26.985.495.762	Net book value

	2023				
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Saldo akhir/ Ending balance	
Harga perolehan					Acquisition cost
<u>Kepemilikan langsung</u>					<u>Direct ownership</u>
Alat Berat dan Kendaraan	40.456.160.645	7.907.670.037	(450.276.606)	47.913.554.076	Heavy equipment and vehicles
Dermaga	36.170.817.729	-	-	36.170.817.729	Jetty
Bangunan	8.289.972.899	272.949.206	-	8.562.922.105	Building
Mesin	7.690.420.106	97.122.780	-	7.787.542.886	Machineries
Peralatan Kantor	11.339.028.668	1.293.713.373	-	12.632.742.041	Office equipment
Jalan	3.533.801.710	-	-	3.533.801.710	Road
Sub-jumlah	107.480.201.757	9.571.455.396	(450.276.606)	116.601.380.547	Sub-total
<u>Aset hak-guna</u>					<u>Right-of-use assets</u>
Bangunan	387.000.000	1.632.380.977	-	2.019.380.977	Building
Kendaraan	1.918.824.858	2.703.407.705	(2.845.078.094)	1.777.154.469	Vehicles
Sub-jumlah	2.305.824.858	4.335.788.682	(2.845.078.094)	3.796.535.446	Sub-total
Jumlah harga perolehan	109.786.026.615	13.907.244.078	(3.295.354.700)	120.397.915.993	Total acquisition cost

PT PAM MINERAL TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PAM MINERAL TBK AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

11. ASET TETAP - NETO (lanjutan)

11. FIXED ASSETS - NET (continued)

	2023				
	Saldo awal/ <i>Beginning balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deductions</i>	Saldo akhir/ <i>Ending balance</i>	
Akumulasi penyusutan					Accumulated depreciation
<u>Kepemilikan langsung</u>					<u>Direct ownership</u>
Alat berat dan kendaraan	39.788.610.070	860.549.815	(229.828.684)	40.419.331.201	Heavy equipment and vehicles
Dermaga	28.527.327.303	384.344.956	-	28.911.672.259	Jetty
Bangunan	3.375.311.587	657.463.018	-	4.032.774.605	Building
Mesin	4.996.114.954	429.018.835	-	5.425.133.789	Machineries
Peralatan kantor	4.579.572.633	1.694.078.594	-	6.273.651.227	Office equipment
Jalan	3.236.194.350	67.315.951	-	3.303.510.301	Road
Sub-jumlah	84.503.130.897	4.092.771.169	(229.828.684)	88.366.073.382	Sub-total
<u>Aset hak-guna</u>					<u>Right-of-use assets</u>
Bangunan	73.000.002	973.703.125	-	1.046.703.127	Building
Kendaraan	1.014.526.894	2.667.026.810	(2.845.078.094)	836.475.610	Vehicles
Sub-jumlah	1.087.526.896	3.640.729.935	(2.845.078.094)	1.883.178.737	Sub-total
Jumlah akumulasi penyusutan	85.590.657.793	7.733.501.104	(3.074.906.778)	90.249.252.119	Total accumulated depreciation
Penurunan nilai	289.682.657			289.682.657	Impairment
Nilai buku neto	23.905.686.165			29.858.981.217	Net book value

Rincian kerugian (keuntungan) atas pelepasan aset tetap adalah sebagai berikut:

Details of the loss (gain) on disposal of fixed assets are as follows:

	2024	2023	
Harga perolehan	225.000.000	450.276.606	Acquisition cost
Akumulasi penyusutan	(86.666.667)	(229.828.684)	Accumulated depreciation
Nilai buku neto	138.333.333	220.447.922	Net book value
Penerimaan kas dari penjualan aset tetap	-	(370.000.000)	Proceeds from sale of fixed assets
Kerugian (keuntungan) atas pelepasan aset tetap	138.333.333	(149.552.078)	Loss (gain) on disposal of fixed assets

Beban penyusutan dibebankan dan dialokasikan sebagai berikut:

Depreciation expense was charged and allocated as follows:

	2024	2023	
Beban pokok penjualan (Catatan 28)	1.723.992.634	1.615.092.311	Cost of goods sold (Note 28)
Beban umum dan administrasi (Catatan 29)	7.235.172.771	6.118.408.793	General and administrative expenses (Note 29)
Jumlah beban penyusutan	8.959.165.405	7.733.501.104	Total depreciation expense

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, tidak terdapat aset tetap yang dipakai sementara dan aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif dan tidak diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual.

As at December 31, 2024 and 2023, there were no temporarily idle fixed assets and fixed assets terminated from active use but were not classified as available-for-sale.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, aset tetap yang telah disusutkan penuh tetapi masih digunakan masing-masing adalah sebesar Rp77.596.586.269 dan Rp77.205.935.408.

As at December 31, 2024 and 2023, fixed assets which have been fully depreciated but are still in use amounted to Rp77,596,586,269 and Rp77,205,935,408, respectively.

Pada 2019, Grup mencatat kerugian penurunan nilai atas aset tetap berupa bangunan sesuai dengan hasil putusan perkara pembongkaran infrastruktur sebesar Rp289.682.657 (Catatan 38).

In 2019, the Group made a provision for impairment loss on fixed assets in the form of buildings in accordance with the decision for the infrastructure demolition case amounting to Rp289,682,657 (Note 38).

PT PAM MINERAL TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PAM MINERAL TBK AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

11. ASET TETAP (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, aset tetap Grup telah diasuransikan terhadap seluruh risiko kerugian dengan total pertanggungan sebesar Rp6.592.500.000. Manajemen Grup berpendapat bahwa aset tetap telah diasuransikan secara memadai pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan penurunan nilai aset tetap telah memadai.

11. FIXED ASSETS (continued)

As at December 31, 2024 and 2023, the Group's fixed assets were insured against all risks of damage, with a total coverage of approximately Rp6,592,500,000. The Group's management is of the opinion that the fixed assets were adequately insured as at December 31, 2024 and 2023.

As at December 31, 2024 and 2023, management believes that the allowance for impairment of fixed assets is adequate.

12. PROPERTI PERTAMBANGAN - NETO

Akun ini terdiri dari:

	2024	2023
<u>Harga perolehan:</u>		
Tambang berproduksi:		
Saldo awal	82.479.057.688	44.261.438.688
Penambahan	6.990.771.657	38.217.619.000
Jumlah harga perolehan	89.469.829.345	82.479.057.688
<u>Akumulasi amortisasi:</u>		
Saldo awal	(28.481.614.598)	(19.867.349.910)
Penambahan (Catatan 28)	(6.122.598.647)	(8.614.264.688)
Jumlah akumulasi amortisasi	(34.604.213.245)	(28.481.614.598)
Properti pertambangan - neto	54.865.616.100	53.997.443.090

12. MINING PROPERTIES - NET

This account consists of:

<u>Acquisition cost:</u>
Mine in production:
Beginning balance
Additions
Total acquisition cost
<u>Accumulated amortization:</u>
Beginning balance
Additions (Note 28)
Total accumulated amortization
Mining properties - net

13. ASET TAKBERWUJUD - NETO

Akun ini terdiri dari:

	2024	
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions
Harga perolehan		Saldo akhir/ Ending balance
Peranti lunak	-	3.502.114.125
Akumulasi amortisasi		
Peranti lunak	-	(510.724.977)
Nilai buku neto	-	2.991.389.148

13. INTANGIBLE ASSETS - NET

This account consists of:

Acquisition cost
Software
Accumulated amortization
Software
Net book value

Aset takberwujud merupakan perangkat lunak yang digunakan Grup untuk menjalankan kegiatan operasionalnya. Seluruh beban amortisasi telah dibebankan pada beban umum dan administrasi (Catatan 29).

Berdasarkan hasil penelaahan yang dilakukan oleh manajemen, tidak terdapat kemungkinan kejadian atau perubahan atas keadaan yang menunjukkan adanya penurunan nilai aset takberwujud pada tanggal pelaporan.

Intangible asset represents software used by the Group to conduct its operational activities. All amortization expense was charged to general and administrative expenses (Note 29).

Based on management's review, there may no events or changes in circumstances that may indicate an impairment of intangible assets as at reporting date.

PT PAM MINERAL TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PAM MINERAL TBK AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

14. DEPOSITO BERJANGKA YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA

Akun ini terdiri dari:

	2024
<u>Rupiah:</u>	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	20.561.068.282
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara	3.875.507.985
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	200.000.000
Jumlah	24.636.576.267

Rincian deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya adalah sebagai berikut:

	2024
Jaminan reklamasi	18.851.877.449
Jaminan pascatambang	5.784.698.818
Jumlah	24.636.576.267

Deposito berjangka terbatas ditempatkan sebagai jaminan untuk kegiatan rehabilitasi tambang, reklamasi dan pascatambang (Catatan 32).

Suku bunga kontraktual pada deposito berjangka terbatas berkisar antara 2,25% hingga 2,50% dan 2,25% hingga 2,70% pada tahun 2024 dan 2023.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, seluruh deposito berjangka yang dibatasi ditempatkan pada pihak ketiga.

14. RESTRICTED TIME DEPOSITS

This account consists of:

	2023	<u>Rupiah:</u>
		PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
		PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara
		PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
		Total
	14.507.507.897	

Detail of restricted time deposits are as follows:

	2023	
	13.328.821.144	Reclamation guarantees
	1.178.686.753	Post-mining guarantees
	14.507.507.897	Total

The restricted time deposits are placed as guarantee for mine rehabilitation, reclamation and post-mining activities (Note 32).

The contractual interest rates on restricted time deposits range from 2.25% to 2.50% and 2.25% to 2.70% in 2024 and 2023.

As at December 31, 2024 and 2023, all restricted time deposits are placed with third parties.

15. PERPAJAKAN

a. Utang pajak

Akun ini terdiri dari:

	2024
<u>PAM</u>	
Pajak lain-lain:	
Pasal 21	1.852.943.265
Pasal 23	830.490.014
Pasal 15	1.919.982
Pasal 4(2)	-
Sub-jumlah	2.685.353.261

15. TAXATION

a. Taxes payable

This account consists of:

	2023	<u>PAM</u>
		Other taxes:
	334.735.715	Article 21
	354.105.321	Article 23
	4.953.432	Article 15
	31.375.120	Article 4 (2)
	725.169.588	Sub-total

PT PAM MINERAL TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PAM MINERAL TBK AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

15. PERPAJAKAN (lanjutan)

Akun ini terdiri dari: (lanjutan)

a. Utang pajak (lanjutan)

	2024	2023	
Saldo dipindahkan	2.685.353.261	725.169.588	Transferred balance
<u>Entitas anak</u>			<u>Subsidiary</u>
Pajak pertambahan nilai	7.721.938	3.138.406	Value added tax
Pajak penghasilan:			Income taxes:
Pasal 29	66.985.118.341	8.081.736.562	Article 29
Pasal 25	673.478.053	-	Article 25
Sub-jumlah	67.658.596.394	8.081.736.562	Sub-total
Pajak lain-lain:			Other taxes:
Pasal 23	689.381.445	1.836.869.956	Article 23
Pasal 21	571.680.434	121.603.001	Article 21
Pasal 15	38.382.943	38.709.263	Article 15
Pasal 4 (2)	13.828.857	368.262.060	Article 4 (2)
Pasal 26	-	1.647.818	Article 26
Denda pajak	-	1.037.376	Tax penalties
Sub-jumlah	1.313.273.679	2.368.129.474	Sub-total
Jumlah	71.664.945.272	11.178.174.030	Total

b. Beban pajak penghasilan

Akun ini terdiri dari:

15. TAXATION (continued)

This account consists of: (continued)

a. Taxes payable (lanjutan)

b. Income tax expense

This account consists of:

	2024	2023	
<u>PAM</u>			<u>PAM</u>
(Beban) manfaat pajak tangguhan	(6.541.921.760)	10.264.476.905	Deferred tax (expenses) benefit
<u>Entitas anak:</u>			<u>Subsidiary:</u>
Pajak kini	(89.840.300.000)	(29.842.851.720)	Current tax expense
Manfaat pajak tangguhan	60.535.833	49.318.108	Deferred tax benefit
Sub-jumlah	(89.779.764.167)	(29.793.533.612)	Sub-total
Jumlah beban pajak penghasilan	(96.321.685.927)	(19.529.056.707)	Total income tax expense

PT PAM MINERAL TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PAM MINERAL TBK AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

15. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Beban pajak penghasilan (lanjutan)

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak penghasilan seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan taksiran rugi fiskal Perusahaan adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Laba sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	415.079.209.052	46.664.087.053
Laba sebelum pajak penghasilan Entitas Anak	(399.773.242.333)	(121.380.394.546)
Laba (rugi) sebelum pajak Perusahaan	15.305.966.719	(74.716.307.493)
<u>Beda waktu:</u>		
Imbalan kerja	1.863.688.195	1.733.407.421
<u>Beda tetap:</u>		
Pendapatan yang dikenakan pajak final	(285.008.662)	(88.636.554)
Sumbangan dan jamuan	2.730.230.082	3.340.941.251
Pajak	11.337.702.142	3.467.588.296
Lain-lain	647.117.720	534.026.000
Sub-jumlah	14.430.041.282	7.253.918.993
Taksiran laba (rugi) fiskal tahun berjalan	31.599.696.196	(65.728.981.079)
Akumulasi rugi fiskal yang dapat dikompensasikan	(147.424.620.463)	(81.695.639.384)
Estimasi rugi fiskal kumulatif	(115.824.924.267)	(147.424.620.463)
Beban pajak penghasilan kini	-	-

Rincian kompensasi rugi fiskal adalah sebagai berikut:

	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan (digunakan)/ Addition (utilization)	Kedaluwarsa/ Expired	Saldo akhir/ Ending balance	
31 Desember 2019	38.005.957.148	10.746.092.164	-	48.752.049.312	December 31, 2019
31 Desember 2020	48.752.049.312	11.692.322.833	-	60.444.372.145	December 31, 2020
31 Desember 2021	60.444.372.145	14.186.775.171	(1.886.262.988)	72.744.884.328	December 31, 2021
31 Desember 2022	72.744.884.328	45.070.449.216	(15.273.623.960)	102.541.709.584	December 31, 2022
31 Desember 2023	102.541.709.584	65.728.981.079	(20.846.070.200)	147.424.620.463	December 31, 2023
31 Desember 2024	147.424.620.463	(31.599.696.196)	-	115.824.924.267	December 31, 2024

15. TAXATION (continued)

b. Income tax expense (lanjutan)

Reconciliation between profit before income tax expense as presented in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income and the Company estimated fiscal loss is as follows:

Profit before income tax expense per consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income
Profit before income tax of Subsidiary
Profit (loss) before tax of the Company
<u>Temporary differences:</u>
Employee benefits expense
<u>Permanent differences:</u>
Income subject to final tax
Donations and entertainment
Tax
Others
Sub-total
Estimated taxable income (loss) in the current year
Accumulated fiscal losses that can be compensated
Estimated cumulative fiscal losses
Current income tax expense

Detail of fiscal loss compensation are as follows:

PT PAM MINERAL TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PAM MINERAL TBK AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

15. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Beban pajak penghasilan (lanjutan)

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan dan jumlah yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atas laba sebelum beban pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	415.079.209.052	46.664.087.053
Laba sebelum pajak penghasilan Entitas Anak	(399.773.242.333)	(121.380.394.546)
Laba (rugi) sebelum pajak Perusahaan	15.305.966.719	(74.716.307.493)
Beban pajak penghasilan pada tarif pajak yang berlaku	3.367.312.678	(16.437.587.648)
Pengaruh pajak atas beda tetap	3.174.609.082	1.595.862.178
Penyesuaian atas pajak tangguhan tahun lalu	-	(8.886.879)
Pengaruh pajak atas kedaluwarsa rugi fiskal	-	4.586.135.444
Beban (manfaat) pajak penghasilan Perusahaan	6.541.921.760	(10.264.476.905)
Pajak penghasilan entitas anak	89.779.764.167	29.793.533.612
Beban pajak penghasilan	96.321.685.927	19.529.056.707

Perhitungan pajak PAM di atas menjadi dasar dalam perhitungan sementara, di mana perhitungan final dan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") untuk tahun pajak dilakukan setelah berakhirnya tahun pajak.

c. Pajak tangguhan

Detail aset pajak tangguhan Grup adalah sebagai berikut:

Aset pajak tangguhan/ <i>Deferred tax assets</i>	1 Januari/ <i>January 1, 2024</i>	Dikreditkan (dibebankan) pada laba rugi/ <i>Credited (charged) in profit or loss</i>	Dikreditkan pada penghasilan komprehensif lain/ <i>Credited in other comprehensive income</i>	31 Desember/ <i>December 31, 2024</i>
Liabilitas imbalan kerja karyawan/ <i>Employee benefits liabilities</i>	2.669.555.380	491.729.435	(11.707.282)	3.149.577.533
Rugi fiskal/ <i>Fiscal loss</i>	32.433.416.501	(6.951.933.163)	-	25.481.483.338
Cadangan penurunan nilai/ <i>Allowance for impairment losses</i>	63.730.185	-	-	63.730.185
Penyusutan/ <i>Depreciation</i>	(38.186.278)	(21.182.199)	-	(59.368.477)
Jumlah/ Total	35.128.515.788	(6.481.385.927)	(11.707.282)	28.635.422.579

15. TAXATION (continued)

b. Income tax expense (continued)

A reconciliation between income tax expense and the amounts calculated by applying the effective tax rates to profit before income tax expense is as follows::

Profit before income tax expense per consolidated statement profit or loss and other comprehensive income
Profit before income tax of Subsidiary
Profit (loss) before tax of the Company
Income tax expense (benefit) at applicable tax rates
Tax effect of permanent differences
Adjustment in respect of deferred tax of prior years
Tax effect of expired of fiscal loss
Income tax expense (benefit) of the Company
Income tax expense of Subsidiary
Income tax expense

The PAM's tax calculation above becomes the basis in the provisional calculation, where the final calculation and submission of the Annual Tax Return ("ATR") for the tax year are carried out after the tax year ends.

c. Deferred tax

Details of the Group's deferred tax assets are as follows:

PT PAM MINERAL TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PAM MINERAL TBK AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

15. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Pajak tangguhan (lanjutan)

Aset pajak tangguhan/ Deferred tax assets	1 Januari/ January 1, 2023	Dikreditkan (dibebankan) pada laba rugi/ Credited (charged) in profit or loss	Dikreditkan pada penghasilan komprehensif lain/ Credited in other comprehensive income	31 Desember/ December 31, 2023
Liabilitas imbalan kerja karyawan/ Employee benefits liabilities	2.438.058.401	458.091.902	(226.594.923)	2.669.555.380
Rugi fiskal/ Fiscal loss	22.559.176.108	9.874.240.393	-	32.433.416.501
Cadangan penurunan nilai/ Allowance for impairment losses	63.730.185	-	-	63.730.185
Penyusutan/ Depreciation	(11.587.988)	(26.598.290)	-	(38.186.278)
Jumlah/ Total	25.049.376.706	10.305.734.005	(226.594.923)	35.128.515.788

d. Administrasi pajak di Indonesia

Undang-undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia mengatur bahwa masing-masing entitas dalam Grup menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang secara individu. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Direktur Jenderal Pajak (DJP) dapat menetapkan atau mengubah jumlah pajak terutang dalam jangka waktu tertentu. Jangka waktu tersebut adalah lima tahun sejak saat terutangnya pajak.

15. TAXATION (continued)

c. Deferred tax (continued)

Aset pajak tangguhan/ Deferred tax assets	1 Januari/ January 1, 2023	Dikreditkan (dibebankan) pada laba rugi/ Credited (charged) in profit or loss	Dikreditkan pada penghasilan komprehensif lain/ Credited in other comprehensive income	31 Desember/ December 31, 2023
Liabilities employee benefits	2,438,058,401	458,091,902	(226,594,923)	2,669,555,380
Fiscal loss	22,559,176,108	9,874,240,393	-	32,433,416,501
Allowance for impairment losses	63,730,185	-	-	63,730,185
Depreciation	(11,587,988)	(26,598,290)	-	(38,186,278)
Total	25,049,376,706	10,305,734,005	(226,594,923)	35,128,515,788

d. Tax administration in Indonesia

The taxation laws of Indonesia require that each company in the Group within Indonesia submits individual tax returns on the basis of self-assessment. Under prevailing regulations the Director General of Tax (DGT) may assess or amend taxes within a certain period. This period is within five years of the time the tax becomes due.

16. UTANG USAHA

Akun ini terdiri dari:

	2024	2023	
Pihak ketiga			Third parties
Rupiah	55.999.290.181	38.454.926.367	Rupiah
Jumlah	55.999.290.181	38.454.926.367	Total

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, seluruh nilai tercatat utang usaha berdenominasi Rupiah.

16. TRADE PAYABLES

This account consists of:

As at December 31, 2024 and 2023, all the Group's trade payables are denominated in Rupiah.

17. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

Akun ini terdiri dari:

	2024	2023	
Jasa kontraktor	10.152.708.358	37.089.299.507	Contractor services
Royalti	2.522.167.024	2.185.288.589	Royalty
Jasa profesional	821.899.665	1.105.579.300	Professional services
Independen surveyor	33.328.338	13.748.464	Independent surveyor
Lain-lain	5.991.110.641	3.474.276.730	Others
Jumlah	19.521.214.026	43.868.192.590	Total

17. ACCRUED EXPENSES

This account consists of:

PT PAM MINERAL TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PAM MINERAL TBK AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

18. UTANG SEWA PEMBIAYAAN KONSUMEN

Akun ini terdiri dari:

	2024
PT Maybank Indonesia Finance	2.090.410.952
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam waktu satu tahun	<u>(1.783.892.442)</u>
Bagian jangka panjang - neto	<u>306.518.510</u>

PT Maybank Indonesia Finance

Berdasarkan perjanjian No. 51501230709 tanggal 17 Maret 2023, IBM memperoleh pembiayaan untuk pembelian kendaraan yang akan jatuh tempo pada tanggal 17 Februari 2026 dengan tingkat suku bunga 5,57% per tahun.

18. CONSUMER FINANCING PAYABLE

This account consists of:

	2023	
	3.783.149.066	PT Maybank Indonesia Finance
	<u>(1.692.738.151)</u>	Less current maturities
	<u>2.090.410.915</u>	Long term portion - net

PT Maybank Indonesia Finance

Based on agreement No. 51501230709 dated March 17, 2023, IBM obtained financing for the purchase of vehicles which will mature on February 17, 2026 with an interest rate of 5.57% per annum.

19. PROVISI PEMBONGKARAN, REHABILITASI, REKLAMASI, DAN PENUTUPAN TAMBANG

Akun ini terdiri dari:

	2024
Provisi pembongkaran, rehabilitasi, reklamasi dan penutupan tambang	<u>6.340.771.657</u>

Provisi pembongkaran, rehabilitasi, reklamasi dan penutupan tambang merupakan provisi yang dibuat oleh Perusahaan untuk memenuhi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.59/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 dan PP No. 78 Tahun 2010 untuk rehabilitasi daerah aliran sungai, aktivitas reklamasi dan pascatambang atas usaha penambangan nikel.

Penyisihan tersebut dihitung secara internal oleh manajemen menggunakan asumsi utama seperti tingkat inflasi dan tingkat diskonto.

Manajemen berkeyakinan bahwa keseluruhan provisi pembongkaran, rehabilitasi, reklamasi dan penutupan tambang pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 telah cukup untuk memenuhi kewajiban sebagaimana yang diatur pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan PP No. 78.

19. PROVISION FOR DECOMMISSIONING, MINE REHABILITATION, RECLAMATION AND CLOSURE

This account consists of:

	2023	
	-	Provision for decommissioning, mine rehabilitation, reclamation and closure

Provision for decommissioning, mine rehabilitation, reclamation and closure represents the provision set up by the Group to comply with the Ministerial Regulation of Environment and Forestry No. P.59/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 and GR No. 78 Year 2010 for rehabilitation of the watershed area, reclamation and post-mining activities for the nickel mining business.

The provision was internally calculated by management using key assumptions such as inflation rate and discount rate.

Management believes that the provision for decommissioning, mine rehabilitation, reclamation and closure as at December 31, 2024 and 2023 is sufficient to meet the obligations as stipulated in the Minister of Environment and Forestry Regulation and GR No. 78.

PT PAM MINERAL TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PAM MINERAL TBK AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

20. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN

Akun ini terdiri dari:

	2024
<u>Liabilitas jangka pendek</u>	
Imbalan kerja karyawan PKWT	724.141.835
<u>Liabilitas jangka panjang</u>	
Imbalan pasca kerja	14.316.261.511
Jumlah	15.040.403.346

Liabilitas Jangka Pendek

Imbalan kerja jangka pendek adalah imbalan kerja karyawan kontrak ("PKWT") yang berasal dari penerapan PP No. 35 Tahun 2021 mengenai "Perjanjian Kerja Waktu Tertentu".

Pada tahun 2024 dan 2023, beban imbalan kerja terkait PKWT masing-masing sebesar Rp724.141.835 dan nihil termasuk dalam beban pokok penjualan (Catatan 28).

Liabilitas Jangka Panjang

Grup menyediakan imbalan pasti berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang ditentukan berdasarkan masa kerja dan gaji karyawan. Liabilitas imbalan kerja tidak didanai.

Program imbalan pasti mengakibatkan eksposur Grup terhadap risiko aktuarial seperti risiko tingkat bunga, risiko harapan hidup dan risiko gaji.

a. Risiko tingkat bunga

Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program.

b. Risiko Harapan Hidup

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada estimasi terbaik dari mortalitas peserta program baik selama dan setelah kontrak kerja. Peningkatan harapan hidup peserta program akan meningkatkan liabilitas program.

c. Risiko Gaji

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu.

20. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES

This account consists of:

	2023	
		<u>Current liabilities</u>
	-	Employee benefits of PKWT
		<u>Non-current liabilities</u>
	12.134.342.634	Post-employment benefits
	12.134.342.634	Total

Current Liabilities

The employee benefits on contractual employees ("PKWT") resulted from the application of PP No. 35 Year 2021 regarding "Work Agreement for Specific Time".

In 2024 and 2023, employee benefit expense related to PKWT amounting to Rp724,141,835 and nil was included in cost of goods sold, respectively (Note 28).

Non-Current Liabilities

The Group provides defined benefits required under the Labor Law determined based on years of services and salaries of the employees. The employee benefits liability is unfunded.

The defined benefit plan typically exposes the Group to actuarial risks such as: interest rate risk, longevity risk and salary risk.

a. Interest risk

A decrease in the bond interest rate will increase the plan liability.

b. Longevity risk

The present value of the defined benefit plan liability is calculated by reference to the best estimate of the mortality of plan participants both during and after their employment. An increase in the life expectancy of the plan participants will increase the plan's liability.

c. Salary risk

The present value of the defined benefit plan liability is calculated by reference to the future salaries of plan participants. As such, an increase in the salary of the plan participants will increase the plan's liability.

PT PAM MINERAL TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PAM MINERAL TBK AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

20. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN
(lanjutan)

Perhitungan imbalan pasca kerja dihitung oleh aktuaris independen KKA Marcel Pryadarshi Soepeno. Asumsi-asumsi aktuarial utama yang digunakan adalah sebagai berikut:

	2024
Tingkat diskonto	7,10%
Tingkat kenaikan gaji	7,00%-8,00%
Tabel mortalitas	TMI-IV
Tingkat cacat	5% dari/from TMI-IV
Usia pensiun normal (tahun)	59

Beban imbalan pasti yang diakui di penghasilan komprehensif adalah sebagai berikut:

	2024
Biaya jasa:	
Biaya jasa kini	1.462.896.072
Biaya bunga	834.214.418
Komponen dari biaya imbalan pasti yang diakui dalam laba rugi	2.297.110.490
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti - neto:	
Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	(53.214.917)
Jumlah	2.243.895.573

Beban imbalan kerja dialokasi sebagai berikut:

	2024
Beban pokok penjualan (Catatan 28)	345.411.132
Beban umum dan administrasi (Catatan 29)	1.951.699.358
Saldo akhir	2.297.110.490

Mutasi nilai kini kewajiban imbalan pasti adalah:

	2024
Saldo awal	12.134.342.634
Biaya jasa kini	1.462.896.072
Beban bunga	834.214.418
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	(53.214.917)
Pembayaran pesangon	(61.976.696)
Saldo akhir	14.316.261.511

20. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

The cost of providing post-employment benefits is calculated by independent actuary, KKA Marcel Pryadarshi Soepeno. The key actuarial assumptions used are as follows:

	2023	
6,80%-6,90%		Discount rate
7,00%-8,00%		Salary increment rate
TMI-IV		Mortality table
5% dari/from TMI-IV		Disability rate
57		Normal retirement age (years)

Amounts recognized in comprehensive income in respect of the defined benefit plans are as follows:

	2023	
1.352.983.810		Service cost:
809.266.185		Current services cost
		Interest cost
2.162.249.995		Components of defined benefit costs recognized in profit or loss
(1.029.976.920)		Remeasurement on the net defined benefit liability:
		Actuarial gains and losses arising from changes in financial assumptions
1.132.273.075		Total

The employee benefits expense was allocated as follows:

	2023	
399.015.983		Cost of goods sold (Note 28)
1.763.234.012		General and administrative expenses (Note 29)
2.162.249.995		Ending balance

Movements in the present value of the defined benefit obligation are as follows:

	2023	
11.085.838.151		Beginning balance
1.352.983.810		Current service cost
809.266.185		Interest cost
(1.029.976.920)		Remeasurement employee benefits liabilities
(83.768.592)		Benefits paid
12.134.342.634		Ending balance

PT PAM MINERAL TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PAM MINERAL TBK AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

20. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)

Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan kewajiban imbalan pasti adalah tingkat diskonto dan kenaikan gaji yang diharapkan. Sensitivitas analisis di bawah ini ditentukan berdasarkan masing-masing perubahan asumsi yang mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan, dengan semua asumsi lain konstan.

Sensitivitas liabilitas imbalan pasti terhadap perubahan asumsi utama tertimbang adalah sebagai berikut:

	2024	
	Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan/ Employee Benefits Liability	Beban Jasa Kini/ Current Service Cost
Penurunan tingkat diskonto 1%	1.972.535.945	140.352.781
Penurunan tingkat kenaikan gaji 1%	2.388.933.240	83.972.426
Peningkatan tingkat diskonto 1%	2.370.344.008	81.200.605
Peningkatan tingkat kenaikan gaji 1%	1.954.583.110	136.736.372

	2023	
	Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan/ Employee Benefits Liability	Beban Jasa Kini/ Current Service Cost
Penurunan tingkat diskonto 1%	1.740.586.285	(4.403.439.030)
Penurunan tingkat kenaikan gaji 1%	1.406.432.554	(3.715.953.381)
Peningkatan tingkat diskonto 1%	1.414.335.807	(3.714.380.507)
Peningkatan tingkat kenaikan gaji 1%	1.721.648.944	(4.420.161.538)

Analisis sensitivitas yang disajikan di atas mungkin tidak mewakili perubahan yang sebenarnya dalam kewajiban imbalan pasti mengingat bahwa perubahan asumsi terjadinya tidak terisolasi satu sama lain karena beberapa asumsi tersebut mungkin berkorelasi.

Selanjutnya, dalam menyajikan analisis sensitivitas di atas, nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* pada akhir periode pelaporan, yang sama dengan yang diterapkan dalam menghitung liabilitas manfaat pasti yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Tidak ada perubahan dalam metode dan asumsi yang digunakan dalam penyusunan analisis sensitivitas.

20. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

Significant actuarial assumptions for the determination of the defined benefit obligation are discount rate and expected salary increase. The sensitivity analyses below have been determined based on reasonably possible changes of the respective assumptions occurring at the end of the reporting period, while holding all other assumptions constant.

The sensitivity of the defined benefit obligation to changes in significant key assumptions is as follows:

	2024	
	Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan/ Employee Benefits Liability	Beban Jasa Kini/ Current Service Cost
Penurunan tingkat diskonto 1%	1.972.535.945	140.352.781
Penurunan tingkat kenaikan gaji 1%	2.388.933.240	83.972.426
Peningkatan tingkat diskonto 1%	2.370.344.008	81.200.605
Peningkatan tingkat kenaikan gaji 1%	1.954.583.110	136.736.372

	2023	
	Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan/ Employee Benefits Liability	Beban Jasa Kini/ Current Service Cost
Penurunan tingkat diskonto 1%	1.740.586.285	(4.403.439.030)
Penurunan tingkat kenaikan gaji 1%	1.406.432.554	(3.715.953.381)
Peningkatan tingkat diskonto 1%	1.414.335.807	(3.714.380.507)
Peningkatan tingkat kenaikan gaji 1%	1.721.648.944	(4.420.161.538)

The sensitivity analysis presented above may not be representative of the actual change in the defined benefit obligation as it is unlikely that the change in assumptions would occur in isolation of one another as some of the assumptions may be correlated.

Furthermore, in presenting the above sensitivity analysis, the present value of the defined benefit obligation has been calculated using the projected unit credit method at the end of the reporting period, which is the same as that applied in calculating the defined benefit obligation liability recognized in the consolidated statement of financial position.

There was no change in the methods and assumptions used in preparing the sensitivity analysis.

PT PAM MINERAL TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PAM MINERAL TBK AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

20. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)

Rincian jatuh tempo liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Kurang dari 1 tahun	338.224.622	461.940.471
Antara 1 tahun dan 5 tahun	11.261.433.823	10.547.234.808
Antara 5 tahun dan 10 tahun	8.091.732.688	16.067.596.011
Lebih dari 10 tahun	56.377.724.340	37.601.393.880
Jumlah	76.069.115.473	64.678.165.170

20. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

The maturity profile of defined benefit obligation as at December 31, 2024 and 2023 are as follows:

Less than 1 year
Between 1 year and 5 years
Between 5 years and 10 years
More than 10 years

Total

21. MODAL SAHAM

Susunan pemegang saham Perusahaan dan kepemilikan sahamnya berdasarkan catatan yang dibuat oleh PT Bima Registra, biro administrasi efek periode 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

21. SHARE CAPITAL

The composition of the Company's shareholders and their share ownership based on records maintained by PT Bima Registra, securities administration agency for the period 31 December 2024 and 2023 are as follows:

	Jumlah Saham/ Number of Shares	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Nilai/ Amount	
PT PAM Metalindo	4.597.500.000	43,23%	91.950.000.000	PT PAM Metalindo
PT Artha Perdana Investama	3.065.000.000	28,82%	61.300.000.000	PT Artha Perdana Investama
Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)	2.973.144.907	27,95%	59.462.898.140	Public (each below 5%)
Jumlah	10.635.644.907	100,00%	212.712.898.140	Total

Berdasarkan Akta Notaris No. 180 tanggal 18 April 2023 dari Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta. Akta perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0057849 tanggal 27 April 2023.

Based on the Deed No. 180 dated April 18, 2023 of Notary Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notary in Jakarta. The amendment deed has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0057849 dated April 27, 2023.

Para pemegang saham Perusahaan telah menyetujui:

The shareholders of the Company have approved:

1. Mengeluarkan saham dalam simpanan/ portepel Perusahaan dan menawarkan/ menjual saham baru dari portepel melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 2.000.000.000 (dua miliar) saham baru dengan nilai nominal masing-masing Rp20 (dua puluh Rupiah);
2. Menerbitkan Waran Seri I sebanyak-banyaknya 2.600.000.000 (dua miliar enam ratus juta) secara cuma-cuma yang menyertai saham biasa atas nama yang ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum dan dapat dialihkan dan/ atau diperjualbelikan secara terpisah dari saham baru;
3. Mencatat seluruh saham Perusahaan melalui Penawaran Umum, waran seri I dan hasil pelaksanaan waran seri I, pada Bursa Efek Indonesia;

1. Issuance of shares in the Company's depository/ portfolio and offer/ sell new shares from the portfolio through a Public Offering to the public for a maximum amount of 2,000,000,000 (two billion) new shares with a nominal value of Rp20 (twenty Rupiah) each;
2. Issuance of Warrants Series I of up to 2,600,000,000 (two billion six hundred million) free of charge accompanying the ordinary shares offered to the public through the Public Offering and can be transferred and/ or traded separately from the new shares;
3. Listing all of the Company's shares through the Public Offering, Warrants Series I and the proceeds from the exercise of Warrants Series I, on the Indonesia Stock Exchange;

PT PAM MINERAL TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PAM MINERAL TBK AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

21. MODAL SAHAM (lanjutan)

Para pemegang saham Perusahaan telah menyetujui: (lanjutan)

4. Penitipan kolektif yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia; dan
5. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada direksi Perusahaan sehubungan dengan Penawaran Umum saham, penerbitan waran seri I, pengeluaran waran seri I kepada masyarakat melalui pasar modal.

Dalam rangka pelaksanaan Waran Seri I yang telah dikeluarkan oleh Perusahaan, pemegang saham dari masyarakat saham dapat menebus waran menjadi lembar saham. Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, masyarakat telah menebus/ melakukan konversi waran Seri I menjadi saham sebanyak 973.128.850 saham atau setara dengan Rp19.462.577.000. Selisih antara jumlah dana yang diterima dengan jumlah konversi waran telah diakui dan dicatat pada tambahan modal disetor.

Pembelian kembali ini ditujukan untuk pelaksanaan program imbalan berbasis saham untuk karyawan eksekutif yang dimiliki Perusahaan. Perusahaan memiliki hak untuk menerbitkan kembali saham-saham tersebut di masa mendatang. Seluruh saham yang diterbitkan perusahaan telah disetor penuh.

21. SHARE CAPITAL (continued)

The shareholders of the Company have approved: (continued)

4. Register the Company's shares in collective custody in accordance with the prevailing laws and regulations in the Indonesian Capital Market; and
5. Granting authority and power to the board of directors of the company in connection with the Public Offering of shares, issuance of series I warrants, issuance of series I warrants to the public through the capital market.

In order to exercise the Warrants Series I issued by the Company, shareholders of public can redeem the warrants into shares. During the year ended December 31, 2023, the public redeemed/converted 973,128,850 Warrants Series I into shares or the equivalent of Rp19,462,577,000. The difference between the amount of cash received and the amount of warrant conversion has been recognized and recorded as additional paid-in-capital.

This repurchase transaction was intended for the execution of share-based payment program for executive employee of the Company. The Company has the right to re-issue these shares at a later date. All shares issued by the Company were fully paid.

22. TAMBAHAN MODAL DISETOR

Akun ini terdiri dari:

	2024	2023
Agio saham terkait dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perusahaan	160.000.000.000	160.000.000.000
Penerbitan waran seri I	272.472.502.956	272.472.502.956
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali (Catatan 5)	(1.591.868.324)	(1.591.868.324)
Biaya emisi terkait dengan penawaran Umum Perdana Saham Perusahaan	(4.863.492.159)	(4.863.492.159)
Sub-jumlah	426.017.142.473	426.017.142.473
Pengampunan pajak	100.000.000	100.000.000
Jumlah	426.117.142.473	426.117.142.473

Berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak No. KET-22708/PP/WPJ.06/2016 tanggal 8 November 2016, PAM telah mengikuti program pengampunan pajak berupa uang tunai sebesar Rp100.000.000.

22. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

This account consists of:

Additional paid-in capital related to Initial Public Offering of the Company's Shares Warrant Series I exercise Difference in value arising from restructuring transaction of entity under common control (Note 5) Share issuance cost related to Initial Public Offering of the Company's shares Sub-total Tax amnesty Total

Based on the Tax Amnesty Certificate No. KET-22708/PP/WPJ.06/2016 dated November 8, 2016, PAM has participated in the tax amnesty program in the form of cash amounting to Rp100,000,000.

23. SALDO LABA

Undang-undang Perseroan Terbatas Republik Indonesia No. 1/1995 yang diterbitkan di bulan Maret 1995 dan telah diubah dengan Undang-undang No. 40/2007 yang diterbitkan pada bulan Agustus 2007, mengharuskan pembentukan cadangan umum dari laba neto sejumlah minimal 20% dari jumlah modal Perseroan yang ditempatkan dan disetor penuh. Undang-undang tersebut tidak mengatur jangka waktu untuk pembentukan penyisihan tersebut.

Berdasarkan rapat umum pemegang saham tahunan yang diaktakan berdasarkan Akta Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., No. 12 tanggal 3 Mei 2023, pemegang saham menyetujui dan menerima penggunaan sebagian dari laba bersih Perusahaan selama tahun buku yang berakhir pada tahun 31 Desember 2022 sebesar Rp15.000.000.000 sebagai dana cadangan.

Berdasarkan rapat umum pemegang saham tahunan yang diaktakan berdasarkan Akta Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., No. 171 tanggal 29 Mei 2024, pemegang saham menyetujui dan menerima penggunaan sebagian dari laba bersih Perusahaan selama tahun buku yang berakhir pada tahun 31 Desember 2023 sebesar Rp5.000.000.000 sebagai dana cadangan.

24. DIVIDEN

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan tanggal 3 Mei 2023, para pemegang saham menyetujui pembagian dividen kas final untuk tahun 2022 sejumlah Rp29.173.429.377 atau Rp3 per saham biasa. Dividen kas tersebut telah dibayarkan pada tanggal 30 dan 31 Mei 2023.

Berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan No. 176/PAM-Mineral/JKT/Kep-Dir/XI/2023 tanggal 13 November 2023, seluruh Dewan Direksi dan Dewan Komisaris menyetujui usulan untuk melakukan pembagian dividen kas interim berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian per tanggal 30 September 2023 sejumlah Rp42.541.200.143 atau Rp4 per saham biasa. Dividen kas tersebut telah dibayarkan pada tanggal 30 November 2023 dan 1 Desember 2023.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan tanggal 29 Mei 2024, para pemegang saham menyetujui pembagian dividen kas final untuk tahun 2023 sejumlah Rp37.224.610.205 atau Rp3 per saham biasa. Dividen kas tersebut telah dibayarkan pada tanggal 14 Juni 2024 dan 19 Juni 2024.

23. RETAINED EARNINGS

The Republic of Indonesia Limited Liability Law No. 1/1995 issued in March 1995 and amended by Law No. 40/2007 issued in August 2007, requires the formation of a general reserve of net profit of at least 20% of the total issued and fully paid capital of the Company. The law does not regulate the time period for the establishment of the reserve.

Based on the annual general meeting of shareholders notarized under Notarial Deed Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., No. 12 dated May 3, 2023, the shareholders approved and accepted the use of part of the Company's net profit during the fiscal year ended December 31, 2022 amounting to Rp15,000,000,000 as a reserve fund.

Based on the annual general meeting of shareholders notarized under Notarial Deed Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., No. 171 dated May 29, 2024, the shareholders approved and accepted the use of part of the Company's net profit during the fiscal year ended December 31, 2023 amounting to Rp5,000,000,000 as a reserve fund.

24. DIVIDENDS

Based on the Company's Annual General Meeting of Shareholders held on May 3, 2023, the shareholders approved to distribute final cash dividends for 2022 amounting to Rp29,173,429,377 or Rp3 per ordinary share. The cash dividends have been paid on May 30 and 31, 2023.

Based on the Decision of the Board of Directors of the Company No. 176/PAM-Mineral/JKT/Kep-Dir/XI/2023 dated November 13, 2023, all member of the Board of Directors and Commissioners have approved the proposal interim to distribute final cash dividends based on the Consolidated Financial Statements as at September 30, 2023 in the amount of Rp42,541,200,143 or Rp4 per common share. The cash dividends were paid on November 30, 2023 and December 1, 2023.

Based on the Company's Annual General Meeting of Shareholders held on May 29, 2024, the shareholders approved to distribute final cash dividends for 2023 amounting to Rp37,224,610,205 or Rp3 per ordinary share. The cash dividends have been paid on June 14, 2024 and June 19, 2024.

PT PAM MINERAL TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PAM MINERAL TBK AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

24. DIVIDEN (lanjutan)

Berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan No. 020/PAM-Mineral/JKT/Kep-Dir/VII/2024 tanggal 7 Agustus 2024, seluruh Dewan Direksi dan Dewan Komisaris menyetujui usulan untuk melakukan pembagian dividen kas interim berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian per tanggal 30 Juni 2024 sejumlah Rp53.165.644.454 atau Rp5 per saham biasa. Dividen kas tersebut telah dibayarkan pada tanggal 26 dan 27 Agustus 2024.

Berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan No. 031/PAM-Mineral/JKT/Kep-Dir/XI/2024 tanggal 25 November 2024, seluruh Dewan Direksi dan Dewan Komisaris menyetujui usulan untuk melakukan pembagian dividen kas interim berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian per tanggal 30 September 2024 sejumlah Rp95.693.600.798 atau Rp9 per saham biasa. Dividen kas tersebut telah dibayarkan pada tanggal 12 dan 16 Desember 2024.

25. LABA PER SAHAM DASAR DAN DILUSIAN

Perhitungan laba per saham dasar dan dilusian adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada PAM	318.044.538.125	26.924.380.566
Rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar	10.635.644.907	10.165.463.369
Laba per saham dasar dan dilusian	29,90	2,65

Potensi saham biasa Perusahaan berasal dari antidilutif Waran Seri I dan tidak disertakan dalam perhitungan laba per saham dilusian.

26. KEPENTINGAN NONPENGENDALI

Akun ini merupakan bagian kepemilikan nonpengendali atas aset bersih entitas anak pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dengan rincian sebagai berikut:

	2024	2023
Saldo awal	1.184.109.070	971.533.629
Bagian laba tahun berjalan	712.985.000	210.649.780
Bagian penghasilan komprehensif tahun berjalan	24.402	1.925.661
Saldo akhir	1.897.118.472	1.184.109.070

24. DIVIDENDS (continued)

Based on the Decision of the Board of Directors of the Company No. 020/PAM-Mineral/JKT/Kep-Dir/VII/2024 dated August 7, 2024, all member of the Board of Directors and Commissioners have approved the proposal to distribute interim cash dividends based on the Consolidated Financial Statements as at June 30, 2024 in the amount of Rp53,165,644,454 or Rp5 per common share. The cash dividends were paid on August 26 and 27, 2024.

Based on the Decision of the Board of Directors of the Company No. 031/PAM-Mineral/JKT/Kep-Dir/XI/2024 dated November 25, 2024, all member of the Board of Directors and Commissioners have approved the proposal to distribute interim cash dividends based on the Consolidated Financial Statements as at September 30, 2024 in the amount of Rp95,693,600,798 or Rp9 per common share. The cash dividends were paid on December 12 and 16, 2024.

25. BASIC AND DILUTED EARNINGS PER SHARE

Basic and diluted earnings per share calculation is as follows:

Net profit attributable to PAM
Weighted average number
of outstanding ordinary shares
**Basic and diluted earnings
per share**

The Company's potential ordinary shares arising from the Warrant Series I are antidilutive and therefore not included in the determination of diluted earnings per share.

26. NON-CONTROLLING INTEREST

This account represents the non-controlling interest in the net assets of subsidiary as at December 31, 2024 and 2023 with details as follows:

Beginning balance
Share in profit for the year
Share in other comprehensive
income for the year
Ending balance

PT PAM MINERAL TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PAM MINERAL TBK AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

27. PENJUALAN

Akun ini terdiri dari:

	2024	2023	
Pihak ketiga			Third parties
Bijih nikel	1.442.490.354.916	1.141.462.895.855	Nickel ore

Rincian pelanggan dengan jumlah penjualan kumulatif selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 yang melebihi 10% dari penjualan adalah sebagai berikut:

The breakdown of customers with total cumulative sales for the years ended December 31, 2024 and 2023 that exceeded 10% of sales is as follows:

	2024		2023		
	Jumlah/ Total	%	Jumlah/ Total	%	
PT Indonesia Guang Ching Nickel and Stainless Steel Industry	242.402.799.232	16,80	-	0,00	PT Indonesia Guang Ching Nickel and Stainless Steel Industry
PT Marin Mitra Nusantara	213.003.679.348	14,77	-	0,00	PT Marin Mitra Nusantara
PT Lestari Smelter Indonesia	199.706.451.932	13,84	-	0,00	PT Lestari Smelter Indonesia
PT Xingda Trading Indonesia	159.944.782.921	11,09	-	0,00	PT Xingda Trading Indonesia
PT Global Metal Trading	73.819.271.732	5,12	122.387.829.928	10,72	PT Global Metal Trading
PT Kyara Sukses Mandiri	26.575.008.494	1,84	402.709.635.236	35,28	PT Kyara Sukses Mandiri
PT Zhao Hui Nickel	-	0,00	331.568.204.057	29,05	PT Zhao Hui Nickel
PT Tsingkun Dua Delapan	-	0,00	204.114.319.443	17,88	PT Tsingkun Dua Delapan
Lain-lain	527.038.361.257	36,54	80.682.907.191	7,07	Others
Jumlah	1.442.490.354.916	100,00	1.141.462.895.855	100,00	Total

28. BEBAN POKOK PENJUALAN

Akun ini terdiri dari:

28. COST OF GOODS SOLD

This account consists of:

	2024	2023	
Beban pokok produksi:			Production costs:
Jasa kontraktor	390.122.952.327	453.902.710.673	Contractor services
Tongkang	163.361.178.696	138.762.991.048	Barge
Jasa manajemen <i>stockpile</i>	117.246.065.813	205.542.290.730	Stockpile management services
Royalti	97.882.808.969	102.268.720.190	Royalty
Biaya operasional proyek	39.708.824.625	90.289.516.687	Project operational costs
Gaji dan tunjangan	32.787.280.521	27.238.079.708	Salaries and allowances
Amortisasi (Catatan 12)	6.122.598.647	8.614.264.688	Amortization (Note 12)
Bahan bakar	5.873.785.230	6.293.718.089	Fuel
Independen <i>surveyor</i>	5.469.194.154	3.878.904.110	Independent surveyor
Jamuan dan sumbangan	3.144.205.715	9.675.000.000	Entertainment and donations
Penyusutan (Catatan 11)	1.723.992.634	1.615.092.311	Depreciation (Note 11)
Imbalan kerja (Catatan 20)	1.069.552.967	399.015.983	Employee benefits (Note 20)
Asuransi tongkang	807.513.678	-	Barge insurance
Eksplorasi	-	1.553.970.000	Exploration
Lain-lain	7.010.703.517	7.428.103.035	Others
Jumlah beban pokok produksi	872.330.657.493	1.057.462.377.252	Total production costs
Persediaan barang jadi:			Finished goods inventory:
Saldo awal	65.713.358.864	13.050.980.387	Beginning year
Saldo akhir	(12.821.916.983)	(65.713.358.864)	Ending year
Jumlah	925.222.099.374	1.004.799.998.775	Total

PT PAM MINERAL TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PAM MINERAL TBK AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

29. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Akun ini terdiri dari:

	2024
Gaji dan tunjangan	31.646.065.953
Pajak	14.271.378.280
Penyusutan (Catatan 11)	7.235.172.771
Sewa	7.131.495.984
Jamuan dan sumbangan	7.055.879.643
Keperluan dapur	6.193.467.088
Jasa profesional	5.932.863.133
Perbaikan dan pemeliharaan	4.704.548.301
Perjalanan dinas	3.246.886.302
Pajak bumi bangunan	2.784.828.026
Asuransi dan pengobatan	2.570.037.204
Imbalan kerja karyawan (Catatan 20)	1.951.699.358
Perlengkapan kantor	980.766.465
Perizinan	871.502.500
Amortisasi aset takberwujud (Catatan 13)	510.724.977
Komunikasi	430.792.043
Pelatihan	204.658.272
Transportasi	130.721.091
Listrik dan air	72.472.865
Lain-lain	5.241.277.156
Jumlah	103.167.237.412

29. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

This account consists of:

	2023	
	27.331.957.245	Salaries and allowances
	5.178.179.521	Tax
	6.118.408.793	Depreciation (Note 11)
	6.311.147.113	Rent
	6.824.169.507	Meals and donations
	6.149.618.550	Pantries
	7.496.804.924	Professional services
	4.157.140.853	Repair and maintenance
	6.521.218.757	Official travel
	4.913.752.463	Property taxes
	1.443.253.206	Insurance and medication
	1.763.234.012	Employee benefits (Note 20)
	1.164.054.406	Office supplies
	871.754.694	License
	-	Amortization of intangible assets (Note 13)
	343.719.056	Communication
	141.600.944	Training
	182.556.986	Transportation
	56.166.140	Electricity and water
	4.529.849.188	Others
Jumlah	91.498.586.358	Total

30. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK LAPORAN ARUS KAS

a. Aktivitas investasi non-kas yang signifikan

	2024
Penambahan aset hak-guna melalui liabilitas sewa (Catatan 11)	3.775.437.271
Penambahan aset tetap melalui utang sewa pembiayaan	-
Penambahan properti pertambangan provisi pembongkaran, rehabilitasi, reklamasi dan penutupan tambang (Catatan 19)	6.340.771.657
Penambahan properti pertambangan melalui realisasi uang muka	650.000.000

b. Rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan

Tabel di bawah ini menjelaskan perubahan dalam liabilitas Grup yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas dan perubahan nonkas. Liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan adalah liabilitas yang arus kas, atau arus kas masa depannya, diklasifikasikan dalam laporan arus kas konsolidasian Grup sebagai arus kas dari aktivitas pendanaan.

30. SUPPLEMENTARY CASH FLOW INFORMATION

a. Significant non-cash investing activities

	2023	
	4.335.788.682	Addition to right-of-use assets through lease liability (Note 11)
	7.533.210.037	Addition to fixed assets through consumer financing payables
	-	Addition to mining properties through provision for decommissioning, mine rehabilitation, reclamation and closure (Note 19)
	-	Addition to mining properties through realization of advances

b. Reconciliation of liabilities arising from financing activities

The table below details changes in the Group's liabilities arising from financing activities, including both cash and non-cash changes. Liabilities arising from financing activities are those for which cash flows were, or future cash flows will be, classified in the Group's consolidated statement of cash flows as cash flows from financing activities.

PT PAM MINERAL TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PAM MINERAL TBK AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

30. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK LAPORAN ARUS KAS (lanjutan)

- b. Rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan (lanjutan)

	1 Januari/ January 1, 2024	Transaksi nonkas/ Non-cash transaction	Arus kas pendanaan/ Financing cash flows	31 Desember/ December 31, 2024
Liabilitas sewa/ <i>Lease liability</i>	1.949.026.293	3.775.437.271	(4.459.990.491)	1.264.473.073
Utang sewa pembiayaan konsumen/ <i>Consumer financing payables</i>	3.783.149.066	-	(1.692.738.114)	2.090.410.952
Jumlah/ Total	5.732.175.359	3.775.437.271	(6.152.728.605)	3.354.884.025

	1 Januari/ January 1, 2023	Transaksi nonkas/ Non-cash transaction	Arus kas pendanaan/ Financing cash flows	31 Desember/ December 31, 2023
Liabilitas sewa/ <i>Lease liability</i>	1.305.882.347	4.335.788.682	(3.692.644.736)	1.949.026.293
Utang sewa pembiayaan konsumen/ <i>Consumer financing payables</i>	-	7.533.210.037	(3.750.060.971)	3.783.149.066
Jumlah/ Total	1.305.882.347	11.868.998.719	(7.442.705.707)	5.732.175.359

31. SEGMENT OPERASI

Segmen Operasi

Group hanya memiliki satu pelaporan segmen operasi berdasarkan PSAK 108 "Segmen Operasi" yang merupakan segmen penjualan bijih nikel. Pendapatan dari penjualan bijih nikel diungkapkan pada Catatan 27.

Segmen Geografis

Group hanya memiliki satu pelaporan segmen geografis berdasarkan PSAK 108 "Segmen Operasi" yang merupakan bisnis di Indonesia.

31. OPERATING SEGMENT

Operating Segment

The Group only has one reporting segment based on PSAK 108 "Operating Segment" which is the nickel ore sales segment. Revenues from nickel ore sales is disclosed in Note 27.

Geographical Segment

The Group only has one geographic segment reporting based on PSAK 108 "Operating Segment" which is a business in Indonesia.

32. JAMINAN REKLAMASI DAN PENUTUPAN TAMBANG

Pada tanggal 20 Desember 2010, Pemerintah mengeluarkan peraturan implementasi atas Undang-Undang Mineral No. 4/2009, yaitu PP No. 78 yang mengatur aktivitas reklamasi dan pascatambang untuk pemegang IUP-Eksplorasi dan IUP-Operasi Produksi. Ketentuan peralihan dalam PP No. 78 menegaskan bahwa para pemegang PKP2B juga wajib mematuhi peraturan ini.

32. RECLAMATION GUARANTEES AND MINE CLOSURE

On December 20, 2010, the Government released an implementing regulation for Mining Law No. 4/2009, i.e. GR No. 78 dealing with reclamation and post-mining activities for both IUP-Exploration and IUP-Production Operation holders. The transitional provisions in GR No. 78 make it clear that CCA/CCoW holders are also required to comply with this regulation.

32. JAMINAN REKLAMASI DAN PENUTUPAN TAMBANG (lanjutan)

Pemegang IUP-Eksplorasi, ketentuannya antara lain, harus memuat rencana reklamasi di dalam rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasinya dan menyediakan jaminan reklamasi berupa deposito berjangka yang ditempatkan pada bank pemerintah.

Pemegang IUP-Operasi Produksi, ketentuannya antara lain, harus menyiapkan (1) rencana reklamasi lima tahunan; (2) rencana pascatambang; (3) menyediakan jaminan reklamasi yang dapat berupa rekening bersama atau deposito berjangka yang ditempatkan pada bank pemerintah, bank garansi, atau cadangan akuntansi (bila memenuhi persyaratan); dan (4) menyediakan jaminan pascatambang berupa deposito berjangka yang ditempatkan di bank pemerintah.

Penempatan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP dari ketentuan untuk melaksanakan aktivitas reklamasi dan pascatambang.

Pada tanggal 3 Mei 2018, KESDM mengeluarkan Peraturan Menteri No. 26/2018 ("Permen ESDM 26/2018") mengenai prinsip pertambangan dan pengawasan yang tepat dalam aktivitas pertambangan mineral dan batubara, dan pada tanggal 7 Mei 2018, KESDM mengeluarkan Keputusan Menteri No. 1827 K/30/MEM/2018 ("Kepmen ESDM") mengenai pedoman untuk teknik dan prinsip pertambangan yang tepat. Pada tanggal peraturan ini berlaku efektif, Peraturan Menteri No. 07/2014 mengenai reklamasi dan pascatambang pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara dicabut dan tidak berlaku lagi. Dari waktu ke waktu, Grup dapat melakukan peninjauan atau revisi terhadap rencana-rencana yang telah ada, termasuk diantaranya adalah rencana reklamasi dan pascatambang sesuai ketentuan yang berlaku.

32. RECLAMATION GUARANTEES AND MINE CLOSURE (continued)

An IUP-Exploration holder, among other requirements, must include a reclamation plan in its exploration work plan and budget and provide a reclamation guarantee in the form of a time deposit placed at a state-owned bank.

An IUP-Production Operation holder, among other requirements, must (1) prepare a five-year reclamation plan; (2) prepare a post-mining plan; (3) provide a reclamation guarantee which may be in the form of a joint account or time deposit placed at a state-owned bank, a bank guarantee, or an accounting provision (if it meets the requirements); and (4) provide a post-mine guarantee in the form of a time deposit at a state-owned bank.

The requirement to provide a reclamation guarantee and a post-mining guarantee does not release the IUP holder from the requirement to perform reclamation and post-mining activities.

On May 3, 2018, the MoEMR issued Ministerial Regulation No. 26/2018 ("Permen ESDM 26/2018") regarding proper mining principles and supervision in mineral and coal mining activities, and on May 7, 2018, the MoEMR issued Ministerial Decree No. 1827 K/30/MEM/2018 ("Kepmen ESDM") regarding guidelines for proper mining techniques and principles. As of the effective date of these regulations, Ministerial Regulation No. 07/2014 regarding mine reclamation and post-mining activities in mineral and coal mining activities was revoked and is no longer valid. From time to time, the Group can review or revise existing plans, including reclamation and post-mining plans in accordance with the applicable regulations.

PT PAM MINERAL TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

32. JAMINAN REKLAMASI DAN PENUTUPAN TAMBANG (lanjutan)

Tabel dibawah ini menunjukkan jaminan reklamasi dan pascatambang yang diwajibkan dan ditempatkan oleh Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Perusahaan/ Entity	Surat Keputusan/ Decree		Periode/ Period	Jumlah penempatan/ Placed amount		Bentuk/ Form		
Entity	Nomor/ Number	Tanggal/ Date		2024	2023			
Dalam Rupiah (nilai penuh)/ In Rupiah (full amount)								
<u>Jaminan reklamasi/ Reclamation guarantees</u>								
PAM	540/6412- MINERBA/DESDM	14 Mei/ May 14, 2019	2012 - 2015	450.000.000	450.000.000	Deposito berjangka/ Time deposits		
PAM	540/4314- MINERBA/DESDM	23 Mei/ May 23, 2019	2019 - 2021	3.816.209.140	3.816.209.140	Deposito berjangka/ Time deposits		
PAM	T-557/MB.07/DJB.T/2024	22 Maret/ March 22, 2024	2022 - 2024	5.523.056.305	-	Deposito berjangka/ Time deposits		
IBM	540/943	18 Mei/ May 18, 2017	2014 - 2018	1.053.000.000	1.053.000.000	Deposito berjangka/ Time deposits		
IBM	540.2.411	23 Juli/ July 23, 2019	2019 - 2023	8.009.612.004	8.009.612.004	Deposito berjangka/ Time deposits		
	Sub-jumlah/sub-total			18.851.877.449	13.328.821.144			
<u>Jaminan pascatambang/ Post-mining guarantees</u>								
PAM	T-1183/MB.07/DJB.T/2024	4 Juli/ July 4, 2024	2023 - 2025	4.163.688.878	-	Deposito berjangka/ Time deposits		
IBM	T-2048/MB.07.09/DJB/2021	13 Juli/ July 13, 2024	2014 - 2034	1.621.009.940	1.178.686.753	Deposito berjangka/ Time deposits		
	Sub-jumlah/sub-total			5.784.698.818	1.178.686.753			
	Jumlah/Total			24.636.576.267	14.507.507.897			

33. PERJANJIAN PENTING DAN KOMITMEN

PAM

Perjanjian kontraktor tambang

PT Andalan Nusa Prakasa ("ANP")

PAM dan ANP menandatangani perjanjian No. 052/EXT/SPK-LGL/PAMMIN-ANP/X/2024 tanggal 3 Oktober 2024. PAM menunjuk NPM melaksanakan pekerjaan eksploitasi penambangan nikel yang meliputi Land Clearing, Grubbing, Top Soil Removal, Overburden, Waste Removal, Ore Hauling, Ore Barging dan memberikan hak untuk melakukan kegiatan prosedur penambangan yang baik (Good Mining Practice) yang terdapat di lahan konsesi tambang yang dimiliki PAM. Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak perjanjian ini ditandatangani.

Perjanjian jasa konsultasi manajemen rantai pasokan bijih nikel

PT Labdajaya Lokatara Bersama ("LLB")

Pada tanggal 2 Januari 2023, PAM melakukan perjanjian dengan LLB untuk memberikan jasa pemasaran dan menjual bijih nikel di pasar sesuai dengan persyaratan dengan pelanggan. Perjanjian ini memiliki jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pelaksanaan dimulai.

PT PAM MINERAL TBK AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

32. RECLAMATION GUARANTEES AND MINE CLOSURE (continued)

The below table sets out reclamation guarantees and post-mining guarantees that are required and have been placed by the Company as at December 31, 2024 and 2023:

Periode/ Period	Jumlah penempatan/ Placed amount		Bentuk/ Form
	2024	2023	
2012 - 2015	450.000.000	450.000.000	Deposito berjangka/ Time deposits
2019 - 2021	3.816.209.140	3.816.209.140	Deposito berjangka/ Time deposits
2022 - 2024	5.523.056.305	-	Deposito berjangka/ Time deposits
2014 - 2018	1.053.000.000	1.053.000.000	Deposito berjangka/ Time deposits
2019 - 2023	8.009.612.004	8.009.612.004	Deposito berjangka/ Time deposits
	<u>18.851.877.449</u>	<u>13.328.821.144</u>	
2023 - 2025	4.163.688.878	-	Deposito berjangka/ Time deposits
2014 - 2034	1.621.009.940	1.178.686.753	Deposito berjangka/ Time deposits
	<u>5.784.698.818</u>	<u>1.178.686.753</u>	
	<u>24.636.576.267</u>	<u>14.507.507.897</u>	

33. SIGNIFICANT AGREEMENT AND COMMITMENTS

PAM

Mining contractor agreement

PT Andalan Nusa Perkasa ("ANP")

PAM and ANP signed an agreement No. 052/EXT/SPK-LGL/PAMMIN-ANP/X/2024 dated October 3, 2024. PAM appoints NPM to carry out nickel mining exploitation work which includes Land Clearing, Grubbing, Top Soil Removal, Overburden, Waste Removal, Ore Hauling, Ore Barging and gives the right to carry out Good Mining Practice activities in the mining concession owned by PAM. This agreement is valid for 3 (three) years since this agreement was signed.

Nickel ore supply chain management consulting service agreement

PT Labdajaya Lokatara Bersama ("LLB")

On January 2, 2023, PAM entered into an agreement with LLB to provide marketing services and sell nickel ore in the market in accordance with the terms with the customer. This agreement has a term of 2 (two) years from the date of commencement.

PT PAM MINERAL TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

33. PERJANJIAN PENTING DAN KOMITMEN
(lanjutan)

PAM (lanjutan)

Perjanjian jasa konsultasi manajemen rantai pasokan bijih nikel (lanjutan)

PT Labdajaya Lokatara Bersama ("LLB") (lanjutan)

Pada tanggal 27 Desember 2024, PAM melakukan perjanjian addendum pertama agen pemasaran dengan LLB, yang membahas perubahan terhadap perjanjian, bahwa kedua pihak sepakat akan melakukan perubahan terhadap perjanjian jangka waktu, ketentuan besaran komisi, dan menambahkan ketentuan terkait uang muka.

PT Bentara Sinar Abadi ("BSA")

Pada tanggal 23 Desember 2024, PAM melakukan perjanjian dengan BSA untuk menjamin rantai pasokan bijih nikel milik Perusahaan dari pit sampai dengan titik serah kepada pembeli serta memberikan solusi untuk mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi biaya di pertambangan bijih nikel dan operasi pengangkutan. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 23 Desember 2026.

PAM dan IBM

Komitmen penjualan

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 Grup mempunyai beberapa komitmen penjualan bijih nikel kepada beberapa pelanggan dengan jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Grup tidak mempunyai komitmen jasa kepada pelanggan.

Jaminan reklamasi dan penutupan tambang

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Grup telah menyampaikan dan menerima persetujuan dari pemerintah atas rencana reklamasinya. Jumlah jaminan yang ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka masing-masing sebesar Rp24.636.576.267 dan Rp14.507.507.897 (Catatan 14).

Pada tanggal 3 Mei 2018, Kementerian ESDM mengeluarkan Peraturan Menteri No. 26/2018 ("PerMen ESDM 26/2018") mengenai prinsip pertambangan dan pengawasan yang tepat dalam aktivitas pertambangan mineral dan batu bara, dan pada tanggal 7 Mei 2018, Kementerian ESDM mengeluarkan Keputusan Menteri No. 1827 K/30/MEM/2018 ("KepMen ESDM") mengenai pedoman untuk teknik dan prinsip pertambangan yang tepat.

Pada tanggal peraturan ini berlaku efektif, Peraturan Menteri No. 07/2014 mengenai reklamasi dan pascatambang pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara dicabut dan tidak berlaku lagi.

PT PAM MINERAL TBK AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

33. SIGNIFICANT AGREEMENT AND
COMMITMENTS (continued)

PAM (continued)

Nickel ore supply chain management consulting service agreement (continued)

PT Labdajaya Lokatara Bersama ("LLB") (continued)

On December 27, 2024, PAM entered into the first addendum agreement for marketing agents with LLB, which discussed changes to the agreement, that both parties agreed to make changes to the term agreement, provisions on the amount of commission, and add provisions related to down payments.

PT Bentara Sinar Abadi ("BSA")

On December 23, 2024, PAM entered into an agreement with BSA to guarantee the Company's nickel ore supply chain from the pit to the point of handover to the buyer and provide solutions to reduce costs and improve cost efficiency in nickel ore mining and transportation operations. This agreement is valid until December 23, 2026.

PAM and IBM

Sales commitments

As at December 31, 2024 and 2023, the Group has various commitments to sell nickel ore to various customers at specified agreed quantities. As at December 31, 2024 and 2023, the Group does not have service commitments to customers.

Guaranteed reclamation and mine closure

As at December 31, 2023 and 2022, the Group has submitted and received approval from the government for its reclamation plan. The amount of collateral placed in the form of time deposits is Rp24.636.576.267 and Rp14,507,507,897, respectively (Note 14).

On May 3, 2018, the Ministry of Energy and Mineral Resources issued Ministerial Regulation No. 26/2018 ("PerMen ESDM 26/2018") regarding the principles of mining and proper supervision in mineral and coal mining activities, and on May 7, 2018, the Ministry of Energy and Mineral Resources issued Ministerial Decree No. 1827 K/30/MEM/2018 ("KepMen ESDM") regarding guidelines for proper mining techniques and principles.

On the date this regulation becomes effective, Ministerial Regulation No. 07/2014 regarding reclamation and post-mining in mineral and coal mining business activities is revoked and is no longer valid.

PT PAM MINERAL TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

33. PERJANJIAN PENTING DAN KOMITMEN
(lanjutan)

PAM dan IBM (lanjutan)

Jaminan reklamasi dan penutupan tambang
(lanjutan)

Pada tanggal 7 Mei 2018, Kementerian ESDM No. 1827 K/30/MEM/2018 menetapkan bahwa suatu Perusahaan disyaratkan untuk menyediakan jaminan untuk reklamasi tambang dan pascatambang yang dapat berupa deposito berjangka, jaminan bank, rekening bersama, atau cadangan akuntansi yang jangka waktunya sesuai dengan jadwal reklamasi.

Pada tanggal 20 Desember 2010, Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan implementasi atas Undang-Undang Mineral No. 4/2009, yaitu PP No. 78 dan PerMen ESDM No. 7/2014 yang mengatur aktivitas reklamasi dan pascatambang untuk pemegang IUP-Eksplorasi dan IUP-Operasi Produksi.

Pemegang IUP-Eksplorasi, ketentuannya antara lain, harus memuat rencana reklamasi di dalam rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasinya dan menyediakan jaminan reklamasi berupa deposito berjangka yang ditempatkan pada bank pemerintah.

Pemegang IUP-Operasi Produksi, ketentuannya antara lain, harus menyiapkan (1) rencana reklamasi lima tahunan; (2) rencana pasca-tambang; (3) menyediakan jaminan reklamasi yang dapat berupa rekening bersama atau deposito berjangka yang ditempatkan pada bank pemerintah, bank garansi, atau cadangan akuntansi (bila diizinkan); dan (4) menyediakan jaminan pascatambang berupa deposito berjangka yang ditempatkan di bank pemerintah.

Penempatan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP dari ketentuan untuk melaksanakan aktivitas reklamasi dan pascatambang.

Berikut jaminan reklamasi dan penutupan tambang yang ditempatkan oleh Grup:

Berdasarkan surat penetapan jaminan reklamasi tahun 2014-2018 dan 2019-2023 dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral No. 540/4314-MINERBA/DESDM tanggal 18 Mei 2019, PAM melakukan penempatan deposito di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang digunakan sebagai jaminan atas reklamasi di lokasi pertambangan.

PT PAM MINERAL TBK AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

33. SIGNIFICANT AGREEMENT AND
COMMITMENTS (continued)

PAM and IBM (continued)

Guaranteed reclamation and mine closure
(continued)

On May 7, 2018, the Ministry of Energy and Mineral Resources KepMen No. 1827 K/30/MEM/2018 stipulates that a Company is required to provide guarantees for mine and post-mining reclamation which can be in the form of time deposits, bank guarantees, joint accounts, or accounting reserves whose maturity is in accordance with the reclamation schedule.

On December 20, 2010, the Government of Indonesia issued implementing regulations for the Mineral Law No. 4/2009, namely GR No. 78 and Ministry of Energy and Mineral Resources Regulation No. 7/2014 which regulates reclamation and post-mining activities for MBP-Exploration and MBP-Production Operation holders.

An MBP-Exploration holder, among other provisions, must include a reclamation plan in his exploration work plan and budget and provide a reclamation guarantee in the form of a time deposit placed at a state bank.

The holder of an MBP-Production Operation, among other provisions, must prepare (1) a five-year reclamation plan; (2) post-mining plans; (3) provide a reclamation guarantee which can be in the form of a joint account or time deposit placed in a state bank, bank guarantee, or accounting reserve (if permitted); and (4) provide post-mining guarantees in the form of time deposits placed at state-owned banks.

Placement of reclamation guarantees and post-mining guarantees does not eliminate the obligation of the MBP holder from the provisions to carry out reclamation and post-mining activities.

Following are the reclamation and mine closure guarantees placed by the Group:

Based on the 2014-2018 and 2019-2023 determination of reclamation guarantee letter from the Southeast Sulawesi Provincial Government, Energy and Mineral Resources Office No. 540/4314-MINERBA/DESDM dated May 18, 2019, PAM placed deposits at PT Bank Mandiri (Persero) Tbk and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk which were used as collateral for reclamation at the mining site.

33. PERJANJIAN PENTING DAN KOMITMEN
(lanjutan)

PAM dan IBM (lanjutan)

Jaminan reklamasi dan penutupan tambang
(lanjutan)

Berdasarkan surat penetapan jaminan reklamasi tahun 2019-2023 dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral No. 540/2.411 tanggal 23 Juli 2019 dan No. 540/943 dan 540/944 tanggal 18 Mei 2017, IBM melakukan penempatan deposito di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara yang digunakan sebagai jaminan atas reklamasi di lokasi pertambangan.

IBM

Perjanjian kontraktor tambang

PT Hillconjaya Sakti ("HJS")

Berdasarkan perjanjian kerjasama jasa penambangan No. 008/PKS/IMB-HJS/III/2021, yang sebelumnya telah digantikan melalui addendum 3 kemudian digantikan kembali melalui addendum 4 yang menjadi addendum terakhir pada tahun 2023 yang menjelaskan perjanjian kerjasama penambangan bijih nikel tertanggal 2 Januari 2023, HJS sebagai pihak untuk melaksanakan pekerjaan penambangan bijih nikel dan memberikan hak untuk melakukan kegiatan prosedur penambangan sesuai perjanjian sebelum addendum dan mengubah biaya kontrak penambangan.

Berdasarkan perjanjian Kerjasama jasa penambangan No. 008/PKS/IMB-HJS/III/2021, yang digantikan melalui addendum 2 perjanjian kerjasama penambangan bijih nikel tertanggal 1 November 2021, HJS untuk melaksanakan pekerjaan penambangan pekerjaan bijih nikel dan memberikan hak untuk melakukan prosedur penambangan sesuai perjanjian sebelum addendum dan mengubah biaya kontrak penambangan.

Perjanjian jasa QAQC

PT Bhineka Selaras Tiyasa ("BST")

Pada tanggal 2 Januari 2023, Perusahaan menandatangani perjanjian dengan BST untuk pengadaan jasa tenaga perencanaan dan QAQC penambangan nikel dengan harga yang telah disepakati bersama.

Terdapat addendum pertama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang merubah jangka waktu perjanjian berlaku sampai dengan 31 Desember 2025.

33. SIGNIFICANT AGREEMENT AND
COMMITMENTS (continued)

PAM and IBM (continued)

Guaranteed reclamation and mine closure
(continued)

Based on the 2019-2023 determination of reclamation guarantee letter from the Southeast Sulawesi Provincial Government, Energy and Mineral Resources Department Mineral No. 540/2.411 dated July 23, 2019 and No. 540/943 and 540/944 dated May 18, 2017, IBM placed deposits in PT Bank Mandiri (Persero) Tbk and PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara which are used as collateral for reclamation at the mining site.

IBM

Mining contractor agreement

PT Hillconjaya Sakti ("HJS")

Based on the mining service cooperation agreement No. 008/PKS/IMB-HJS/III/2021, which was previously replaced through addendum 3 and then replaced again through addendum 4 which became the last addendum in the year of 2023 which describes the nickel ore mining cooperation agreement dated January 2, 2023, HJS as a party to carry out nickel ore mining work and gives the right to carry out mining procedure activities according to the agreement before the addendum and change the mining contract fee.

Based on the mining service cooperation agreement No. 008/PKS/IMB-HJS/III/2021, which was replaced through addendum 2 of the nickel ore mining Cooperation agreement dated November 1, 2021, HJS to carry out the mining work of nickel ore work and provide the right to carry out mining procedures according to the agreement before the addendum and change the mining contract fee.

QAQC service agreement

PT Bhineka Selaras Tiyasa ("BST")

On January 2, 2023, the Company signed an agreement with BST for the procurement of nickel mining planning and QAQC services at a mutually agreed price. This agreement is valid until December 31, 2024.

There is a first addendum signed by both parties which changes the term of the agreement is valid until December 31, 2025.

PT PAM MINERAL TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PAM MINERAL TBK AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

33. PERJANJIAN PENTING DAN KOMITMEN
(lanjutan)

IBM (lanjutan)

Perjanjian jasa QAQC (lanjutan)

PT Citrapasada Unggul Jaya ("CNJ")

Pada tanggal 7 Oktober 2024, Perusahaan menandatangani perjanjian dengan CNJ untuk pengadaan jasa tenaga perencanaan dan QAQC penambangan nikel dengan harga yang telah disepakati bersama. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 7 Oktober 2026.

Perjanjian jasa konsultasi manajemen rantai pasokan bijih nikel

PT Bentara Sinar Abadi ("BSA")

Pada tanggal 14 Oktober 2024, IBM melakukan perjanjian dengan BSA untuk menjamin rantai pasokan bijih nikel milik Perusahaan dari pit sampai dengan titik serah kepada pembeli serta memberikan solusi untuk mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi biaya di pertambangan bijih nikel dan operasi pengangkutan. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 14 Oktober 2026.

33. SIGNIFICANT AGREEMENT AND
COMMITMENTS (continued)

IBM (continued)

QAQC service agreement (continued)

PT Citrapasada Unggul Jaya ("CNJ")

On October 7, 2024, the Company signed an agreement with CNJ for the procurement of nickel mining planning and QAQC services at a mutually agreed price. This agreement is valid until October 7, 2026.

Nickel ore supply chain management consulting service agreement

PT Bentara Sinar Abadi ("BSA")

On October 14, 2024, IBM entered into an agreement with BSA to guarantee the Company's nickel ore supply chain from the pit to the point of handover to the buyer and provide solutions to reduce costs and improve cost efficiency in nickel ore mining and transportation operations. This agreement is valid until October 14, 2026.

34. INSTRUMEN KEUANGAN

a. Kategori dan kelas instrumen keuangan

	2024
Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan amortisasi	
Kas dan setara kas	227.951.744.981
Piutang usaha	218.767.592.407
Piutang non-usaha	547.299.999
Deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya	24.636.576.267
Jumlah	471.903.213.654

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan amortisasi	
Utang usaha	55.999.290.181
Biaya yang masih harus dibayar	19.521.214.026
Liabilitas sewa	1.264.473.073
Utang sewa pembiayaan konsumen	2.090.410.952
Jumlah	78.875.388.232

34. FINANCIAL INSTRUMENTS

a. Categories and classes of financial instruments

	2023	
		Financial assets measured at amortized cost
		Cash and cash equivalents
		Trade receivables
		Non-trade receivables
		Restricted time deposits
		Total
		Financial liabilities measured at amortized cost
		Trade payables
		Accrued expenses
		Lease liabilities
		Consumer financing payable
		Total

34. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

b. Pengukuran nilai wajar

Manajemen menganggap bahwa jumlah tercatat kas dan setara kas, piutang usaha, piutang non-usaha, deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya, utang usaha, dan biaya yang masih harus dibayar mendekati nilai wajarnya dikarenakan jangka waktu yang singkat atas instrumen keuangan tersebut.

Selain itu, jumlah tercatat liabilitas sewa dan utang sewa pembiayaan konsumen mendekati nilai wajar mereka karena mereka dikenakan tingkat bunga pasar atau dampak diskonto tidak material.

35. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN MODAL

Program manajemen risiko Grup secara keseluruhan bertujuan untuk meminimalkan potensi dampak buruk pada kinerja keuangan Grup.

Aktivitas Grup terekspos terutama untuk berbagai macam risiko keuangan, termasuk risiko kredit, risiko pasar seperti risiko suku bunga dan risiko harga, dan risiko likuiditas. Grup tidak terekspos terhadap risiko mata uang asing yang signifikan karena seluruh transaksinya didenominasi dalam Rupiah kecuali jumlah minimal bank dalam USD.

Tidak ada perubahan pada eksposur Grup terhadap risiko keuangan ini atau cara mengelola dan mengukur risiko tersebut.

Tujuan dari manajemen risiko Grup adalah untuk mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengelola risiko dasar dalam upaya melindungi kesinambungan bisnis dalam jangka panjang dan meminimalkan dampak yang tidak diharapkan pada kinerja keuangan Grup.

Manajemen risiko merupakan tanggung jawab Direksi. Direksi bertugas menentukan prinsip dasar kebijakan manajemen risiko Grup secara keseluruhan serta kebijakan pada area tertentu seperti risiko kredit, risiko suku bunga, dan risiko likuiditas.

34. FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)

b. Fair value measurement

The management considers that the carrying amounts of cash and cash equivalents, trade receivables, non-trade receivables, restricted time deposits, trade payables, and accrued expenses approximate their fair values due to the short-term maturity of these financial instruments.

In addition, the carrying amounts of lease liabilities and consumer financing payable approximate their fair values as they carry a market rate of interest or impact of discounting is not material.

35. FINANCIAL RISK AND CAPITAL MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES

The Group's overall risk management programme seeks to minimize potential adverse effects on the financial performance of the Group.

The Group's activities expose it to a variety of financial risks, including credit risk, market risk such as interest rate risk and price risk, and liquidity risk. The Group is not exposed to significant foreign currency risk since all of its transactions are denominated in Rupiah other than a minimal amount of cash in banks in USD.

There has been no change to the Group's exposure to these financial risks or the manner in which it manages and measures the risk.

The objective of the Group's risk management is to identify, measure, monitor and manage basic risks in an effort to protect long-term business continuity and minimize unexpected impacts on the Group's financial performance.

Risk management is the responsibility of the Board of Directors. The Board of Directors has the responsibility to determine the basic principles of the Group's overall risk management as well as principles covering specific areas, such as credit risk, interest rate risk and liquidity risk.

35. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN MODAL (lanjutan)

a. Risiko kredit

Risiko kredit mengacu kepada risiko bahwa pihak lawan akan gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya yang mengakibatkan kerugian bagi Grup.

Grup terekspos dengan risiko kredit dari aktivitas operasi termasuk bank, piutang usaha, dan piutang non-usaha.

Kas di bank ditempatkan di lembaga keuangan yang layak kredit.

Untuk mengurangi risiko kredit, Grup telah mengadopsi kebijakan yaitu dengan bertransaksi dengan lawan transaksi yang bisa memenuhi kewajiban kontraktualnya. Persetujuan kredit dan prosedur lainnya merupakan tindakan *follow-up* untuk memenuhi pemulihan pinjaman yang sudah jatuh tempo.

Pada tanggal pelaporan, eksposur maksimum Grup terhadap risiko kredit adalah sebesar nilai tercatat masing-masing kategori dari aset keuangan yang disajikan pada laporan posisi keuangan.

Kerangka peringkat risiko kredit kini Grup terdiri dari kategori berikut:

35. FINANCIAL RISK AND CAPITAL MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

a. Credit risk

Credit risk refers to the risk that a counterparty will default on its contractual obligation resulting in a loss to the Group.

The Group is exposed to credit risk from its operating activities including cash in banks, trade receivables, and non-trade receivables.

Cash in banks are placed with reputable financial institutions.

In order to minimize credit risk, the Group has adopted a policy of only dealing with creditworthy counterparties. Credit approvals and other monitoring procedures are also in place to ensure that follow-up action is taken to recover overdue debts.

At reporting dates, the Group's maximum exposure to credit risk is the carrying amount of each category of financial assets presented in the statements of financial position.

The Group's current credit risk grading framework comprises the following categories:

Kategori/ Category	Deskripsi/ Description	Dasar pengakuan ECL/ Basis for recognizing ECL
Lancar/ Performing	Pihak lawan memiliki risiko gagal bayar yang rendah dan tidak memiliki tunggakan./ <i>The counterparty has a low risk of default and does not have any past-due amounts.</i>	ECL 12 bulan/12-month ECL
Dicadangkan/ Doubtful	Jumlah yang tertunggak > 30 hari atau telah ada peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal./ <i>Amount is >30 days past due or there has been a significant increase in credit risk since initial recognition.</i>	ECL sepanjang umur - kredit tidak memburuk/ Lifetime ECL-not credit-impaired
Gagal bayar/ In default	Jumlah yang tertunggak > 90 hari atau ada bukti yang mengindikasikan aset mengalami penurunan nilai kredit./ <i>Amount is >90 days past due or there is evidence indicating the asset is credit-impaired.</i>	ECL sepanjang umur - kredit memburuk/Lifetime ECL - credit-impaired
Penghapusan/ Write-off	Ada bukti yang mengindikasikan bahwa debitur dalam kesulitan keuangan yang buruk dan Perusahaan tidak memiliki prospek pemulihan yang realistis./ <i>There is evidence indicating that the debtor is in severe financial difficulty and the Company has no realistic prospect of recovery.</i>	Saldo dihapuskan/Amount is written off

PT PAM MINERAL TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PAM MINERAL TBK AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

35. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN MODAL (lanjutan)

a. Risiko kredit (lanjutan)

Tinjauan eksposur Grup terhadap risiko kredit

Tabel di bawah merinci kualitas kredit aset keuangan serta eksposur maksimum risiko kredit menurut peringkat risiko kredit:

2024					
	Peringkat kredit internal/ <i>Internal credit rating</i>	ECL 12 bulan atau sepanjang umur/ <i>12-month or lifetime ECL</i>	Jumlah tercatat bruto/ <i>Gross carrying amount</i>	Cadangan kerugian/ <i>Loss allowance</i>	Jumlah tercatat neto/ <i>Net carrying amount</i>
Bank dan deposito berjangka (Catatan 6)	Lancar/ <i>Performing</i>	ECL 12 bulan/ <i>12-month ECL</i>	224.444.785.386	-	224.444.785.386
Piutang usaha (Catatan 7)	Lancar/ <i>Performing</i>	ECL 12 bulan/ <i>12-month ECL</i>	218.767.592.407	-	218.767.592.407
Piutang non-usaha	Lancar/ <i>Performing</i>	Seumur hidup/ <i>Lifetime</i>	547.299.999	-	547.299.999
Deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya (Catatan 14)	Lancar/ <i>Performing</i>	ECL 12 bulan/ <i>12-month ECL</i>	24.636.576.267	-	24.636.576.267
Jumlah			468.396.254.059		468.396.254.059

Tabel di bawah merinci kualitas kredit aset keuangan serta eksposur maksimum risiko kredit menurut peringkat risiko kredit: (lanjutan)

35. FINANCIAL RISK AND CAPITAL MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

a. Credit risk (continued)

Overview of the Group's exposure to credit risk

The table below details the credit quality of the Group's financial assets as well as maximum exposure to credit risk by credit risk rating grades:

The table below details the credit quality of the Group's financial assets as well as maximum exposure to credit risk by credit risk rating grades: (continued)

2023					
	Peringkat kredit internal/ <i>Internal credit rating</i>	ECL 12 bulan atau sepanjang umur/ <i>12-month or lifetime ECL</i>	Jumlah tercatat bruto/ <i>Gross carrying amount</i>	Cadangan kerugian/ <i>Loss allowance</i>	Jumlah tercatat neto/ <i>Net carrying amount</i>
Bank dan deposito berjangka (Catatan 6)	Lancar/ <i>Performing</i>	ECL 12 bulan/ <i>12-month ECL</i>	134.557.755.502	-	134.557.755.502
Piutang usaha (Catatan 7)	Lancar/ <i>Performing</i>	ECL 12 bulan/ <i>12-month ECL</i>	48.639.760.655	-	48.639.760.655
Piutang non-usaha	Lancar/ <i>Performing</i>	Seumur hidup/ <i>Lifetime</i>	399.499.999	-	399.499.999
Deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya (Catatan 14)	Lancar/ <i>Performing</i>	ECL 12 bulan/ <i>12-month ECL</i>	14.507.507.897	-	14.507.507.897
Jumlah			198.104.524.053		198.104.524.053

35. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN MODAL (lanjutan)

b. Risiko pasar

Risiko pasar adalah risiko dimana nilai wajar dari arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar. Grup dipengaruhi oleh risiko pasar, terutama risiko tingkat suku bunga, nilai mata uang asing dan, harga lain.

(i) Risiko tingkat suku bunga

Risiko suku bunga adalah risiko bahwa nilai wajar atau arus kas masa depan dari instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar. Paparan Grup terhadap risiko perubahan suku bunga pasar terutama berkaitan dengan kas di bank dan deposito berjangka, kewajiban sewa, dan utang pembiayaan konsumen.

Grup memonitor secara ketat fluktuasi suku bunga pasar dan ekspektasi pasar sehingga dapat mengambil langkah-langkah yang paling menguntungkan Grup secara tepat waktu.

Tidak ada analisis sensitivitas yang dilakukan karena Grup tidak memperkirakan adanya dampak material terhadap laba atau rugi Grup yang timbul dari dampak perubahan suku bunga yang wajar pada instrumen keuangan berbunga pada akhir periode pelaporan. Laba atau rugi Grup tidak terpengaruh oleh perubahan suku bunga karena instrumen berbunga tersebut memiliki tingkat bunga tetap dan merupakan biaya perolehan diamortisasi.

(ii) Risiko harga

Operasi Grup terekspos terhadap risiko pasar terkait dengan fluktuasi harga dari harga komoditas yang diperdagangkan di pasar nikel dunia. Namun demikian, aset dan liabilitas keuangan Grup tidak terekspos secara signifikan terhadap fluktuasi harga nikel dunia karena penyelesaian aset dan liabilitas keuangan berdasarkan harga yang tercantum dalam kontrak jual beli nikel yang ditentukan pada saat pengiriman.

35. FINANCIAL RISK AND CAPITAL MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

b. Market risk

Market risk is the risk that the fair value of future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market prices. The Group is exposed to market risks, in particular, interest rate risk, foreign currency risk, and other price risk.

(i) Interest rate risk

Interest rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates. The Group's exposure to the risk of changes in market interest rates relates primarily to cash in banks and time deposits, lease liabilities, and consumer financing payable.

The Group closely monitors the market interest rate fluctuation and market expectation so it can take necessary actions benefited most to the Group in due time.

No sensitivity analysis is prepared as the Group does not expect any material effect on the Group's profit or loss arising from the effects of reasonably possible changes to interest rates on interest bearing financial instruments at the end of the reporting period. The Group's profit or loss are not affected by changes in interest rates as the interest-bearing instruments carry fixed interest and are amortized cost.

(ii) Price risk

The Group's operations are exposed to market risks related to the price volatility of commodity prices traded on world nickel markets. However, the Group's financial assets and liabilities are not significantly exposed to the price volatility of world nickel markets because the settlement of financial assets and liabilities is based on the prices stipulated in the nickel sales and purchase agreements that will be determined at the time of delivery.

PT PAM MINERAL TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PAM MINERAL TBK AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

35. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN MODAL (lanjutan)

c. Risiko likuiditas (lanjutan)

Risiko likuiditas adalah risiko dimana Grup akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban yang terkait dengan liabilitas keuangannya yang diselesaikan dengan menyerahkan kas atau aset keuangan lainnya. Tujuan Grup dalam mengelola likuiditas adalah untuk memastikan, sejauh mungkin, bahwa Grup akan memiliki likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajibannya saat jatuh tempo, baik dalam kondisi normal maupun tertekan, tanpa menimbulkan kerugian yang tidak dapat diterima atau risiko rusaknya reputasi Grup.

Tabel berikut merinci sisa jatuh tempo kontraktual untuk liabilitas keuangan nonderivatif dengan periode pembayaran yang disepakati Grup. Tabel telah disusun berdasarkan arus kas yang tak terdiskonto dari liabilitas keuangan berdasarkan tanggal terawal di mana Grup dapat diminta untuk membayar. Tabel mencakup arus kas bunga dan pokok. Untuk arus bunga tingkat mengambang jumlah tidak didiskontokan berasal dari kurva suku bunga pada akhir periode pelaporan. Jatuh tempo kontraktual didasarkan pada tanggal terawal di mana Grup mungkin akan diminta untuk membayar.

35. FINANCIAL RISK AND CAPITAL MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

c. Liquidity risk (continued)

Liquidity risk is the risk that the Group will encounter difficulty in meeting the obligations associated with its financial liabilities that are settled by delivering cash or another financial asset. The Group's objective when managing liquidity is to ensure, as far as possible, that it will have sufficient liquidity to meet its liabilities when they are due, under both normal and stressed conditions, without incurring unacceptable losses or risking damage to the Group's reputation.

The following tables detail the Group's remaining contractual maturity for its non-derivative financial liabilities with agreed repayment periods. The tables have been drawn up based on the undiscounted cash flows of financial liabilities based on the earliest date on which the Group can be required to pay. The tables include both interest and principal cash flows. To the extent that interest flows are floating rate, the undiscounted amount is derived from interest rate curves at the end of the reporting period. The contractual maturity is based on the earliest date on which the Group may be required to pay.

2024							
Tingkat bunga efektif rata-rata tertimbang/ Weighted average effective interest rate	Kurang dari 1 tahun/ Less than 1 year	1 tahun dan 5 tahun/ 1 and 5 years	Lebih dari 5 tahun/ Over 5 years	Jumlah/ Total	Nilai tercatat/ Carrying amount		
Tanpa bunga							Net-interest bearing
Utang usaha	-	55.999.290.181	-	55.999.290.181	55.999.290.181		Trade payables
Biaya yang masih harus dibayar	-	19.521.214.026	-	19.521.214.026	19.521.214.026		Accrued Expenses
Dengan bunga							Fixed interest rate instrument
Utang sewa pembiayaan konsumen	5,57%	2.159.738.000	-	2.159.738.000	2.090.410.952		Consumer financing payable
Liabilitas sewa	6,92 - 7,22%	1.479.422.367	-	1.479.422.367	1.264.473.073		Lease liabilities
Jumlah		79.159.664.574	-	79.159.664.574	78.875.388.232		Total
2023							
Tingkat bunga efektif rata-rata tertimbang/ Weighted average effective interest rate	Kurang dari 1 tahun/ Less than 1 year	1 tahun dan 5 tahun/ 1 and 5 years	Lebih dari 5 tahun/ Over 5 years	Jumlah/ Total	Nilai tercatat/ Carrying amount		
Tanpa bunga							Net-interest bearing
Utang usaha	-	38.454.926.367	-	38.454.926.367	38.454.926.367		Trade payables
Biaya yang masih harus dibayar	-	43.868.192.590	-	43.868.192.590	43.868.192.590		Accrued expenses
Dengan bunga							Fixed interest rate instrument
Utang sewa pembiayaan konsumen	5,57%	2.314.005.000	1.696.937.000	4.010.942.000	3.783.149.066		Consumer financing payable
Liabilitas sewa	6,71 - 7,01%	2.015.381.899	-	2.015.381.899	1.949.026.293		Lease liabilities
Jumlah		86.652.505.856	1.696.937.000	88.349.442.856	88.055.294.316		Total

PT PAM MINERAL TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PAM MINERAL TBK AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

35. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN MODAL (lanjutan)

d. Manajemen permodalan

Tujuan Grup dalam pengelolaan permodalan adalah untuk mempertahankan kelangsungan usaha Grup guna memberikan imbal hasil kepada pemegang saham dan manfaat kepada pemangku kepentingan lainnya serta menjaga struktur modal yang optimal untuk mengurangi biaya modal.

Manajemen Grup mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Grup dapat memilih menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham, mengembalikan modal kepada pemegang saham, menerbitkan saham baru atau menjual aset untuk mengurangi jumlah utang. Tidak ada perubahan yang dibuat dalam tujuan, kebijakan, atau proses selama periode yang disajikan.

Gearing ratio pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2024	2023	
Jumlah liabilitas	171.921.508.507	111.367.810.980	Total liabilities
Dikurangi: kas dan setara kas	(227.951.744.981)	(135.773.480.179)	Less: cash and cash equivalents
Liabilitas neto	(56.030.236.474)	(24.405.669.199)	Net liabilities
Jumlah ekuitas	878.185.342.723	745.470.167.420	Total equity
Rasio pinjaman neto terhadap modal	(6,38)	(3,27)	Net debt to equity ratio

36. REKLASIFIKASI AKUN

Reklasifikasi tertentu telah dilakukan terhadap laporan keuangan konsolidasian tahun sebelumnya untuk meningkatkan keterbandingan dengan laporan keuangan konsolidasian tahun berjalan.

Grup melakukan reklasifikasi uang muka investasi yang sebelumnya merupakan aset lancar menjadi aset tidak lancar. Perubahan tersebut dikarenakan perubahan syarat dalam perjanjian.

Akibatnya, pos-pos tertentu telah diubah di laporan posisi keuangan konsolidasian dan catatan atas laporan keuangan konsolidasian terkait. Angka komparatif telah disesuaikan dengan penyajian tahun berjalan.

35. FINANCIAL RISK AND CAPITAL MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

d. Capital management

The Group's objectives when managing capital are to safeguard the Group's ability to continue as a going concern in order to provide returns for shareholders and benefits for other stakeholders and to maintain an optimal capital structure to reduce the cost of capital.

The Group manages its capital structure and makes adjustments to it, in light of changes in economic conditions. To maintain or adjust the capital structure, the Group may adjust the dividend payment to shareholders, return capital to shareholders, issue new shares or sell assets to reduce debt. No changes were made in the objectives, policies or processes during the periods presented.

The gearing ratio as at December 31, 2024 and 2023 are as follows:

36. RECLASSIFICATION OF ACCOUNTS

Certain reclassifications have been made to the prior year's consolidated financial statements to enhance comparability with the current year's consolidated financial statements.

The Group reclassified advances for investment from current assets to non-current assets. The change was due to changes in terms of the agreement.

As a result, certain line items have been amended in the consolidated statement of financial position and the related notes to the consolidated financial statements. Comparative figures have been adjusted to conform to the current year's presentation.

PT PAM MINERAL TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PAM MINERAL TBK AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

36. REKLASIFIKASI AKUN (lanjutan)

36. RECLASSIFICATION OF ACCOUNTS (continued)

2023			
	Dilaporkan sebelumnya/ As previously reported	Direklasifikasi/ As reclassified	
<u>Laporan Posisi Keuangan</u> <u>Konsolidasian</u>			<u>Consolidated Statement of</u> <u>Financial Position</u>
<u>Aset lancar</u>			<u>Current assets</u>
Uang muka investasi	125.000.000.000	-	Advances for investment
<u>Aset tidak lancar</u>			<u>Non-current assets</u>
Uang muka investasi	-	125.000.000.000	Advances for investment

37. ASET MONETER DALAM MATA UANG ASING

37. MONETARY ASSETS IN FOREIGN CURRENCY

	2024		2023		
	Rp	USD	Rp	USD	
Aset					Assets
Kas di bank	2.988.410	185	7.159.565	464	Cash in banks
Jumlah aset moneter	2.988.410	185	7.159.565	464	Total monetary assets

38. PERKARA HUKUM DAN LIABILITAS BERSYARAT

38. LEGAL MATTERS AND CONTINGENCIES

Perkara hukum dan liabilitas bersyarat PAM adalah sebagai berikut:

PAM Legal matters and contingencies are as follows:

Perkara hukum

Legal matters

Pada tahun 2019, PAM menggugat secara perdata terhadap PT Bumi Morowali Utama ("BMU") selaku pemilik IUP Produksi tumpang tindih dan Presiden Republik Indonesia Cq Gubernur Sulawesi Tengah Morowali ("BUPATI") mengenai pembongkaran infrastruktur dan pemindahan ore nikel dan stockpile dari wilayah Pelabuhan sebesar 45.000 MT di Pengadilan Negeri Poso, serta tumpang tindih antara wilayah Izin Usaha Operasi Produksi PAM dengan BMU.

In 2019, PAM filed a civil lawsuit against PT Bumi Morowali Utama ("BMU") as the owner of the overlapping Production MBP and the President of the Republic of Indonesia Cq the Governor of Central Sulawesi Cq the Regent of Morowali ("BUPATI") regarding the demolition of infrastructure and the transfer of nickel ore and stockpile from Port area of 45,000 MT at the Poso District Court, as well as the overlap between the PAM Production Operation Business License area and the BMU.

Di mana pada awalnya, PAM memiliki IUP Pertambangan Nikel yang diakuisisi dari PT Duta Inti Perkasa Mineral ("DIPM") yang terletak di Desa Laroenai, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2017, berdasarkan Surat Keputusan dari Bupati Morowali atas Pertambangan Eksplorasi, IUP Produksi, dan Perubahan Nama Pemegang Izin Usaha Pertambangan Produksi dari DIPM menjadi PAM.

Where initially, PAM had a Nickel Mining MBP which was acquired from PT Duta Inti Perkasa Mineral ("DIPM") located in Laroenai Village, Bungku Pesisir District, Morowali Regency, Southeast Sulawesi Province in 2017, based on a Decree from the Morowali Regent on Mining Exploration, Production MBP, and Change of Name of Production Mining Business License Holder from DIPM to PAM.

PT PAM MINERAL TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

38. PERKARA HUKUM DAN LIABILITAS
BERSYARAT (lanjutan)

Perkara hukum (lanjutan)

Pada bulan Maret 2015, BMU melakukan kegiatan aktivitas penambangan Nikel di wilayah Terminal Khusus Pertambangan Nikel PAM seluas kurang lebih 132.887 m². Aktivitas ini membuat PAM mengalami kendala dan gangguan sehingga mengakibatkan terhentinya proses kegiatan penambangan ore nikel PAM.

Selanjutnya PAM mengetahui tindakan BMU telah melawan hukum atas dasar tumpang tindih antara wilayah stockpile, kantor, mess dan pelabuhan milik PAM dengan wilayah IUP OP Pertambangan BMU yang dikeluarkan oleh Bupati Morowali No. 540.3/SK.004/DESDM/X/2011 tanggal 27 Oktober 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dan Surat Rekomendasi No. 552/93-Hubkominfo/XI/2011 tanggal 24 November 2011 tentang Penetapan Lokasi Terminal Khusus DIPM untuk PAM. PAM secara berulang kali berupaya mencari solusi permasalahan, namun tidak pernah ada itikad baik dari BMU dan BUPATI.

Gugatan perdata No. 73

Pada tanggal 17 Desember 2019, PAM telah menerima surat putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso No. 73/Pdt.G/2019/PN.Pso yang menyatakan:

1. Menerima eksepsi PAM untuk sebagian;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Poso tidak berwenang mengadili perkara tersebut; dan
3. Menghukum PAM untuk membayar biaya perkara ditaksir sejumlah Rp9.995.000.

PT PAM MINERAL TBK AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

38. LEGAL MATTERS AND CONTINGENCIES
(continued)

Legal matters (continued)

In March 2015, BMU carried out Nickel mining activities in the PAM Nickel Mining Special Terminal area of approximately 132,887 m². This activity caused PAM to experience problems and disturbances, resulting in the cessation of PAM's nickel ore mining activities.

Furthermore, PAM found out that BMU's actions had violated the law on the basis of the overlap between the stockpile area, office, mess, and port owned by PAM with the Mining OP MBP area of BMU issued by the Morowali Regent No. 540.3/SK.004/DESDM/X/2011 dated October 27, 2011 concerning Approval to Increase Exploration Mining Business Permit to Production Operation Mining Business Permit and Recommendation Letter No. No.552/93-Hubkominfo/XI/2011 dated November 24, 2011 regarding the Determination of the Location of DIPM Special Terminal for PAM. PAM repeatedly tried to find a solution to the problem, but there was never any good will from BMU and BUPATI.

Civil lawsuit No. 73

On December 17, 2019, PAM has received a decision letter from the Panel of Judges of the District Court Position No.73/Pdt.G/2019/PN.Pso which states:

- 1. Accepting PAM exceptions partially;*
- 2. To declare that the Poso District Court is not authorized to hear the case; and*
- 3. Sentencing PAM to pay court fees estimated at Rp9,995,000.*

PT PAM MINERAL TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

38. PERKARA HUKUM DAN LIABILITAS BERSYARAT (lanjutan)

Perkara hukum (lanjutan)

Gugatan perdata No. 73 (lanjutan)

Pada tanggal 8 Oktober 2020, PAM telah menerima putusan sela banding dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dengan putusan nomor 35/PDT/2020/PTPAL yang menyatakan:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Poso No. 73/Pdt.G/2019/PN Pso tanggal 17 Desember 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Poso berwenang mengadili perkara No.73/Pdt.G/2019/PN Pso;
4. Memerintahkan Pengadilan Negeri Poso membuka persidangan untuk melanjutkan pemeriksaan dan memutus perkara tersebut;
5. Menghukum Para Terbanding semula para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000.

Pada tanggal 4 Agustus 2021, PAM telah menerima putusan sela kasasi dari Mahkamah Agung dengan putusan No. 1669K/PDT/2021 yang menyatakan:

1. Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi BMU.
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000.

Pada tanggal 7 Juni 2022, PAM menyatakan permohonan banding atas putusan perkara No. 73/Pdt.G/2019/PN Pso.

PT PAM MINERAL TBK AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

38. LEGAL MATTERS AND CONTINGENCIES (continued)

Legal matters (continued)

Civil lawsuit No. 73 (lanjutan)

On October 8, 2020, PAM has received an interlocutory appeal decision from the Panel of Judges of the High Court with decision number 35/PDT/2020/PTPAL which states:

1. Accept the appeal from the Plaintiff's original Appellant;
2. To revoke the Decision of the Poso District Court No. 73/Pdt.G/2019/PN Pso dated December 17, 2019 which is appealed against;
3. Declare that the Poso District Court has the authority to hear case No.73/Pdt.G/2019/PN Pso;
4. To instruct the Poso District Court to open the trial to continue the examination and decide the case;
5. Punish the Appellants originally the Defendants to pay court costs at both levels of court which at the appeal level is set at Rp150,000.

On August 4, 2021, PAM has received an interlocutory cassation decision from the Supreme Court with decision No. 1669K/PDT/2021 which states:

1. Decline the Appellant's Cassation petition of BMU.
2. Punish the Cassation Petitioner to pay court costs in this cassation in the amount of Rp500,000.

On June 7, 2022, PAM filed an appeal against the decision of case No. 73/Pdt.G/2019/PN Pso.

PT PAM MINERAL TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

38. PERKARA HUKUM DAN LIABILITAS BERSYARAT (lanjutan)

Perkara hukum (lanjutan)

Gugatan perdata No. 73 (lanjutan)

Pada tanggal 4 Oktober 2022, PAM telah menerima surat putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dengan nomor putusan 35/PDT/2020/PTPAL, yang menyatakan bahwa:

1. Menerima permohonan Banding dari pembanding semula Penggugat tersebut.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Poso No. 73/Pdt.G/2019/PN.Pso tanggal 7 Juni 2022 yang dimohonkan banding.
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000.

Pada tanggal 7 November 2022, PAM melalui kuasa hukumnya telah menyatakan dan menyerahkan Memori Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Palu No. 35/PDT/2020/PTPAL tanggal 4 Oktober 2020.

Pada tanggal 1 Desember 2022, Pengadilan Negeri Poso Kelas 1B telah mengirimkan surat pengantar ke Panitera Mahkamah Agung RI dengan perihal pemeriksaan berkas kasasi perkara perdata No. 73/Pdt.G/2019/PN.Pso.

Pada tanggal 4 Januari 2023, Pengadilan Negeri Poso Kelas 1B telah mengirimkan kelengkapan berkas kasasi perkara perdata No. 73/Pdt.G/2019/PN.Pso kepada Panitera Mahkamah Agung RI.

Pada tanggal 11 September 2023, Royal Langgeroni, S.H, M.H., menyampaikan atas berkas perkara kasasi telah terbit Putusan No. 1665 K/Pdt/2023 telah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada tanggal 27 Juli 2023, yang menyatakan bahwa :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Ruddy Tjanaka tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000.

Dengan hasil putusan menolak permohonan Kasasi termasuk menolak tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh PAM, dan sampai saat ini putusan Kasasi tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

PT PAM MINERAL TBK AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

38. LEGAL MATTERS AND CONTINGENCIES (continued)

Legal matters (continued)

Civil lawsuit No. 73 (lanjutan)

On October 4, 2022, PAM received a decision letter from the Panel of Judges of the Central Sulawesi High Court with decision No. 35/PDT/2020/PTPAL, stating that:

1. Accept the appeal from the appellant, originally the Plaintiff.
2. Affirm the decision of the Poso District Court No. 73/Pdt.G/2019/PN.Pso dated June 7, 2022 which is appealed.
3. Punish the Plaintiff's original Appellant to pay court costs in both levels of court which in the appeal level is set at Rp150,000.

On November 7, 2022, PAM through its attorney has stated and submitted a Memorandum of Cassation against the Decision of the Palu High Court No. 35/PDT/2020/PTPAL dated October 4, 2020.

On December 1, 2022, the Poso District Court Class 1B sent a cover letter to the Registrar of the Supreme Court of the Republic of Indonesia regarding the examination of the cassation file of civil cases No. 73/Pdt.G/2019/PN.Pso.

On January 4, 2023, the Poso District Court Class 1B sent the complete file of the cassation of civil case No. 73/Pdt.G/2019/PN.Pso to the Registrar of the Supreme Court of the Republic of Indonesia.

On September 11, 2023, Royal Langgeroni, S.H, M.H., conveyed that the cassation case file had been published Decision No. 1665 K/Pdt/2023 was decided in a deliberation meeting of the Panel of Judges on July 27, 2023, which stated that:

1. Reject the cassation application from the Cassation Petitioner Ruddy Tjanaka;
2. Punish the Cassation Petitioner to pay court costs in this cassation level in the amount of Rp500,000.

With the result of the decision to reject the cassation request, including rejecting the claim for compensation submitted by PAM, and to date the cassation decision has permanent legal force.

PT PAM MINERAL TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

38. PERKARA HUKUM DAN LIABILITAS BERSYARAT (lanjutan)

Perkara hukum (lanjutan)

Gugatan perdata No. 507

Pada tanggal 18 Juni 2019, PAM kembali menggugat secara perdata terhadap BMU dan PT Transon Bumindo Resources ("Transon") selaku Perusahaan produksi nikel milik BMU, di mana PAM sebagai pemegang IUP-OP berdasarkan Surat Keputusan dari Bupati Morowali No.540.3/SK.004/DESDM/II/2012 tanggal 17 Februari 2012 yang berlokasi di Desa Buleleng dan Desa Laroenai, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah seluas 198 Ha.

PAM juga pemegang izin Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Khusus Pertambangan Nikel berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. BX-222/PP008 tanggal 21 Juni 2016 tentang Pemberian Izin Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Khusus Pertambangan Nikel Penggugat di Desa Laroenai, Kec. Bungku Pesisir, Kab Morowali Provinsi Sulawesi Tengah, yang mana izin tersebut merupakan pengalihan dari DIPM berdasarkan Perjanjian Pengalihan Hak Jetty.

Tanpa izin PAM, BMU dan Transon melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam wilayah bangunan, *stockpile*, dan dermaga milik PAM yang berada dalam wilayah Terminal Khusus milik PAM.

Kegiatan BMU dan Transon tersebut meliputi: pengeboran beberapa titik di sekitar bangunan PAM, pengukuran lahan-lahan masyarakat setempat yang sudah pernah diberikan kompensasi dan telah menjadi aset PAM serta melakukan provokasi masyarakat setempat.

Atas kegiatan tersebut, pada tanggal 19 Maret 2015, PAM mengirimkan surat kepada BMU dan Transon perihal keberatan atas aktivitas dalam Terminal Khusus dan PAM juga meminta untuk menghentikan kegiatan BMU dan Transon tersebut dalam waktu 1x24 jam. Selain itu, PAM juga mengirimkan surat kepada Bupati Morowali agar menghentikan kegiatan BMU dan Transon dalam wilayah Terminal Khusus PAM dan mohon petunjuk penyelesaian atas permasalahan tersebut.

PT PAM MINERAL TBK AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

38. LEGAL MATTERS AND CONTINGENCIES (continued)

Legal matters (continued)

Civil lawsuit No. 507

On June 18, 2019, PAM again filed a civil lawsuit against BMU and PT Transon Bumindo Resources ("Transon") as the nickel production company owned by BMU, where PAM is the holder of the MBP-OP based on the Decree of the Regent of Morowali No. 540.3/SK.004/DESDM/II/2012 dated February 17, 2012 located in Buleleng Village and Laroenai Village, Bungku Pesisir District, Morowali Regency, Central Sulawesi Province, covering an area of 198 Ha.

PAM is also the holder of a permit for the Construction and Operation of a Nickel Mining Special Terminal based on the Decree of the Director General of Sea Transportation No. BX-222/PP008 dated June 21, 2016 concerning the Granting of a Construction Permit for the Plaintiff's Nickel Mining Special Terminal in Laroenai Village, Kec. Bungku Pesisir, Morowali Regency, Central Sulawesi Province, where the permit is a transfer from DIPM based on the Jetty Rights Transfer Agreement.

Without PAM's permit, BMU and Transon carry out activities in the area of PAM's buildings, stockpiles, and docks located within the PAM's Special Terminal area.

The activities of BMU and Transon include: drilling at several points around the PAM building, measuring the lands of local communities that have been compensated and have become PAM assets and provoking local communities.

For this activity, on March 19, 2015, PAM sent a letter to BMU and Transon regarding objections to the activities in the Special Terminal and PAM also asked to stop the activities of BMU and Transon within 1x24 hours. In addition, PAM also sent a letter to the Morowali Regent to stop BMU and Transon activities in the PAM Special Terminal area and ask for instructions on how to solve the problem.

PT PAM MINERAL TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

38. PERKARA HUKUM DAN LIABILITAS BERSYARAT (lanjutan)

Perkara hukum (lanjutan)

Gugatan perdata No. 507 (lanjutan)

Pada tanggal 9 April 2015, Pemerintah Kabupaten Morowali melakukan mediasi antara PAM dan BMU serta Transon dan menghasilkan kesepakatan yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman Bersama yang mana isinya pada pokoknya yaitu BMU dan Transon telah sepakat untuk memberikan lahan pengganti (tukar ganti lahan) atas aset bangunan PAM seluas kurang lebih 6 Ha, yang mana lahan dan bangunan pengganti tersebut harus mendapatkan persetujuan dahulu dari PAM.

Setelah Nota Kesepahaman ditandatangani, BMU dan Transon mengingkari isi kesepakatan tersebut dengan tetap melakukan kegiatan di wilayah Terminal Khusus milik PAM, dimana BMU dan Transon belum menyerahkan lahan maupun bangunan pengganti serta tidak mengajukan rencana kerja untuk disetujui PAM.

Pada tanggal 3 Juni 2015, BMU dan Transon melakukan perusakan aset bangunan PAM dan selanjutnya BMU dan Transon tetap melaksanakan kegiatan di atas wilayah Terminal Khusus milik PAM dan secara sepihak menggusur dan memindahkan *dome ore nickel* PAM dari wilayah dermaga milik PAM.

Pada tanggal 30 Juli 2015, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Morowali mengirimkan surat penghentian kegiatan kepada BMU dan Transon.

Pada tanggal 1 April 2020, perkara tersebut telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat melalui Putusan No. 507/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt, yang menyatakan:

1. Menyatakan menolak tuntutan provisi PAM seluruhnya;
2. Menyatakan menolak eksepsi BMU dan Transon seluruhnya;
3. Menyatakan menolak gugatan PAM seluruhnya;
4. Menghukum PAM untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.226.000.

PT PAM MINERAL TBK AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

38. LEGAL MATTERS AND CONTINGENCIES (continued)

Legal matters (continued)

Civil lawsuit No. 507 (continued)

On April 9, 2015, the Morowali District Government mediated between PAM and BMU and Transon and resulted in an agreement as outlined in a Memorandum of Understanding in which the main contents were that BMU and Transon had agreed to provide replacement land (land swap) for PAM's building assets covering an area of approximately 6 Ha, of which the replacement land and buildings must obtain prior approval from PAM.

After the Memorandum of Understanding was signed, BMU and Transon reneged on the contents of the agreement by continuing to carry out activities in the PAM Special Terminal area, where BMU and Transon had not handed over land or replacement buildings and did not submit a work plan for PAM approval.

On June 3, 2015, BMU and Transon damaged PAM's building assets and subsequently BMU and Transon continued to carry out activities in the Special Terminal area owned by PAM and unilaterally displaced and removed PAM's nickel dome ore from the dock area owned by PAM.

On July 30, 2015, the Head of the Department of Energy and Mineral Resources of Morowali Regency sent a letter of termination of activities to BMU and Transon.

On April 1, 2020, the case was decided by the West Jakarta District Court Judge through Decision No.507/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt, which stated:

1. Declaring to reject the demands of the PAM provision in its entirety;
2. Declaring to reject the exception of BMU and Transon in its entirety;
3. Declaring that PAM's claim is completely rejected;
4. Sentencing PAM to pay court fees of Rp1,226,000.

PT PAM MINERAL TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

38. PERKARA HUKUM DAN LIABILITAS BERSYARAT (lanjutan)

Perkara hukum (lanjutan)

Gugatan perdata No. 507 (lanjutan)

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah menerima dan mendaftarkan berkas perkara banding perdata terhadap putusan No. 507/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt tanggal 16 Oktober 2020, atas banding tersebut telah dikeluarkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 587/PDT/2020/PT.DKI tanggal 11 Desember 2020, yaitu:

1. Menerima permohonan banding dari PAM;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.507/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt tanggal 1 April 2020;
3. Menolak tuntutan provisi PAM;
4. Menolak eksepsi BMU dan Transon;
5. Mengabulkan gugatan PAM untuk sebagian;
6. Menyatakan BMU dan Transon telah melakukan wanprestasi;
7. Menyatakan Nota Kesepahaman Bersama antara PAM dan BMU serta Transon tanggal 9 April 2015 adalah sah dan mengikat;
8. Menghukum BMU dan Transon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp150.000
9. Menolak gugatan PAM untuk selain dan selebihnya.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 21 Februari 2022 dengan nomor putusan 210 K/Pdt/2022 atas putusan No. 507/Pdt.G/2019/PN.jkt.Brt tanggal 1 April 2020 sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi I: PAM, dan kasasi II: para pemohon BMU dan Transon;
2. Menghukum pemohon kasasi I dan para pemohon II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000.

Gugatan perdata No. 968

Pada tanggal 20 Oktober 2022, PAM kembali menggugat Transon, BMU, dan turut tergugat: Bupati Morowali, Kepala Desa Laroenai, Camat Bungku Pesisir, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Nasional atas perbuatan melawan hukum yakni telah sengaja melakukan pemalangan/penutupan pada jalan *hauling* area menuju pintu masuk/keluar terminal khusus/dermaga/pelabuhan milik PAM.

PT PAM MINERAL TBK AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

38. LEGAL MATTERS AND CONTINGENCIES (continued)

Legal matters (continued)

Civil lawsuit No. 507 (continued)

The DKI Jakarta High Court has received and registered a civil appeal case file against decision No. 507/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt dated October 16, 2020, For the appeal, the DKI Jakarta High Court Decision No. 587/PDT/2020/PT.DKI dated December 11, 2020 has been issued, which are:

1. Receive appeals from PAM;
2. Canceling the Decision of the West Jakarta District Court No.507/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt dated April 1, 2020;
3. Reject the demands of the PAM provisions;
4. Reject the exceptions of BMU and Transon;
5. Accept PAM's lawsuit in part;
6. To declare that BMU and Transon have defaulted;
7. To declare that the Memorandum of Understanding between PAM and BMU and Transon dated April 9, 2015 is valid and binding;
8. Sentencing BMU and Transon to pay court fees of Rp150,000;
9. Reject PAM's lawsuit for other than and the rest.

Based on the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia dated February 21, 2022 with decision number 210 K/Pdt/2022 on decision No. 507/Pdt.G/2019/PN.jkt.Brt dated April 1, 2020 as follows:

1. Rejecting cassation petition I: PAM, and cassation II: the cassation petitioners BMU and Transon;
2. Punish cassation petitioner I and cassation petitioner II to pay court costs in this cassation level in the amount of Rp500,000.

Civil lawsuit No. 968

On October 20, 2022, PAM again sued Transon, BMU, and co-defendants: Regent of Morowali, Head of Laroenai Village, Camat Bungku Pesisir, Ministry of Agrarian and Spatial Planning/Head of National Agency for unlawful acts, namely deliberately blocking/closing the hauling area road to the entrance/exit of the special terminal/jetty/port owned by PAM.

38. PERKARA HUKUM DAN LIABILITAS BERSYARAT (lanjutan)

Perkara hukum (lanjutan)

Gugatan perdata No. 968 (lanjutan)

Berdasarkan putusan serta merta yang didasarkan pada fakta-fakta yang dapat penggugat buktikan dan didukung oleh bukti-bukti yang sah dan autentik khususnya RKAB Tahun 2022 yang telah disetujui Kementerian ESDM Cq Ditjen Minerba. Sehingga sangat beralasan hukum gugatan PAM diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding dan kasasi.

Dengan pokok perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Transon dan BMU merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Transon dan BMU tidak mempunyai hak milik dan penguasaan atas manfaat dan fungsi yang terdapat pada jalan *hauling* yang terletak di Desa Laroenai, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah sesuai titik koordinat yang tercantum dalam Surat Bupati Morowali No. 551.21/0362/DISHUB/III/2022 tanggal 10 Maret 2022;
4. Memerintahkan kepada Transon dan BMU membuka portal atau benda yang digunakan untuk melakukan pemalangan/penutupan pada jalan *hauling* serta tidak kembali melakukan penutupan jalan pada Jalan *hauling* dan apabila tidak dilakukan secara sukarela memerintahkan Juru Sita Pengadilan yang melakukan pembukaan portal atau membongkar benda-benda yang digunakan sebagai alat pemalangan/penutupan pada Jalan *hauling*;
5. Menghukum Transon dan BMU untuk membayar seluruh biaya kerugian yang timbul baik materil maupun non-material masing-masing sebesar Rp313.792.324.169,97 dan Rp613.000.000.000;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan terhadap aset/harta benda yang didalamnya terdapat hak atau kepemilikan dari Transon dan BMU;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum perlawanan, Banding dan Kasasi;

38. LEGAL MATTERS AND CONTINGENCIES (continued)

Legal matters (continued)

Civil lawsuit No. 968 (continued)

Based on a decision that is based on facts that the plaintiff can prove and supported by valid and authentic evidence, especially the 2022 RKAB which has been approved by the Ministry of Energy and Mineral Resources Cq Directorate General of Mineral and Coal. So it is very reasonable for the law that PAM's lawsuit is accepted and granted in its entirety and can be implemented first even though there are legal efforts of resistance, appeal and cassation.

With the subject matter:

1. *Accept and grant the plaintiff's claim in its entirety;*
2. *Declare that the actions of Transon and BMU are unlawful;*
3. *Declare that Transon and BMU do not have property rights and control over the benefits and functions contained in the hauling road located in Laroenai Village, Bungku Pesisir Subdistrict, Morowali Regency, Central Sulawesi Province according to the coordinates listed in the Morowali Regent Letter No. 551.21/0362/DISHUB/III/2022 dated March 10, 2022;*
4. *Ordering the Transon and BMU to open the portal or objects used to block/close the hauling road and not to re-clock the road on the hauling road and if it is not done voluntarily order the Court Bailiff to open the portal or dismantle the objects used as a means of blocking/closing the hauling road;*
5. *Punish Transon and BMU to pay all costs incurred both material and non-material losses amounting to Rp313,792,324,169.97 and Rp613,000,000,000, respectively;*
6. *Declare valid and valuable the bail confiscation placed on the assets in which there are rights or ownership of Transon and BMU;*
7. *Declare that the verdict in this case can be implemented in advance even though there are legal efforts of resistance, appeal and cassation;*

38. PERKARA HUKUM DAN LIABILITAS BERSYARAT (lanjutan)

Perkara hukum (lanjutan)

Gugatan perdata No. 968 (lanjutan)

Dengan pokok perkara: (lanjutan)

8. Memerintahkan kepada Transon dan BMU membuka portal atau benda yang digunakan untuk melakukan pemalangan/penutupan pada jalan *hauling* serta tidak kembali melakukan penutupan jalan pada Jalan *hauling* dan apabila tidak dilakukan secara sukarela memerintahkan Juru Sita Pengadilan yang melakukan pembukaan portal atau membongkar benda-benda yang digunakan sebagai alat pemalangan/penutupan pada Jalan *hauling*;
9. Menghukum Transon dan BMU untuk membayar seluruh biaya kerugian yang timbul baik materil maupun non-material masing-masing sebesar Rp313.792.324.169,97 dan Rp613.000.000.000;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan terhadap aset/harta benda yang didalamnya terdapat hak atau kepemilikan dari Transon dan BMU;
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum perlawanan, Banding dan Kasasi;.

Melalui surat nomor 012/SK-MSSP/I.2023 tanggal 12 Januari 2023 perihal Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Registrasi No. 968/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Br. yang ditujukan ke Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat atas dasar adanya kekurangan dari materi gugatan maupun dokumen-dokumen yang harus dilengkapi. Maka demi memenuhi unsur-unsur dalam mengajukan suatu gugatan keperdataan dan memenuhi kelengkapan berkas administrasi, PAM mengajukan permohonan Pencabutan Gugatan secara tertulis.

Gugatan perdata No. 268

Pada tanggal 20 Maret 2023, PAM kembali menggugat Transon, BMU, dan turut tergugat: Bupati Morowali, Kepala Desa Laroenai, Camat Bungku Pesisir, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Nasional atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat (Transon, BMU) pada tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan sekitar bulan Januari 2022 secara sengaja tanpa hak, sewenang-wenang serta melawan hukum melakukan tindakan pemalangan dan penutupan pada Jalan *Hauling*, kemudian untuk kedua kalinya Tergugat I (Transon) kembali melakukan perbuatannya pada tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan gugatan ini diajukan yang mengakibatkan Penggugat/PAM tidak dapat beroperasi melakukan kegiatan Pertambangan.

38. LEGAL MATTERS AND CONTINGENCIES (continued)

Legal matters (continued)

Civil lawsuit No. 968 (continued)

With the subject matter: (continued)

8. *Ordering the Transon and BMU to open the portal or objects used to block/close the hauling road and not to re-clock the road on the hauling road and if it is not done voluntarily order the Court Bailiff to open the portal or dismantle the objects used as a means of blocking/closing the hauling road;*
9. *Punish Transon and BMU to pay all costs incurred both material and non-material losses amounting to Rp313,792,324,169.97 and Rp613,000,000,000, respectively;*
10. *Declare valid and valuable the bail confiscation placed on the assets in which there are rights or ownership of Transon and BMU;*
11. *Declare that the verdict in this case can be implemented in advance even though there are legal efforts of resistance, appeal and cassation;*

Through letter number 012/SK-MSSP/I.2023 dated January 12, 2023 regarding Application for Revocation of Lawsuit on Registration Case No. 968/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Br. addressed to the Chairperson of the West Jakarta District Court on the basis of a deficiency in the lawsuit material and documents that must be completed. So in order to fulfill the elements in filing a civil lawsuit and fulfilling the completeness of administrative files, PAM submits a written application for revocation of lawsuit.

Civil lawsuit No. 268

On March 20, 2023, PAM again sued Transon, BMU, and co-defendants: Morowali Regent, Laroenai Village Head, Bungku Pesisir Sub-District Head, Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Agency for unlawful acts committed by the Defendants (Transon, BMU) on December 29, 2021 up to around January 2022, deliberately without rights, arbitrarily and against the law by blocking and closing Jalan *Hauling*, then for the second time Defendant I (Transon) returned to his actions on May 11, 2022 until this lawsuit was filed which resulted in the Plaintiff/PAM being unable to operate mining activities.

38. PERKARA HUKUM DAN LIABILITAS BERSYARAT (lanjutan)

Perkara hukum (lanjutan)

Gugatan perdata No. 268 (lanjutan)

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Pada tanggal 17 Oktober 2023 dengan amar putusan PN No. 268/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt.

Dengan pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tidak mempunyai Hak Milik dan penguasaan atas manfaat dan fungsi yang terdapat pada jalan *hauling* yang terletak di Desa Laroenai, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah sesuai titik koordinat yang tercantum dalam Surat Bupati Morowali No. 551.21/0362/DISHUB/III/2022, tanggal 10 Maret 2022;
4. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II membuka portal atau benda yang digunakan untuk melakukan pemalangan/penutupan pada jalan *hauling* serta tidak Kembali melakukan penutupan pada jalan *hauling* dan apabila tidak dilakukan secara sukarela memerintahkan juru sita pengadilan yang melakukan pembukaan portal atau membongkar benda-benda yang digunakan sebagai alat pemalang/penutupan pada jalan *hauling* tersebut;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya kerugian materil yang timbul dalam perkara *a quo* sebesar Rp313.792.324.169,97 (tiga ratus tiga belas milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus dua puluh empat ribu seratus enam puluh sembilan rupiah sembilan puluh tujuh sen);
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Upaya hukum perlawanan, banding dan kasasi sepanjang hanya pembukaan portal atau benda yang digunakan untuk melakukan pemalangan/penutupan pada jalan *hauling* serta tidak kembali melakukan penutupan pada jalan *hauling* tersebut;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) setiap harinya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai tergugat I dan Tergugat II melaksanakan isi putusan dalam perkara *a quo*;
8. Menghukum turut Tergugat I, Turut Tergugat II Turut Tergugat III dan turut Tergugat IV untuk patuh dan taat terhadap putusan ini;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

38. LEGAL MATTERS AND CONTINGENCIES (continued)

Legal matters (continued)

Civil lawsuit No. 268 (continued)

Based on the Decision of the State Court of West Jakarta on October 17, 2023 with the order of the decision PN No.268/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt.

With the subject matter:

1. Adjudicate the Claims of the Plaintiff for part;
2. Declare the Acts of the Defendant I and the Defendant II to be acts against the law;
3. Declaration of Defendant I and Defendant II have no right of ownership and possession over the benefits and functions of the hauling road located in the village of Laroenai, district of Bungku Coastal, Morowali County, Central Sulawesi Province according to the coordinate point listed in the Morowali Order No. 551.21/0362/DISHUB/III/2022, dated March 10, 2022;
4. Orders the Defendant I and the Defender II to open the portal or the object used to carry out the interception/closure of the Hauling road and not to return the closure on the hauling route and, if not done voluntarily, orders the jury of the court to perform the opening or dismantling of the objects used as a tool of interception/ closure on such haulings road;
5. Orders Defendant I and Defendant II to pay the costs of material loss arising in a case of *a quo* amounting to Rp313,792,324,169.97 (three hundred thirteen billion seven hundred ninety-two million three hundred twenty-four thousand sixty-nine rupees ninety seven cents);
6. Declare the judgment in this matter can be executed in advance even if there is a legal effort of opposition, appeal and cassation as long as only the opening of the portal or the object used to carry out the assault/closure on the road of Hauling and not again to do the closure on such road;
7. Condemns the Defendant I and II to pay a penalty (*dwangsom*) of Rp1,000,000 (one million rupiah) every day after this judgment has a permanent legal force until defendant I and defendant II execute the content of the judgement in *a quo* matters;
8. Condemning the defendant I, defendant II and defendant III to obey and obey this decision;
9. Rejecting the complaint of the petitioner for other and the rest;

PT PAM MINERAL TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

38. PERKARA HUKUM DAN LIABILITAS BERSYARAT (lanjutan)

Gugatan perdata No. 268 (lanjutan)

Dengan pokok perkara: (lanjutan)

10. Membebaskan biaya perkara secara tanggung rentang kepada Tergugat I dan Tergugat II Sebesar Rp11.702.000 (sebelas juta tujuh ratus dua ribu Rupiah).

Pada tanggal 27 Oktober 2023 pihak Tergugat I dan Tergugat II mengajukan permohonan banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada tanggal 25 Maret 2024 dengan amar putusan PT 190/PDT/2024/PT DKI.

Dengan pokok perkara:

1. Menerima Permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat tersebut.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 268/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt tanggal 17 Oktober 2023 yang dimohonkan banding tersebut.
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah).

Pada tanggal 02 Juli 2024 berkas Kasasi telah dikirim dari PN Jakarta Barat ke panitera Mahkamah Agung RI dengan nomor pengiriman berkas kasasi /PAN.PN.W10-U2/HK2.7/2024.

Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian ini diterbitkan, PAM masih menunggu hasil/ isi putusan Kasasi dari Mahkamah Agung RI (inkrah) dengan nomor putusan 6481K/PDT/2024 tanggal 16 Desember 2024.

IBM

Liabilitas bersyarat

Pada tanggal 7 Juli 2023, kapal tongkang BG LL 2712 yang sedang mengangkut bijih nikel milik IBM mengalami kebocoran pada dinding kapal tongkang yang mengakibatkan tumpahnya bijih nikel di perairan pantai Desa Ulu Sawa, Kec Sawa, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, hingga kemudian Kapal tongkang karam karena keadaan cuaca yang semakin memburuk sejak kapal tongkang mengalami kebocoran.

PT PAM MINERAL TBK AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

38. LEGAL MATTERS AND CONTINGENCIES (continued)

Civil lawsuit No. 268 (continued)

With the subject matter:

10. Charging the costs of matters in a responsible range to the claimants I and II in the amount of Rp11,702,000 (eleven million seven hundred two thousand Rupiah).

On October 27, 2023, Defendant I and Defendant II submitted an appeal request.

Based on the decision of the DKI Jakarta High Court on March 25, 2024 with the ruling PT 190/PDT/2024/PT DKI.

With the main issue:

1. Accept the appeal application from the appellants, the original defendant.
2. Strengthen the West Jakarta District Court Decision Number 268/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt dated October 17, 2023 which is being appealed.
3. Sentencing the Appellants and the Defendants to pay court costs at both court levels, which for the appeal level amounted to Rp150,000 (one hundred and fifty thousand Rupiah).

On July 2, 2024, the cassation file was sent from the West Jakarta District Court to the clerk of the Supreme Court of the Republic of Indonesia with the cassation file delivery number /PAN.PN.W10-U2/HK2.7/2024

As at the date this consolidated financial report is published, PAM is still waiting for the cassation decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia (inkrah) with Decision Number 6481K/PDT/2024 dated December 16, 2024.

IBM

Contingencies

On July 7, 2023, the vessel BG LL 2712 which was transporting IBM's nickel ore experienced a leak in the wall of the vessel which resulted in the spilling of nickel ore in the coastal waters of Ulu Sawa Village, Sawa Sub-District, North Konawe Regency, Southeast Sulawesi Province, until then the vessel sank due to worsening weather conditions since the vessel experienced a leak.

38. PERKARA HUKUM DAN LIABILITAS BERSYARAT (lanjutan)

IBM (lanjutan)

Liabilitas bersyarat (lanjutan)

Karena kejadian karamnya kapal tongkang BG LL 2712, IBM dianggap melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Sehingga IBM harus memberikan ganti rugi kepada masyarakat sekitar dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia atas hal tersebut. Pada bulan Desember 2023, IBM telah membayarkan sebesar Rp570.067.644 atas ganti rugi kepada masyarakat sekitar. Sedangkan ganti rugi kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, masih menunggu Surat Keputusan dari instansi tersebut. IBM tidak dapat menghitung sendiri jumlah kerugian yang harus dibayarkan.

Pada tanggal 23 Februari 2024, IBM menghadiri undangan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dengan agenda negosiasi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup ("PSLH") terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup akibat tumpahnya muatan bijih nikel dari BG LL 2712, hasil negosiasi penyelesaian sengketa masih dalam proses.

Setelah dilakukan beberapa kali pertemuan dan Pertemuan Negosiasi PSLH Terhadap Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup di Perairan Desa Ulu Sawa, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara Akibat Tumpahnya Muatan Ore Nikel dari BG LL 2712 yang dilakukan pada tanggal 25 September 2024 telah mencapai kesepakatan antara para pihak, kemudian dituangkan kembali dalam bentuk Kesepakatan PSLH di Luar Pengadilan antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dengan IBM tanggal 25 September 2024, dengan nilai klaim kerugian lingkungan hidup sebesar Rp6.124.657.918.

Sampai surat laporan ini diterbitkan, IBM telah melunasi nilai klaim kerugian di atas, sebagaimana telah disampaikan pada surat yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. S.603/SETPHLHK/KKOTL/GKM.3.9/B/12/2024 tanggal 27 Desember 2024 dengan hal Pemberitahuan Lunas Pembayaran.

38. LEGAL MATTERS AND CONTINGENCIES (continued)

IBM (continued)

Contingencies (continued)

Due to the sinking of the barge BG LL 2712, IBM is considered to have polluted and or damaged the environment. Therefore, IBM must provide compensation to the local community and the Ministry of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia for this matter. In December 2023, IBM has paid Rp570,067,644 for compensation to the local community. Meanwhile, the compensation to the Ministry of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia is still awaiting a decree from the ministry. IBM is unable to calculate the amount of compensation that must be paid.

On February 23, 2024, IBM attended an invitation from the Ministry of Environment and Forestry at the Directorate of Environmental Dispute Resolution with the agenda of negotiating the Settlement of Environmental Disputes ("PSLH") regarding pollution and environmental damage caused by the spillage of nickel ore from BG LL 2712. The negotiation process for settling the dispute is still ongoing.

After several meetings and the PSLH Negotiation Meeting on Environmental Pollution and Damage in the Waters of Ulu Sawa Village, North Konawe Regency, Southeast Sulawesi Province due to the BG LL 2712 Nickel Ore Spill held on September 25, 2024, an agreement was reached between the parties, then reaffirmed in the form of an Out-of-Court PSLH Agreement between the Ministry of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia and IBM dated September 25, 2024, with an environmental loss claim value of Rp6,124,657,918.

As of the issuance of this report, IBM has paid off the value of the above loss claim, as stated in the letter issued by the Ministry of Environment and Forestry Directorate General of Environmental and Forestry Law Enforcement No. S.603/SETPHLHK/KKOTL/GKM.3.9/B/12/2024 dated December 27, 2024 with the Notice of Payment.